



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari

STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL PHL

2021

PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



KATA PENGANTAR

Buku data statistik Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2021 bertujuan untuk mempublikasikan data-data mengenai pembangunan kehutanan Bidang Pengelolaan Hutan Lestari yang terangkum secara komprehensif dari bulan Januari hingga Desember 2021.

Data dan informasi yang terangkum di dalam buku data statistik ini merupakan hasil pemutakhiran data dan informasi yang telah dilaksanakan hingga akhir Desember 2021 yang diperoleh dari berbagai sumber data dan informasi. Beberapa data disajikan secara time series sejak tahun 2017 hingga 2021.

Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak. Kritik dan saran kami harapkan untuk pengembangan dan penyempurnaan buku data statistik Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari di waktu yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku data statistik Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2021.

Jakarta, Juli 2022
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ir. Misran, MM
NIP. 19621212 199303 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan	1
Gambar 1	Luasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi 1
Gambar 2	Realisasi PNPB Sektor PHL Tahun 2017 - 2021 4
Gambar 3	Perkembangan Ekspor Produk Industri Kehutanan Tahun 2017 – 2021 6
Gambar 4	Perkembangan Produksi Kayu Bulat PBPH Hutan Alam Tahun 2017 – 2021 8
Gambar 5	Perkembangan Produksi Kayu Bulat PBPH Hutan Tanaman Industri Tahun 2017 – 2021 8
Gambar 6	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (y-on-y) 9
Gambar 7	Laju Pertumbuhan Produksi Kayu Per-Bulan Tahun 2019-2021 10
Gambar 8	Laju Pertumbuhan Produksi Kayu Hutan Alam, Hutan Tanaman, dan Perhutani Per-Tahun 2020-2021 11
Gambar 9	Laju Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Kehutanan Tahun 2020-2021 12
Gambar 10	Produksi HHBK Tahun 2021 (Ton) 13
Tabel 1.1	Luas Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Berdasarkan Sk Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 26
Tabel 1.2	Luas Arahana Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021 27
Tabel 1.3	Penetapan Wilayah KPHP Tahun 2021 28
Tabel 2.1	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Kegiatan Hutan Alam Tahun 2017 - 2021 47
Tabel 2.2	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Kegiatan Hutan Tanaman Industri Tahun 2017 - 2021 48
Tabel 2.3	Investasi PBPH Kegiatan Hutan Alam Tahun 2017-2021 49
Tabel 2.4	Investasi PBPH Kegiatan Hutan Tanaman Industri Tahun 2017-2021 50
Tabel 2.5	Penanaman PBPH Kegiatan Hutan Alam Tahun 2017 - 2021 51
Tabel 2.6	Penanaman PBPH Kegiatan Hutan Tanaman Industri Tahun 2017 - 2021 52
Tabel 2.7	Produksi Kayu Bulat PBPH Pada Hutan Alam Tahun 2017 – 2021 53
Tabel 2.8	Produksi Kayu Bulat Pada PBPH Kegiatan Hutan Tanaman Industri Tahun 2017 - 2021 54

Tabel 2.9	Tenaga Kerja PBPH Kegiatan Hutan Alam Tahun 2017 - 2021	55
Tabel 2.10	Tenaga PBPH Kegiatan Hutan Tanaman Industri Tahun 2017 - 2021	56
Tabel 3.1	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Kegiatan Restorasi Ekosistem Tahun 2021	57
Tabel 3.2	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPH) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tahun 2021	59
Tabel 3.3	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPH) Kegiatan Pemanfaatan Sylvopastura Tahun 2021	60
Tabel 3.4	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPH) Kegiatan Pemanfaatan HHBK Tahun 2021	61
Tabel 3.5	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Berdasarkan Kelompok Jenis HHBK Tahun 2021	62
Tabel 4.1	Jumlah Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Usaha Besar Tahun 2017 – 2021	63
Tabel 4.2	Total Kapasitas Izin Produksi Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Tahun 2017 – 2021	64
Tabel 4.3	Investasi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Tahun 2017- 2021	65
Tabel 4.4	Tenaga Kerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Tahun 2017-2021	66
Tabel 4.5	Perkembangan Pasokan Kayu Bulat Untuk Bahan Baku Industri Per Sumber Bahan Baku Tahun 2017-2021	67
Tabel 4.6	Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Usaha Besar Tahun 2017-2021	68
Tabel 4.7	Realisasi Penggunaan Bahan Baku Kayu Bulat PBPHH Skala Usaha Besar Per Jenis Produksi Tahun 2017-2021	69
Tabel 4.8	Realisasi Penggunaan Bahan Baku Kayu Bulat PBPHH Skala Usaha Besar Tahun 2017-2021	70
Tabel 4.9	Produksi Plywood Dan Laminated Veneer Lumber (LVL) Tahun 2017-2021	71
Tabel 4.10	Perkembangan Produksi Veneer Dari PBPHH Skala Usaha Besar Tahun 2017-2021	72
Tabel 4.11	Produksi Kayu Gergajian Dari PBPHH Skala Usaha Besar Tahun 2017-2021	73
Tabel 4.12	Produksi Serpih Kayu Dari PBPHH Skala Usaha Besar Tahun 2017-2021	74
Tabel 4.13	Produksi Pulp Dari PBPHH Skala Usaha Besar Tahun 2017-2021	75
Tabel 4.14	Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan Per Jenis Produk Tahun 2017 - 2021	76
Tabel 4.15	Nilai Ekspor Produk Industri Kehutanan Tahun 2017 - 2021	77
Tabel 4.16	Ekspor Produk Industri Kehutanan Per Negara Tujuan Tahun 2017 - 2021	78
Tabel 5.0	Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Tahun 2017-2021	79

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi dijelaskan bahwa Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah dan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan. Berdasarkan mandat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 bahwa Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari.

Hingga Tahun 2021 tercatat luas hutan lindung (HL) mencapai 29,56 juta ha dan luas hutan produksi mencapai 68,82 juta Ha dengan rincian hutan produksi tetap (HP) 29,23 juta Ha, hutan produksi terbatas (HPT) 26,80 juta ha, dan hutan produksi konversi (HPK) 12,79 juta ha.



Gambar 1. Luasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Sejak tahun 2021 Ditjen PHL bertekad menyelamatkan hutan produksi Indonesia dengan mencanangkan perubahan kebijakan pengelolaan hutan lestari. Dengan semangat perubahan ini, Ditjen PHL menetapkan konfigurasi bisnis baru pengelolaan hutan produksi dengan melakukan :

1. Peningkatan akses masyarakat dan ekonomi masyarakat sekitar hutan, berupa kewajiban melaksanakan kelola sosial dan kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan;
2. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang transformatif untuk mendukung pelaksanaan aksi mitigasi sektor FOLU mencapai target NDC dan menuju net sink. Dasar kebijakan sektor lahan dan kehutanan yang dapat mendorong perubahan yang sistemik dalam pemanfaatan lahan ke depan untuk aksi pengelolaan hutan berkelanjutan untuk menuju Net
3. Sink FOLU 2030;

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus meningkatkan tata kelola kehutanan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan. Langkah tersebut dilakukan melalui perubahan paradigma pengelolaan sumber daya hutan dari

4. timber oriented menjadi Multiusaha Kehutanan;

Penyederhanaan birokrasi dengan menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik dengan melakukan integrasi aplikasi /sistem informasi pada Ditjen PHL melalui SATU DATA Ditjen PHL maka akan memperoleh data yang akurat, transparan, dan pengelolaan informasi serta dokumentasi yang difokuskan terhadap analisis data untuk pengambilan keputusan strategis, perencanaan anggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan serta pelayanan informasi publik yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik dalam mendukung kebijakan pemerintah dan mewujudkan penyelenggaraan

5. negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel sebagai bentuk Good Governance;

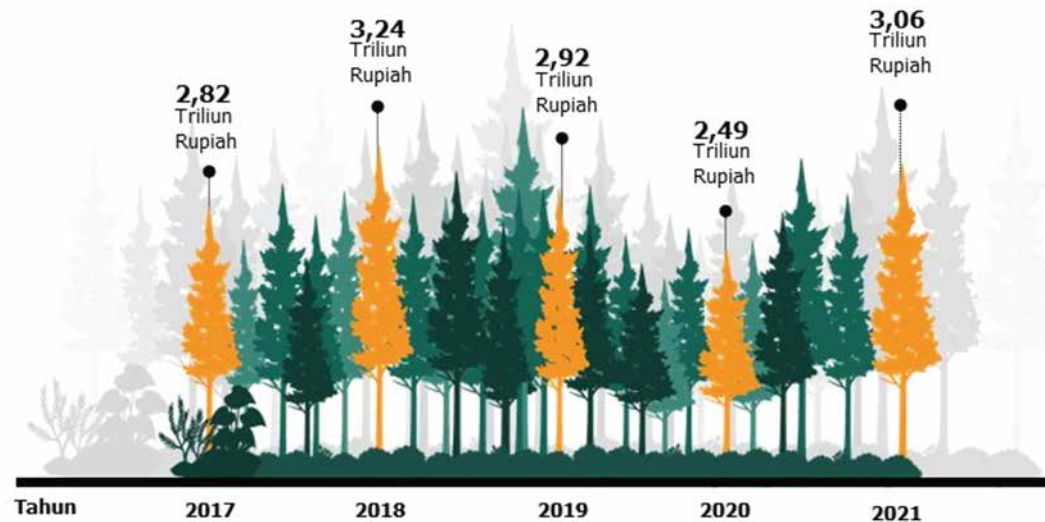
Peningkatan daya saing produk dan ekspor dengan melakukan berbagai upaya keberterimaan

6. produk di pasar global;

Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan.

Konfigurasi bisnis baru pengelolaan hutan produksi telah merubah paradigma dari timber management menjadi multiusaha. Multiusaha Kehutanan merupakan penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan sebagai entry strategi optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan, sekaligus merupakan perbaikan iklim investasi, yaitu penyederhanaan atau simplifikasi perizinan berusaha. Semula satu izin untuk satu kegiatan menjadi satu perizinan berusaha dengan multiusaha. Kegiatan Multiusaha Kehutanan meliputi Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu atau HHBK, Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Pemungutan HHBK. Implementasi Multiusaha Kehutanan mampu meningkatkan nilai ekonomi hutan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan dan mempertahankan tutupan lahan sekaligus upaya meningkatkan produktivitas hutan, meningkatkan PNPB, meningkatkan ekspor hasil.

Dalam implementasi perubahan paradigma pengelolaan sumber daya hutan tersebut, Ditjen PHL berpegang pada konsep LIMA PILAR pengelolaan hutan lestari, yaitu kepastian kawasan, jaminan berusaha, produktivitas, diversifikasi produk, dan daya saing. Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Kementerian/Lembaga lain, Akademisi dan Stakeholder lainnya dalam mendorong optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan dengan menerapkan multiusaha kehutanan kepada para Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). APHI terus mendorong anggotanya dalam model bisnis Multiusaha Kehutanan meliputi berbagai macam sector dan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan yang dapat memberikan dampak positif bagi unit manajemen dan terhadap masyarakat sekitar hutan dan meningkatkan nilai Produk Domestik Bruto. Konsep Bisnis dari hulu sampai hilir diterapkan, agroforestry, silvofishery, silvopastura, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menggunakan prinsip legal dan kelestarian.



Gambar 2. Realisasi PNBP Sektor PHL Tahun 2017 - 2021

Target PNBP pada tahun 2021 sebesar Rp. 3,164 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 3,061 Triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari PSDH, DR dan IIUPHH di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Upaya Direktorat Jenderal PHL untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan dimasa pandemi Covid-19, perlu dilakukan langkah-langkah strategis antara lain; (1) Penyederhanaan regulasi bidang PHL; (2) Mengevaluasi kinerja PBPH dan mengambil langkah tegas terhadap PBPH yang tidak aktif; (3) Meningkatkan produktivitas kayu pada PBPH antara lain melalui Silvikultur Intensif dan memberikan insentif kepada PBPH yang melakukan SILIN; (4) Memastikan realisasi tebangan sesuai Rencana Kinerja Tahunan melalui aplikasi SICAKAP.

(5) Mempercepat pelaksanaan multiusaha Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi. (6) Melakukan penagihan PNBP secara langsung/surat terhadap wajib bayar dengan menelaah data wajib bayar yang memiliki tunggakan dari yang terbesar hingga terkecil sesuai dengan PP 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (7) Memberikan sanksi penghentian pelayanan SIPUHH untuk melakukan penatausahaan hasil hutan bagi wajib bayar pemilik tunggakan PNBP. (8) Melakukan konsolidasi untuk menagih tunggakan wajib bayar melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk penagihan lebih lanjut. (9) Dengan adanya aplikasi SIPNBP memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan pembayaran secara online.



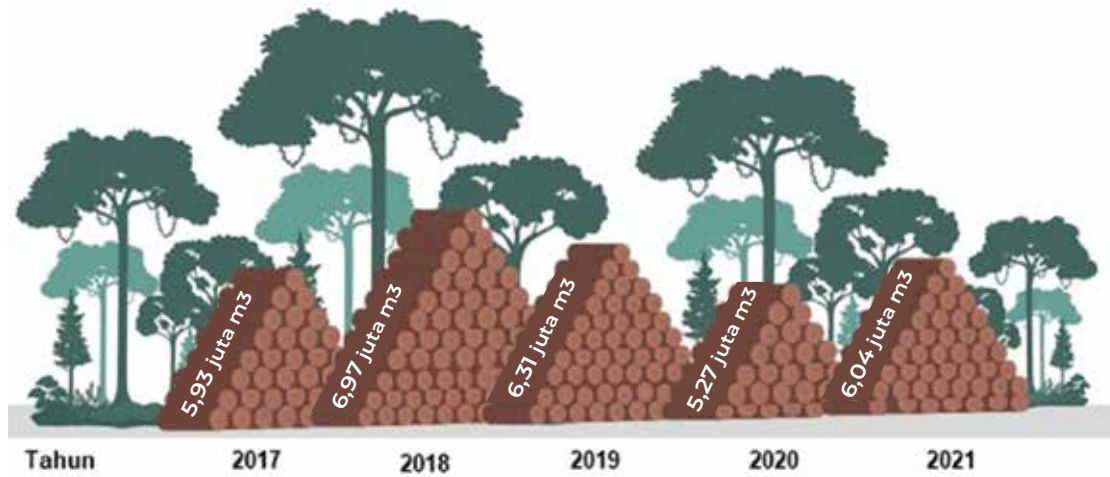
Gambar 3. Perkembangan Ekspor Produk Industri Kehutanan Tahun 2017 – 2021

Target ekspor produk industri kehutanan tahun 2021 sebesar USD 9,5 Miliar, dengan realisasi sebesar USD 13,025 Miliar (137,11%). Penyebab kenaikan Ekspor Produk Industri Kehutanan Tahun 2021 salah satunya disebabkan adanya adaptasi terhadap pandemi covid-19 dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga mempengaruhi kenaikan permintaan pasar produk kayu olahan (furniture, panel dan chipwood) dari Indonesia dan adanya perbaikan harga pada kayu bulat di hulu. Nilai ekspor tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Secara umum, kinerja ekspor pada tahun 2021 tersebut tercapai di atas target US\$9,5 miliar dengan realisasi sebesar US\$13,02 miliar sedangkan pada tahun 2020 sebesar US\$11,07 miliar (naik 8,09%).

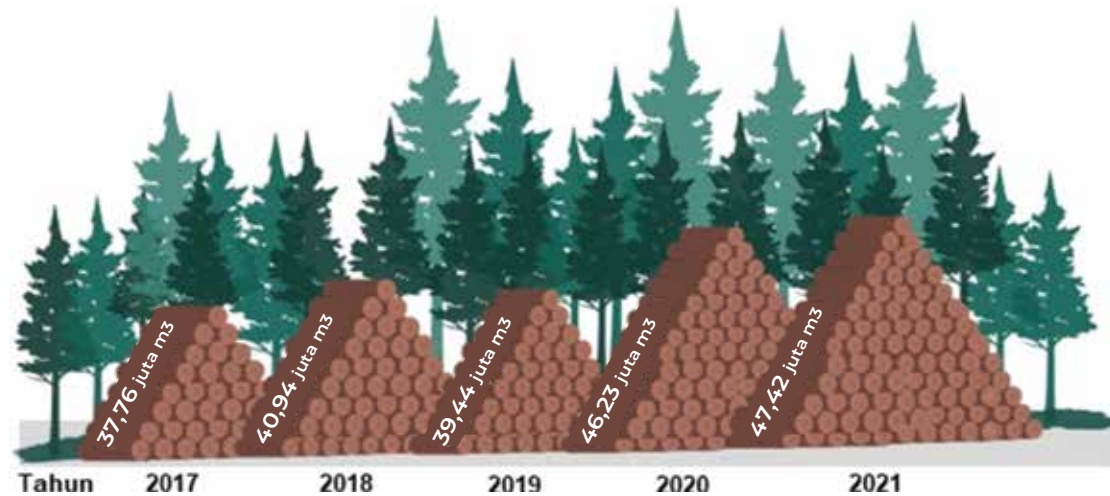
Realisasi ekspor produk industri kehutanan tahun 2021 merupakan ekspor tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Pengelolaan hutan produksi terutama produksi kayu bulat PBPH pemanfaatan hasil hutan kayu pada tahun 2021, produksi kayu bulat Hutan Alam pada tahun 2021 mencapai 6,05 Juta m³ dan Hutan Tanaman pada tahun 2021 mencapai 47,42 Juta m³. Penyebab meningkatnya Produksi kayu bulat Hutan Tanaman pada Tahun 2021 salah satunya disebabkan banyaknya permintaan (furniture, panel dan chipwood) dari Hutan Tanaman dan koreksi harga kayu bulat dalam negeri. Lain halnya dengan produksi kayu bulat Hutan Tanaman mengalami peningkatan ini disebabkan oleh naiknya permintaan pasar terhadap bahan baku berupa pulp dan kertas yang tidak lain merupakan bahan baku utama dalam pembuatan tisu, masker dan sejenisnya.

Direktorat Jenderal PHL terus mendorong peningkatan kinerja produksi kayu bulat PBPH Hutan Tanaman tahun 2021 di masa pandemi dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu Monitoring produksi, Webinar Nasional dan Meeting secara daring bersama- sama dengan PBPH dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Beberapa strategi Direktorat Jenderal PHL untuk meningkatkan produktifitas hutan alam dan pengelolaan hutan lestari secara keseluruhan yaitu:

1. Implementasi UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi momentum bagi pemegang perizinan berusaha untuk meningkatkan kinerja Kelola usahanya dengan memberikan peluang kerja sama investasi dalam pemanfaatan hutan bersama stakeholders.
2. Menjamin pemenuhan bahan baku dari perizinan berusaha yang melaksanakan multiusaha untuk mendukung daya saing industri pengolahan kayu dan industri lainnya (industri berbasis serat : pulp paper dan rayon, industri panel kayu, industri lanjutan serta industri bioenergi, pangan, pakan, dan obat-obatan).
3. Membangun kluster usaha kehutanan terintegrasi hulu, hilir dan pasar, baik di kawasan ekonomi khusus maupun kawasan ekonomi potensial lainnya untuk peningkatan efisiensi dan daya saing produk.
4. Memberikan fasilitasi dan dukungan permodalan bagi perizinan berusaha melalui pola pengelolaan keuangan.
5. Menjamin keberlangsungan usaha dengan pemberian jangka waktu perizinan berusaha yang panjang, pemberian insentif pengenaan DR hanya untuk kayu hutan alam (tumbuh alami), bukan lagi berdasarkan izin. Menerapkan sistem silvikultur dalam pengelolaan hutan sesuai kondisi tapak (multi sistem silvikultur, Teknik SILIN).
6. Memberikan fasilitasi pemegang perizinan berusaha untuk membangun industri pengolahan hasil hutan di areal kerjanya.
7. Mengembangkan konfigurasi baru bisnis kehutanan dengan mengedepankan peran masyarakat dan UKM (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial-KUPS).



Gambar 4. Perkembangan Produksi Kayu Bulat PBPH Hutan Alam Tahun 2017 – 2021



Gambar 5. Perkembangan Produksi Kayu Bulat PBPH Hutan Tanaman Industri Tahun 2017 – 2021

KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PERKONOMIAN NASIONAL DI MASA PANDEMI

Sektor bisnis dan ekonomi mengalami pukulan berat sejak Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia dan tekanan dirasakan pada sektor kehutanan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Triwulan 4-2021 tumbuh sebesar 5,02% (y-on-y), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Triwulan 3-2021 yang tumbuh sebesar 3,51% (y-on-y). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Laju pertumbuhan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (y-on-y) sebesar 2.28% dan pada subsektor kehutanan dan penebangan kayu sebesar 4.78%.

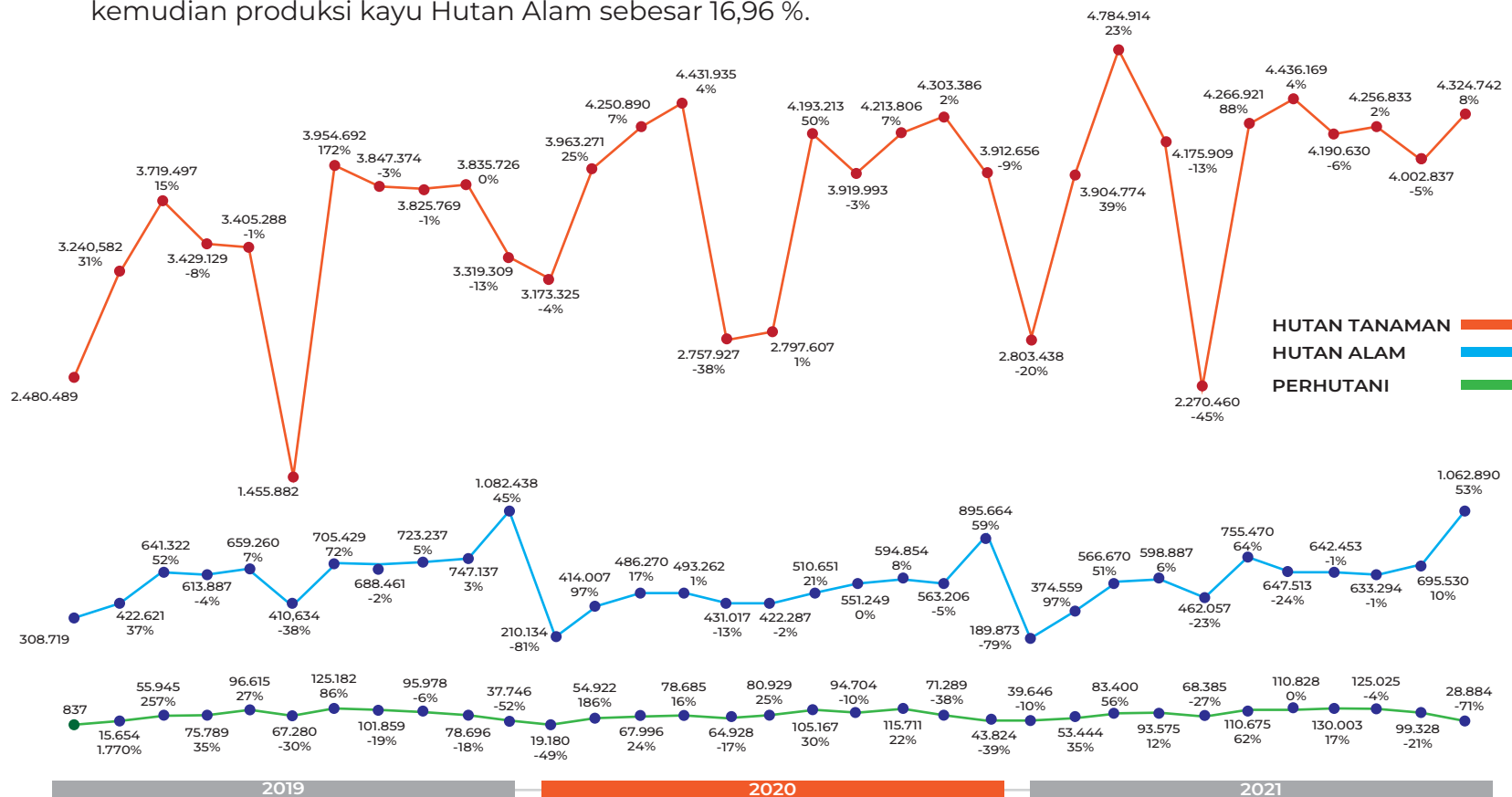
Lapangan Usaha	(y-on-y)			(q-to-q)			(c-to-c)		
	Q4/21	Q3/21	Q4/20	Q4/21	Q3/21	Q4/20	Q4/21	Q3/21	Q4/20
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.28	1.43	2.63	-19.46	1.92	-20.13	1.84	1.72	1.77
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0.14	0.67	3.71	-26.18	2.85	-25.79	1.08	1.33	2.13
a Tanaman Pangan	-2.04	-5.66	10.73	-37.77	-10.71	-40.06	-1.56	-1.46	3.61
b Tanaman Hortikultura	3.8	-5.22	7.85	-11.5	-2.6	-19.18	0.56	0.4	4.17
c Tanaman Perkebunan	2.28	8.33	1.14	-29.44	19.83	-25.26	3.52	3.88	1.34
d Peternakan	-5.24	-2.47	-1.88	-9.58	-6.63	-6.93	0.34	2.1	-0.35
e Jasa Pertanian dan Perburuan	0.3	0.99	3.2	-21.1	4.06	-20.09	1.32	1.78	1.62
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	4.78	3.31	-5.42	-7.9	6.73	-9.2	0.06	-1.42	-0.03
3 Perikanan	8.99	4.55	1.06	8.44	-3.25	4.03	5.45	4.23	0.73



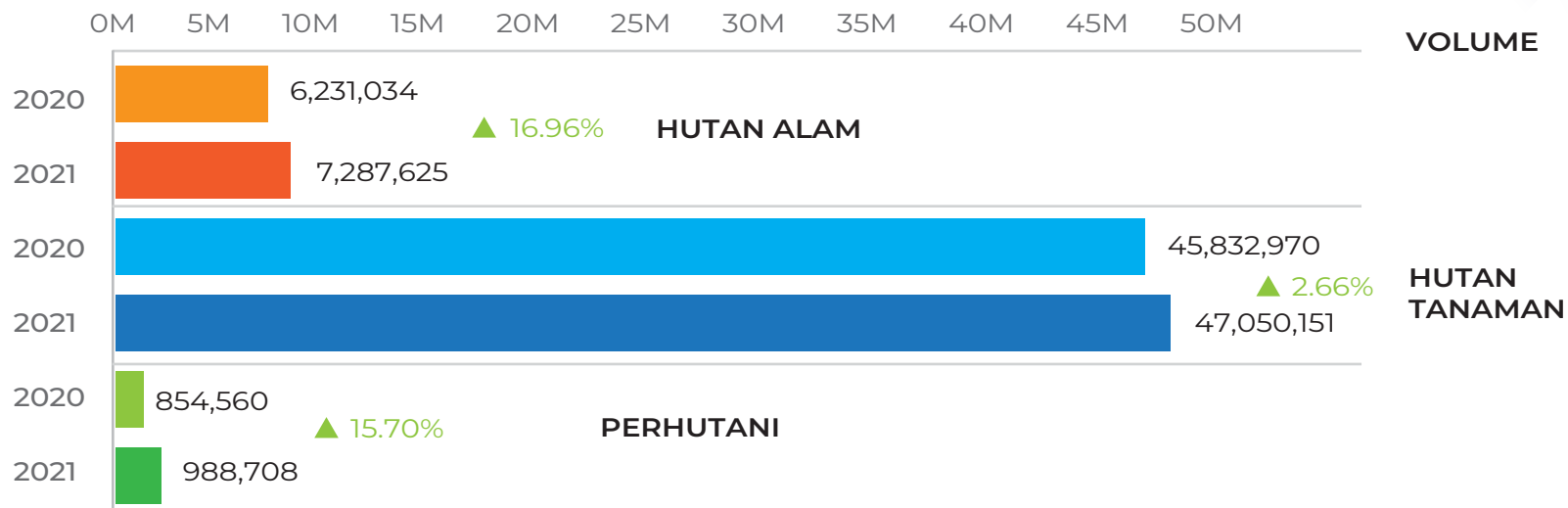
Gambar 6. Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (y-on-y)

Sektor kehutanan, produksi kayu bulat, produksi kayu olahan, produksi HHBK mengalami peningkatan dan diiringi dengan peningkatan nilai ekspor produk kehutanan.

- Pada Q4 2021, meningkat sebesar 55,3 juta m³ atau 4,55%, Pertumbuhan kayu yang cukup signifikan berasal dari Produksi kayu Perhutani sebesar 15,70%, produksi kayu Hutan Tanaman sebesar 2,66 %
- kemudian produksi kayu Hutan Alam sebesar 16,96 %.



Gambar 7. Laju Pertumbuhan Produksi Kayu Per-Bulan Tahun 2019-2021

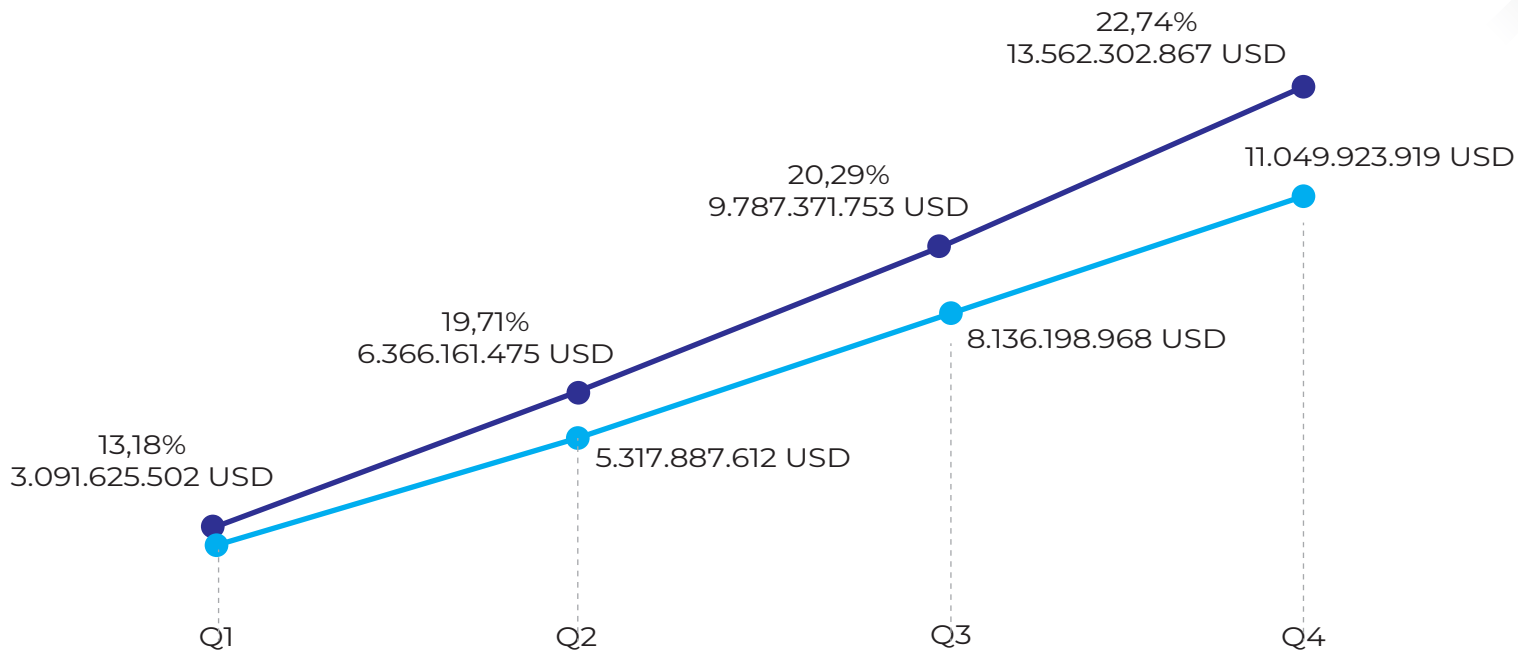


Gambar 8. Laju Pertumbuhan Produksi Kayu Hutan Alam, Hutan Tanaman, dan Perhutani Per-Tahun 2020-2021

Nilai ekspor produk kehutanan pada Q4 2021 tumbuh 22,74% dibandingkan Q4 2020, 13,56 milyar USD pada tahun 2021, dan 11,05 milyar USD pada tahun 2020, serta 240 ribu Dokumen Ekspor diterbitkan oleh KLHK atau setara 657 dokumen per hari (365 hari). Produksi HHBK pada Q4 2021 meningkat sebesar 684 ribu ton atau 30,86 % dibanding Q4 2020 sebesar 522 ribu ton.

Untuk percepatan peningkatan pertumbuhan sub sektor kehutanan, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan antara lain:

- Relaksasi kebijakan fiskal
- Percepatan implementasi UUCK dan turunannya
- Fasilitas pembiayaan Sertifikasi Legalitas Kayu untuk UMKM Industri Hasil Hutan dan Hutan Rakyat
- Promosi Perdagangan dan Kerjasama dengan mitra dagang
- Pelayanan berbasis digital kepada pelaku usaha



Gambar 9. Laju Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Kehutanan Tahun 2020-2021

Nilai ekspor produk kehutanan pada Q4 2021 tumbuh 22,74% dibandingkan Q4 2020, 13,56 milyar USD pada tahun 2021, dan 11,05 milyar USD pada tahun 2020, serta 240 ribu Dokumen Ekspor diterbitkan oleh KLHK atau setara 657 dokumen per hari (365 hari). Produksi HHBK pada Q4 2021 meningkat sebesar 684 ribu ton atau 30,86 % dibanding Q4 2020 sebesar 522 ribu ton.

Untuk percepatan peningkatan pertumbuhan sub sektor kehutanan, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan antara lain: Relaksasi kebijakan fiskal, Percepatan implementasi UUCK dan turunannya, Fasilitas pembiayaan Sertifikasi Legalitas Kayu untuk UMKM Industri Hasil Hutan dan Hutan Rakyat, Promosi Perdagangan dan Kerjasama dengan mitra dagang, Pelayanan berbasis digital kepada pelaku usaha.

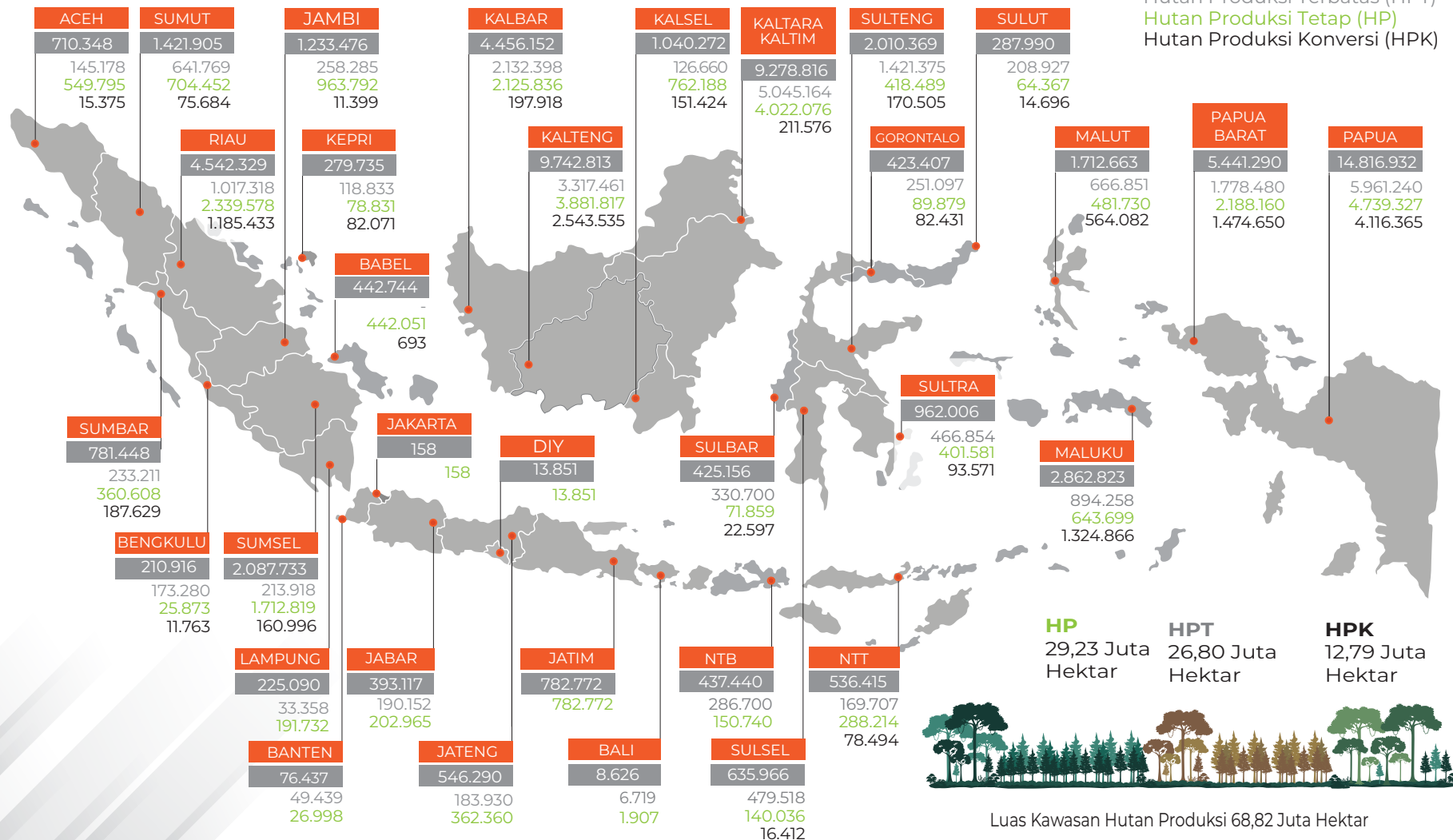
Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) tahun 2021 masih didominasi oleh HHBK dari kelompok getah dengan produksi mencapai 134.402 ton. Jenis getah yang diproduksi umumnya adalah getah pinus dan getah karet. Jenis batang didominasi oleh bambu dan rotan, jenis resin didominasi oleh kemedangan, damar kopal, dan kemenyan. Selain itu masih terdapat kelompok HHBK lainnya seperti biji-bijian, umbi, buah-buahan, dan kelompok lainnya.



Gambar 10. Perkembangan Produksi Kayu Bulat PBPH Hutan Tanaman Industri Tahun 2017 – 2021 (Ton)

LUAS KAWASAN HUTAN PRODUKSI

BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



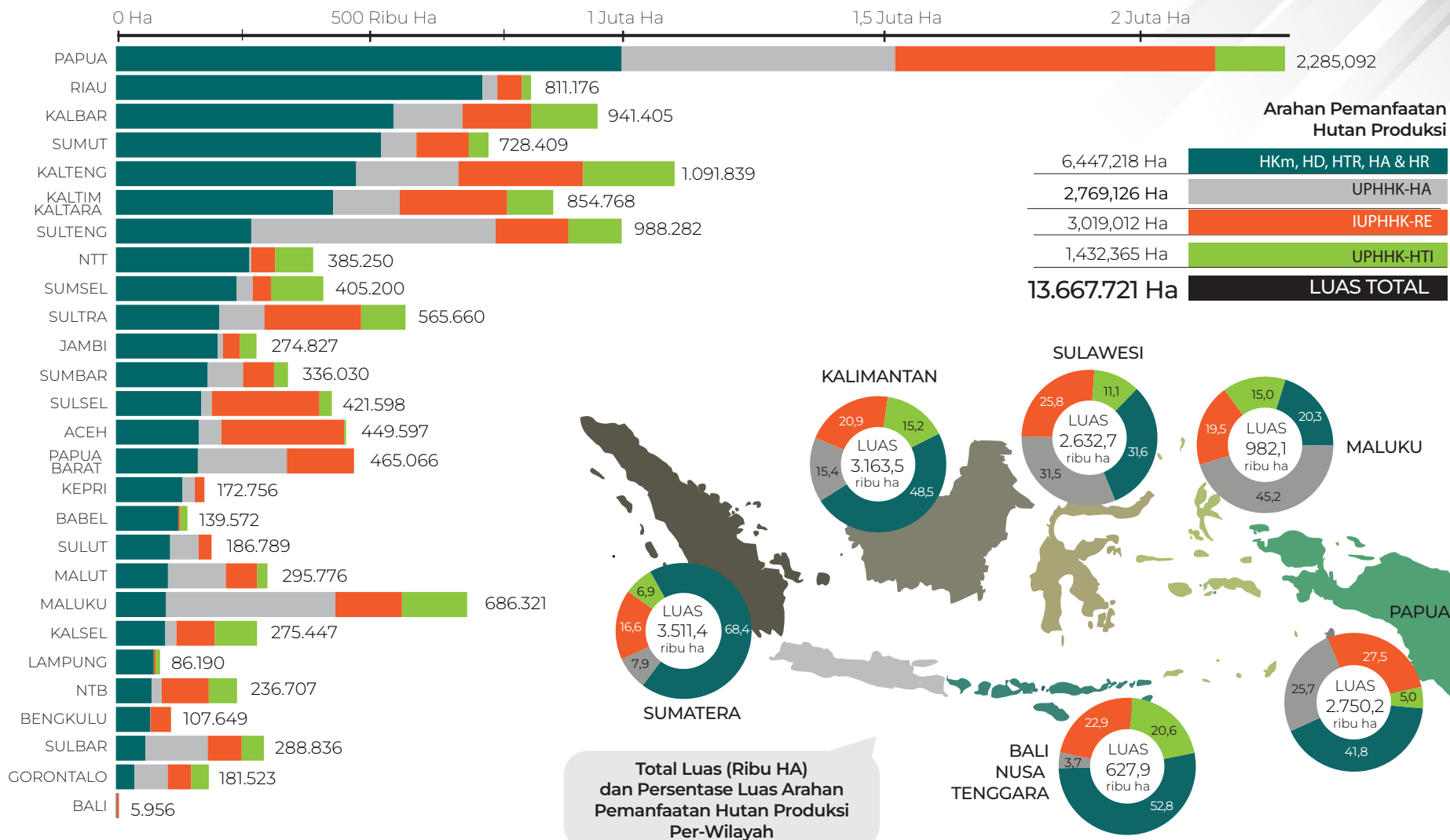
LUAS KAWASAN HUTAN LINDUNG

BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

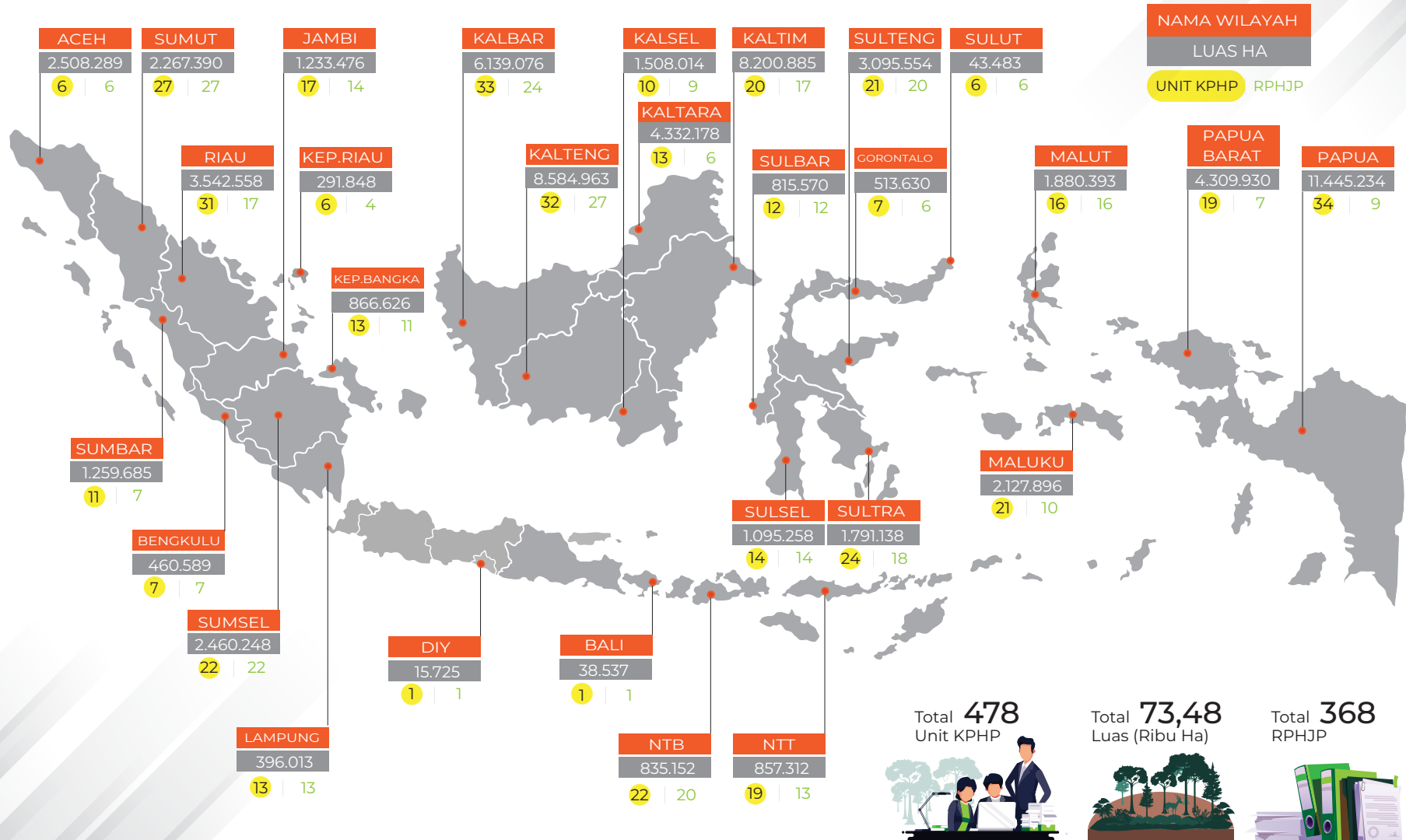


LUAS ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI TAHUN 2021

BERDASARKAN SK.7875/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2020)



PENETAPAN WILAYAH KPHP PER PROVINSI SAMPAI DENGAN 2021

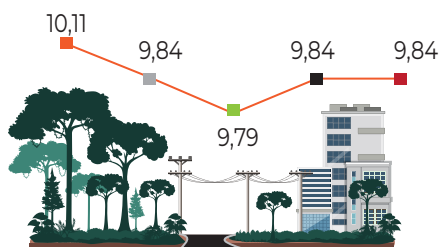


INVESTASI PBPH KEGIATAN HUTAN ALAM DAN HUTAN TANAMAN

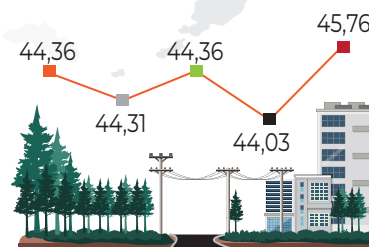
PER WILAYAH TAHUN 2021



2017
2018
2019
2020
2021



Perkembangan Investasi Kegiatan Hutan Alam Tahun 2017-2021 (Miliar USD)



Perkembangan Investasi Kegiatan Hutan Tanaman Tahun 2017-2021 (Triliun Rupiah)

PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN ALAM

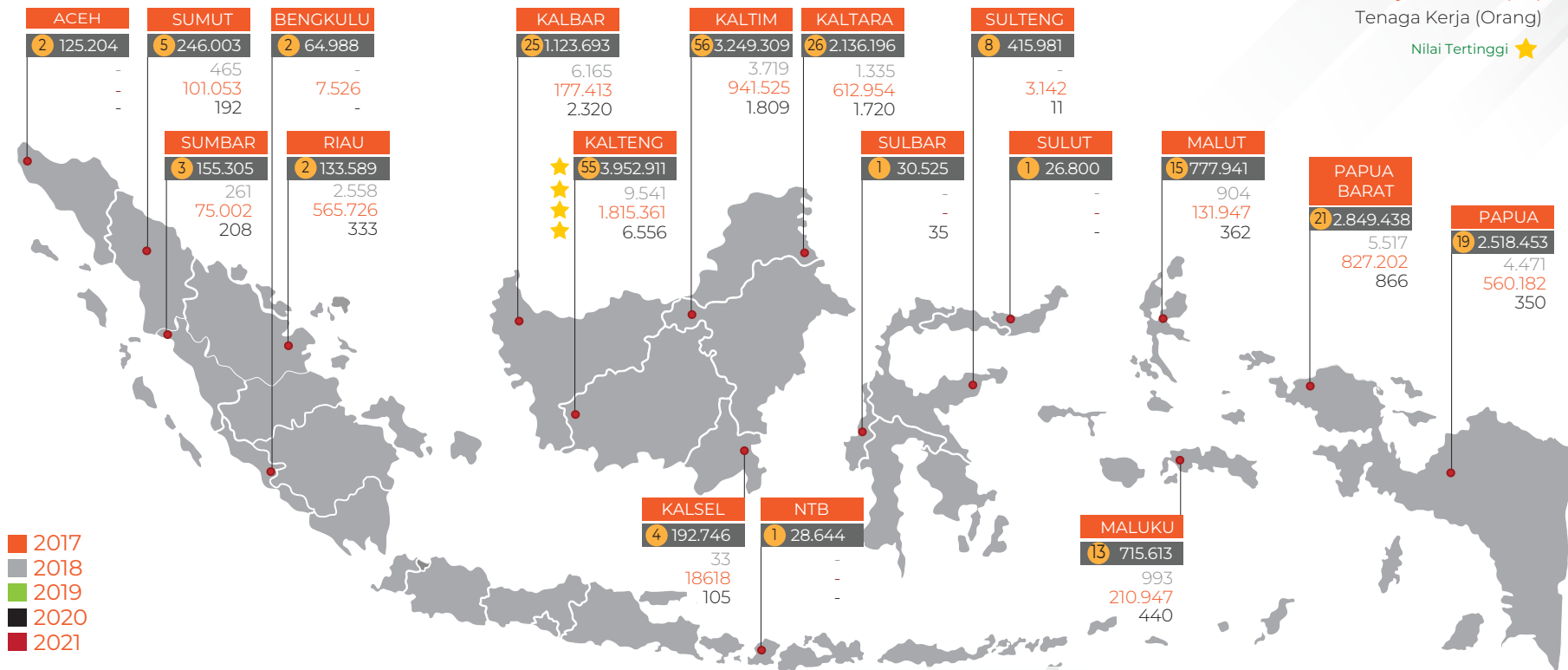
Provinsi	
UM (Unit)	Luas HA (Ha)

Luas Penanaman (Ha)

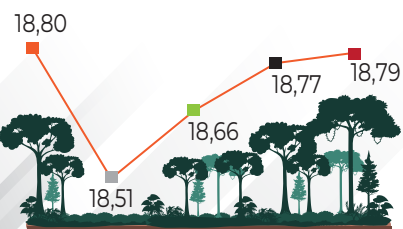
Produksi Kayu Bulat HA (M³)

Tenaga Kerja (Orang)

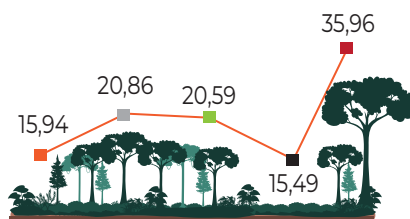
Nilai Tertinggi ★



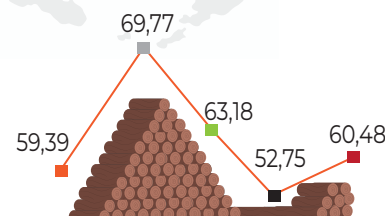
2017
2018
2019
2020
2021



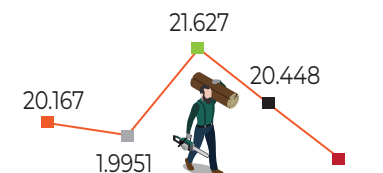
Perkembangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PBPH-HA (Juta Ha)



Perkembangan Luas Penanaman PBPH-HA (Ribu Ha)



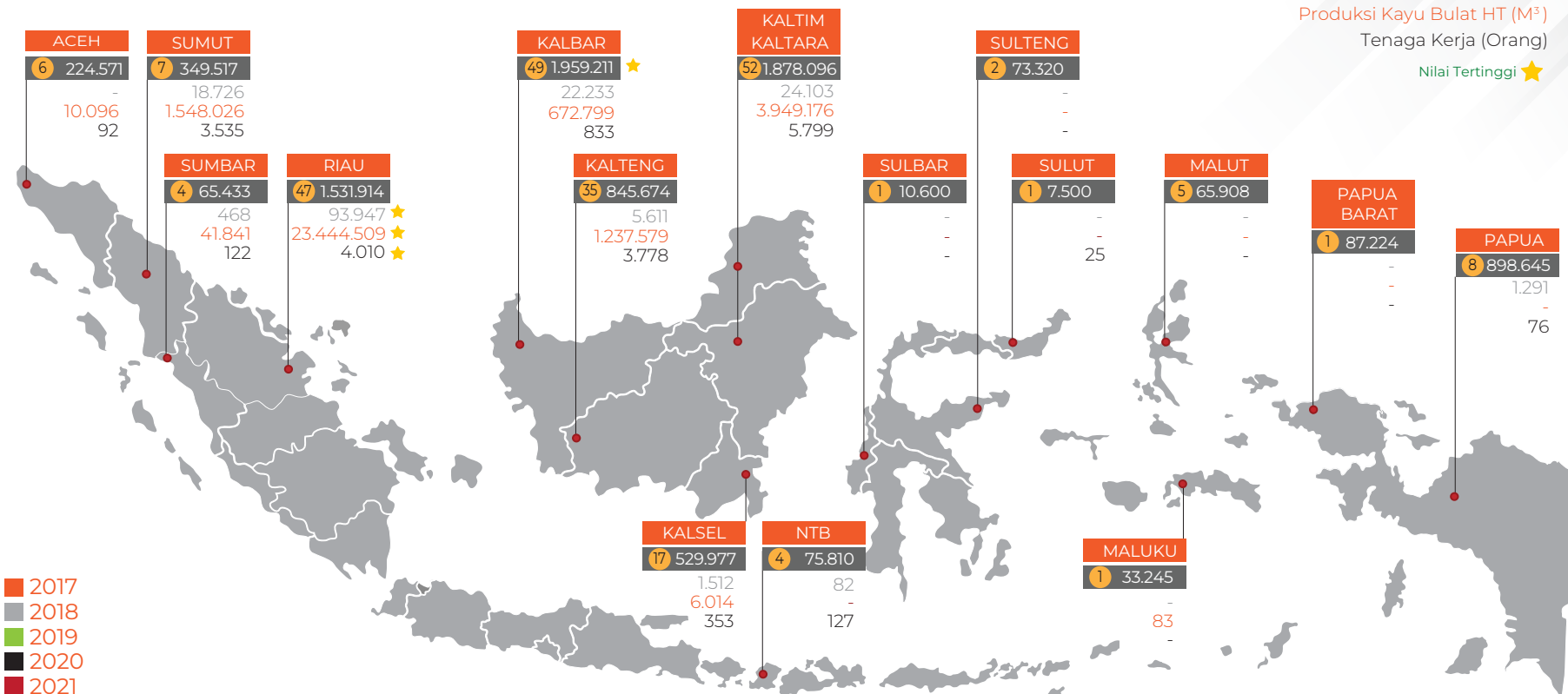
Perkembangan Produksi Kayu PBPH-HA (Juta M³)



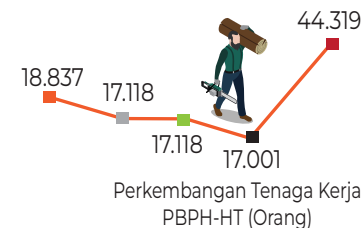
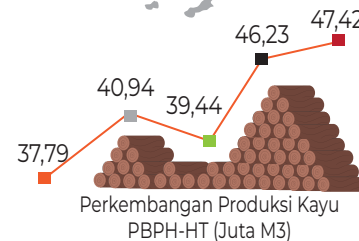
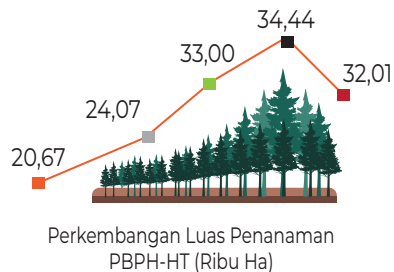
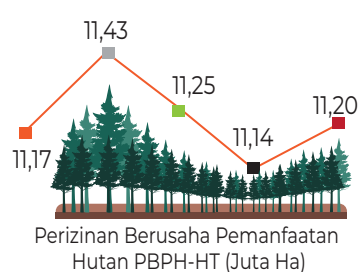
Perkembangan Tenaga Kerja PBPH-HA (Orang)

PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN TANAMAN

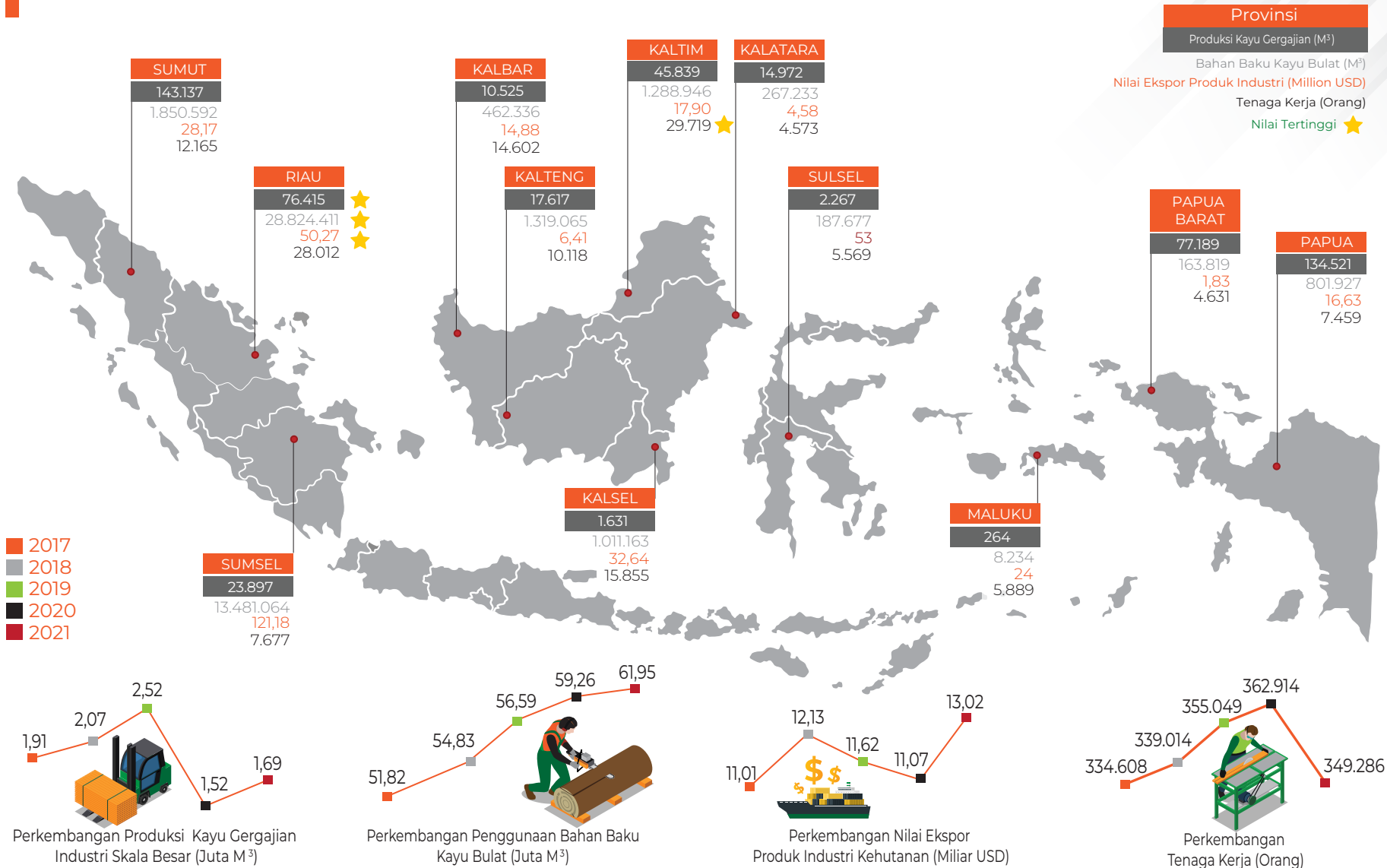
Provinsi	
UM (Unit)	Luas HT (Ha)
Luas Penanaman (Ha)	
Produksi Kayu Bulat HT (M³)	
Tenaga Kerja (Orang)	
Nilai Tertinggi ★	



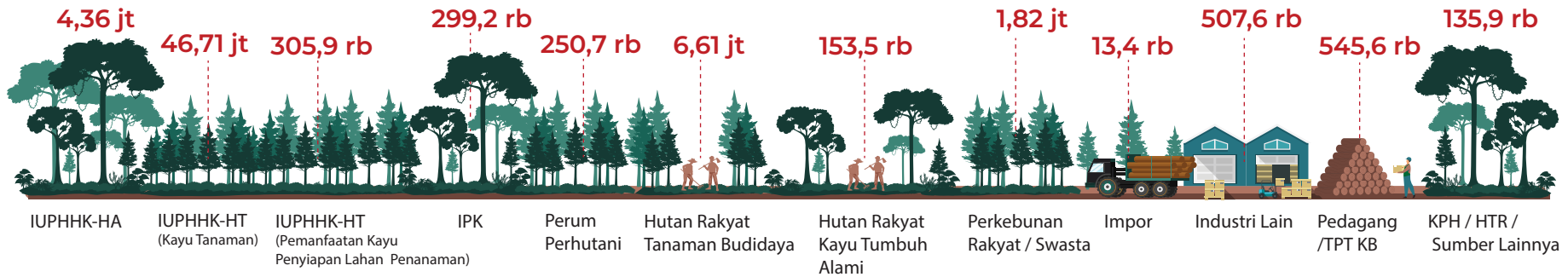
■ 2017
■ 2018
■ 2019
■ 2020
■ 2021



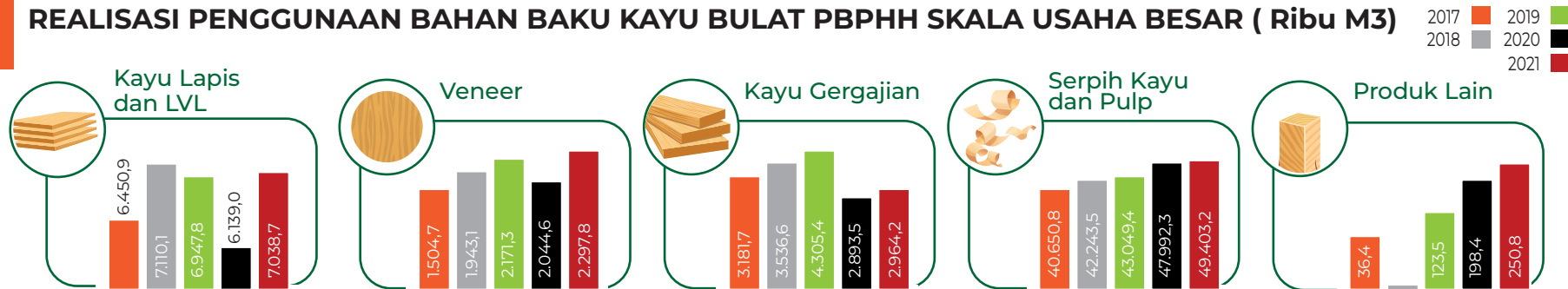
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN TAHUN 2021



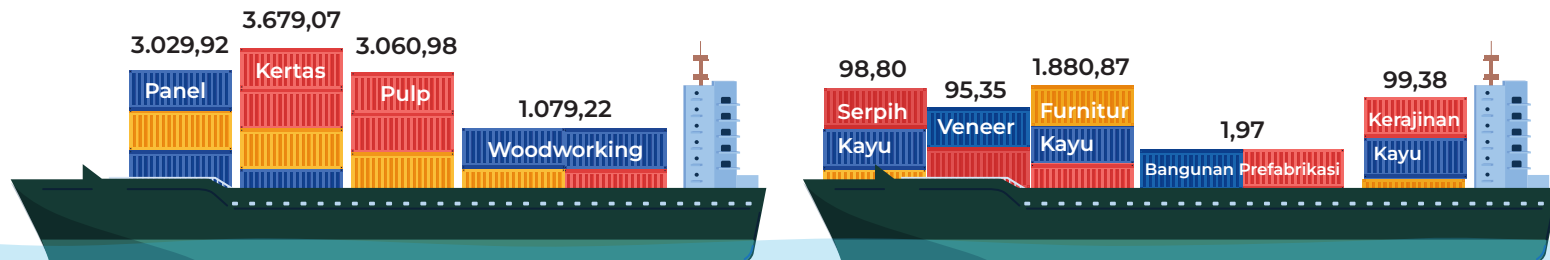
PERKEMBANGAN PASOKAN KAYU BULAT UNTUK BAHAN BAKU INDUSTRI PER SUMBER BAHAN BAKU TAHUN 2021 (M3)



REALISASI PENGGUNAAN BAHAN BAKU KAYU BULAT PBPBH SKALA USAHA BESAR (Ribu M3)

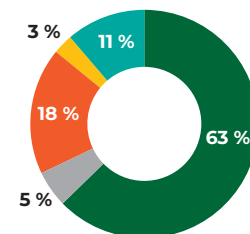
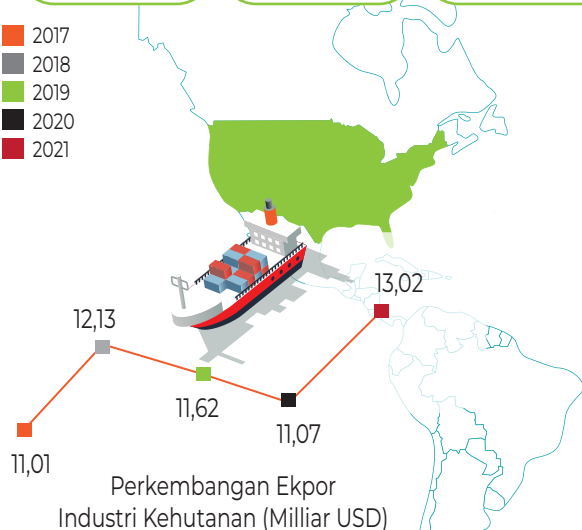
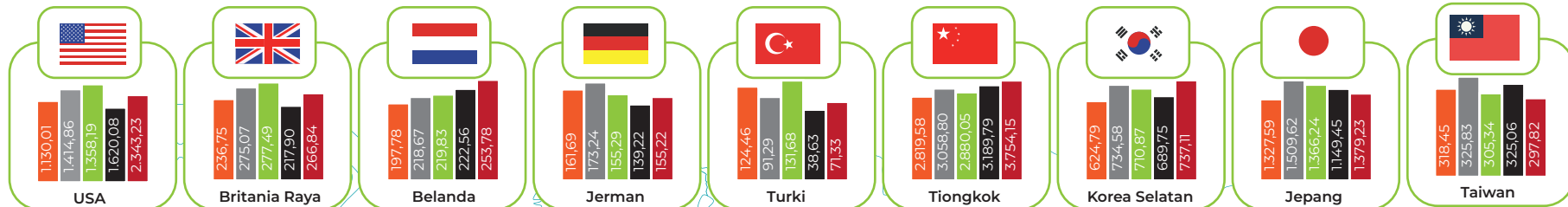
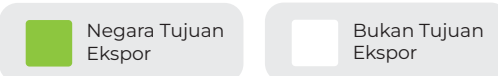


PERKEMBANGAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN PER JENIS PRODUK TAHUN 2021 (Million USD)

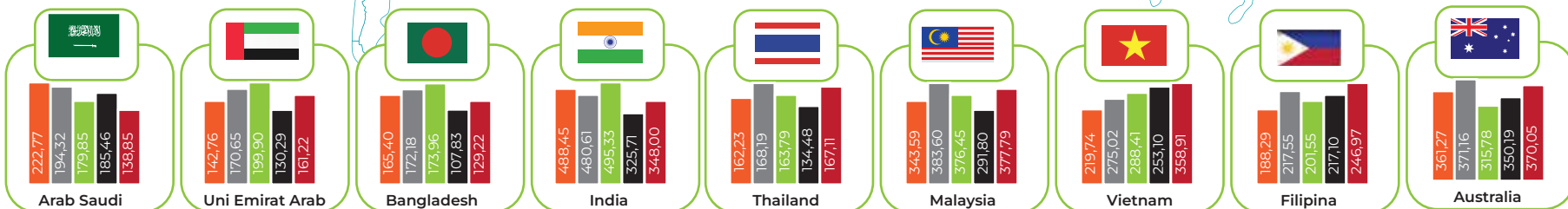


EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PER-NEGARA TUJUAN TAHUN 2017-2021 (Juta USD)

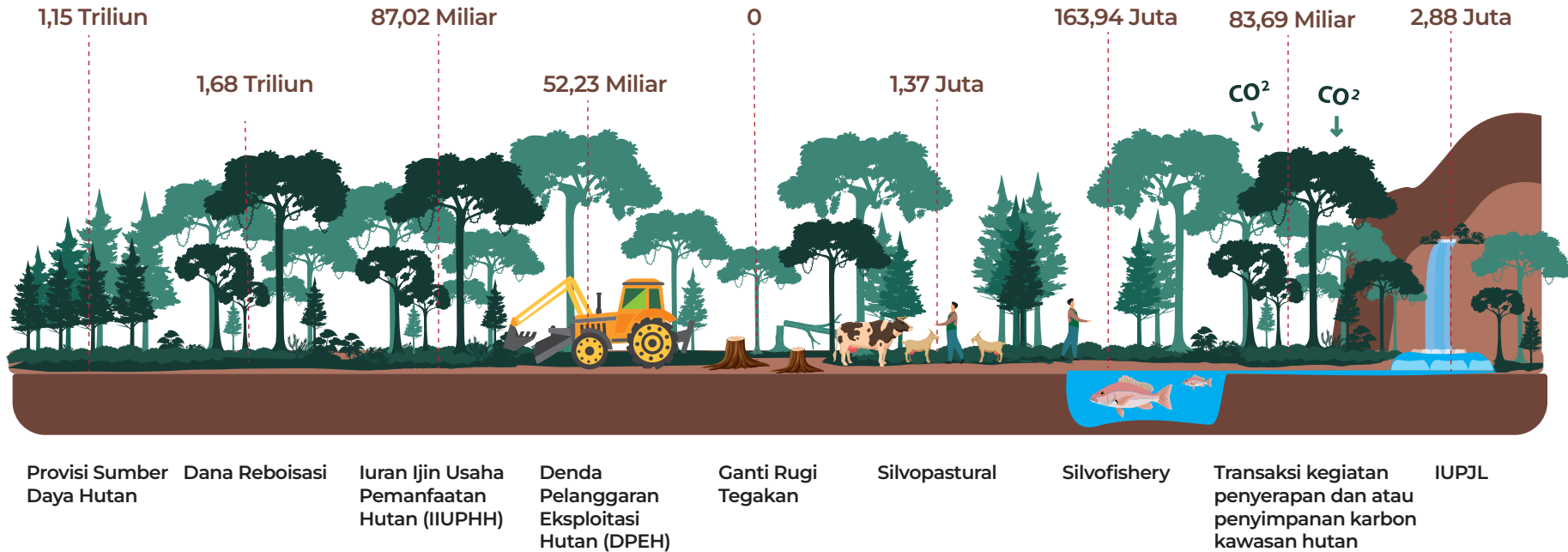
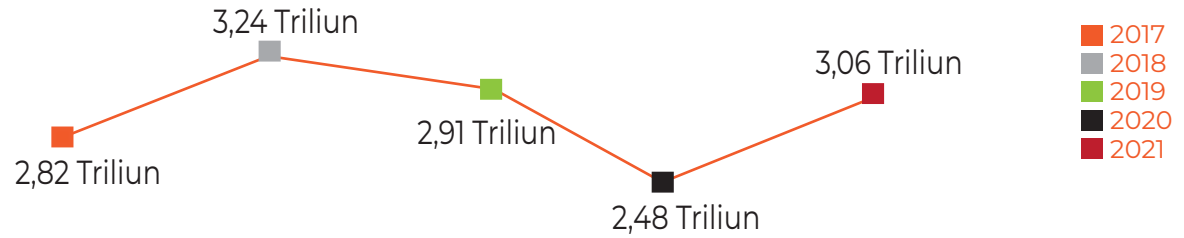


Persentase Ekspor Produk Industri Kehutanan Per-Benua



PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2021 (Rupiah)

Perkembangan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun 2017-2021 (Rupiah)





LAMPIRAN

TABEL 1.1. LUAS KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Provinsi	SK	Tanggal	HL	HPT	HP	HPK	LUAS TOTAL (HPT+HP+HPK)
1	Nangroe Aceh Darussalam	580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018	17 Desember 2018	1,781,677.92	145,178.34	549,794.88	15,374.70	710,347.92
2	Sumatera Utara	579/Menhut-II/2014	24 Juni 2014	1,206,881.00	641,769.00	704,452.00	75,684.00	1,421,905.00
3	Sumatera Barat	35/Menhut-II/2013	15 Januari 2013	791,671.00	233,211.00	360,608.00	187,629.00	781,448.00
4	Riau	903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016	07 Desember 2016	233,910.00	1,017,318.00	2,339,578.00	1,185,433.00	4,542,329.00
5	Jambi	863/Menhut-II/2014	29-Sep-14	179,588.00	258,285.00	963,792.00	11,399.00	1,233,476.00
6	Sumatera Selatan	454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 & 190/MenLHK/Setjen/PLA.0/4/2018	17 Juni 2016 & 20 April 2018	578,279.00	213,918.00	1,712,819.00	160,996.00	2,087,733.00
7	Bengkulu	784/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	250,750.00	173,280.00	25,873.00	11,763.00	210,916.00
8	Lampung	256/Kpts-II/2000	23 Agustus 2000	317,615.00	33,358.00	191,732.00	-	225,090.00
9	Kep. Bangka Belitung	798/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	166,371.00	-	442,051.00	693.00	442,744.00
10	Kepulauan Riau	76/MenLHK-II/2015 & 272/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2018	6 Maret 2015 & 6 Juni 2018	97,362.65	118,832.99	78,830.62	82,071.11	279,734.72
11	DKI Jakarta	220/Kpts-II/2000	02 Agustus 2000	44.76	-	158.35	-	158.35
12	Jawa Barat	195/Kpts-II/2003	04 Juli 2003	291,306.00	190,152.00	202,965.00	-	393,117.00
13	Jawa Tengah	359/Menhut-II/2004	01 Oktober 2004	84,430.00	183,930.00	362,360.00	-	546,290.00
14	D.I Yogyakarta	171/Kpts-II/2000	29 Juni 2000	2,057.90	-	13,851.28	-	13,851.28
15	Jawa Timur	395/Menhut-II/2011	21 Juli 2011	344,742.00	-	782,772.00	-	782,772.00
16	Banten	419/Kpts-II/1999	15 Juni 1999	12,359.00	49,439.00	26,998.00	-	76,437.00
17	B a l i	433/Kpts-II/1999	15 Juni 1999	95,766.06	6,719.26	1,907.10	-	8,626.36
18	N T B	598/Menhut-II/2009 jo. 270/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017	02 Oktober 2009 jo 05 Juni 2017	430,485.00	286,700.00	150,740.00	-	437,440.00
19	N T T	357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016	11 Mei 2016	684,572.00	169,707.00	288,214.00	78,494.00	536,415.00
20	Kalimantan Barat	733/Menhut-II/2014	2-Sep-14	2,310,874.00	2,132,398.00	2,125,836.00	197,918.00	4,456,152.00
21	Kalimantan Tengah	529/Menhut-II/2012	25-Sep-12	1,346,066.00	3,317,461.00	3,881,817.00	2,543,535.00	9,742,813.00
22	Kalimantan Selatan	435/Menhut-II/2009	23 Juli 2009	526,425.00	126,660.00	762,188.00	151,424.00	1,040,272.00
23	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	718/Menhut-II/2014 & 278/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017 & 254/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2018 SK.136/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2019	29 Agustus 2014 & 9 Juni 2017 & 30 Mei 2018, 13 Februari 2019	2,848,243.00	5,045,164.45	4,022,075.55	211,575.88	9,278,815.88
24	Sulawesi Utara	734/Menhut-II/2014	2-Sep-14	161,784.00	208,927.00	64,367.00	14,696.00	287,990.00
25	Sulawesi Tengah	869/Menhut-II/2014	29-Sep-14	1,258,081.00	1,421,375.00	418,489.00	170,505.00	2,010,369.00
26	Sulawesi Selatan	362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019	28 Mei 2019	1,162,498.00	479,518.00	140,036.00	16,412.00	635,966.00
27	Sulawesi Tenggara	465/Menhut-II/2011	09 Agustus 2011	1,081,489.00	466,854.00	401,581.00	93,571.00	962,006.00
28	Gorontalo	325/Menhut-II/2010	25 Mei 2010	204,608.00	251,097.00	89,879.00	82,431.00	423,407.00
29	Sulawesi Barat	862/Menhut-II/2014	29-Sep-14	452,030.00	330,700.00	71,859.00	22,597.00	425,156.00
30	Maluku	854/Menhut-II/2014	29-Sep-14	627,256.00	894,258.00	643,699.00	1,324,866.00	2,862,823.00
31	Maluku Utara	302/Menhut-II/2013	01 Mei 2013	584,058.00	666,851.00	481,730.00	564,082.00	1,712,663.00
32	Papua Barat	783/Menhut-II/2014	22-Sep-14	1,631,589.00	1,778,480.00	2,188,160.00	1,474,650.00	5,441,290.00
33	Papua	782/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	7,815,283.00	5,961,240.00	4,739,327.00	4,116,365.00	14,816,932.00
JUMLAH				29,560,152	26,802,781	29,230,539.78	12,794,164.69	68,827,485.51

TABEL 1.2

LUAS ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI TAHUN 2021 (Berdasarkan SK.7875/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2020)

No	PROVINSI	ALOKASI PEMANFAATAN MELALUI HKm, HD, HTR, HA & HR	ALOKASI PEMANFAATAN MELALUI UPHHK (HA)				JUMLAH (3+7) (Hektar)
			UPHHK-HA	IUPHHK-RE	UPHHK-HTI	JUMLAH ALOKASI UNTUK UPHHK (4+5+6) (Hektar)	
		(Hektar)	(Hektar)	(Hektar)	(Hektar)	(Hektar)	(Hektar)
1	Aceh	161,627	44,452	239,860	3,658	287,970	449,597
2	Sumatera Utara	518,365	69,060	101,994	38,990	210,044	728,409
3	Sumatera Barat	179,319	69,020	60,707	26,984	156,711	336,030
4	Riau	716,328	28,782	48,240	17,826	94,848	811,176
5	Jambi	198,836	10,200	32,671	33,120	75,991	274,827
6	Sumatera Selatan	236,143	31,115	35,513	102,429	169,057	405,200
7	Bengkulu	67,548	363	39,635	103	40,101	107,649
8	Lampung	73,514	-	4,122	8,554	12,676	86,190
9	Kep. Bangka Belitung	121,962	169	3,809	13,632	17,610	139,572
10	Kep. Riau	129,434	24,824	18,498	-	43,322	172,756
Wilayah Sumatera		2,403,076	277,985	585,049	245,296	1,108,330	3,511,406
11	Bali	1,195	-	4,761	-	4,761	5,956
12	Nusa Tenggara Barat	69,551	19,707	91,997	55,452	167,156	236,707
13	Nusa Tenggara Timur	260,577	3,669	47,000	74,004	124,673	385,250
Wilayah Nusa Tenggara		331,323	23,376	143,758	129,456	296,590	627,913
14	Kalimantan Barat	542,463	135,011	133,696	130,235	398,942	941,405
15	Kalimantan Tengah	469,739	199,619	243,414	179,067	622,100	1,091,839
16	Kalimantan Selatan	96,006	22,436	74,509	82,496	179,441	275,447
17	Kalimantan Timur & Utara	424,447	130,006	209,999	90,316	430,321	854,768
Wilayah Kalimantan		1,532,655	487,072	661,618	482,114	1,630,804	3,163,459
18	Sulawesi Utara	106,047	55,432	25,310	-	80,742	186,789
19	Sulawesi Tengah	264,419	477,770	142,493	103,600	723,863	988,282
20	Sulawesi Selatan	166,453	20,960	210,295	23,890	255,145	421,598
21	Sulawesi Tenggara	201,719	88,148	189,353	86,440	363,941	565,660
22	Gorontalo	35,674	65,216	46,176	34,457	145,849	181,523
23	Sulawesi Barat	57,610	121,509	66,539	43,178	231,226	288,836
Wilayah Sulawesi		831,922	829,035	680,166	291,565	1,800,766	2,632,688
24	Maluku	98,091	330,794	129,906	127,530	588,230	686,321
25	Maluku Utara	101,617	112,708	62,025	19,426	194,159	295,776
Wilayah Maluku		199,708	443,502	191,931	146,956	782,389	982,097
26	Papua Barat	159,913	174,069	131,084	-	305,153	465,066
27	Papua	988,621	534,087	625,406	136,978	1,296,471	2,285,092
Wilayah Papua		1,148,534	708,156	756,490	136,978	1,601,624	2,750,158
Total		6,447,218	2,769,126	3,019,012	1,432,365	7,220,503	13,667,721

* Luas hasil perhitungan secara digital

Catatan : HP dalam PIPPIB Tahun 2020 Periode II seluas 9.796.640 ha

TABEL 1.3
PENETAPAN WILAYAH KPH

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	D A S A R H U K U M	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
Aceh	1 Aceh besar	UPTD KPH Wilayah I	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	568,250	SK.7341/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/10/2018	18 Oktober 2018			
	2 Bener meriah	UPTD KPH Wilayah II Aceh	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	253,948	SK.6943/MENLHK-KPHL/PKPHL/SET.1/12/2017	27 Desember 2017			
	3 Langsa	UPTD KPH Wilayah III Aceh	SK. 993/Menhut-II/2013	682,391	SK.6062/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/10/2016	31 Oktober 2016			
	4 Meulaboh	UPTD KPH Wilayah IV	SK.932/Menhut-II/2014	402,986	SK.6068/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/6/2019	28 Juni 2019			
	5 Gayo lues	UPTD KPH Wilayah V Aceh	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	290,162	SK.6069/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/6/2019	28 Juni 2019			
	6 Subulussalam	UPTD KPH Wilayah VI Aceh	SK.932/Menhut-II/2014	310,552	SK.10198/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019	16 Desember 2019			
Jumlah				2,508,289					
Sumatera Utara	7 Mandailing Natal	KPHP Unit XXIX Mandailing Natal	SK.332/Menhut-II/2010 tgl 25 Mei 2010	159,166	SK.199/Menhut-II/Reg.1/2014	29 Januari 2014			
	8 Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat	KPHP Unit XVII (Provinsi)	SK.637/ MenLHK-Setjen/ 2015 tgl 14 Des 2015	86,555	SK.1242/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2018	26 Maret 2018			
	9 Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan	KPHP Unit XX (Provinsi)	SK.637/ MenLHK-Setjen/ 2015 tgl 14 Des 2015	88,931	SK.1230/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2018	23 Maret 2018			
	10 Tapanuli Selatan	KPHP Unit XXVII Tapanuli Selatan	SK.637/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	38,071	SK.788/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018	15 Februari 2018			
	11 Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal	KPHP Unit XXVIII (Provinsi)	SK.637/ MenLHK-Setjen/ 2015 tgl 14 Des 2015	127,758	SK.3185/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2018	18 Mei 2018			
	12 Padang Lawas dan Padang Lawas Utara	KPHP Unit XXXI (Provinsi)	SK.637/ MenLHK-Setjen/ 2015 tgl 14 Des 2015	270,460	SK.3194/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2019	4 April 2019			
	13 Langkat	KPHP Unit I	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	69,878	SK.6888/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2017	22 Desember 2017			
	14 Simalungun	KPHP Unit XII	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	56,223	SK.6101/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2017	10 November 2017			
	15 Pakpak Bharat	KPHP Unit XV	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	89,851	SK.289/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018	2 Februari 2018			
	16 Labuhan Batu Utara	KPHP Unit III	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017	28,145	SK.4961/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2019	21 Mei 2019			
	17 Labuhan Batu Selatan	KPHP Unit XI	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017	42,052	SK.5295/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2019	31 Mei 2019			
	18 Deli Serdang	KPHP Unit V	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	38,047	SK.1513/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018	9 April 2018			
	19 Simalungun	KPHP Unit VI	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	45,271	SK.1224/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2019	6 Februari 2019			
	20 Tapanuli Utara	KPHP Unit XXI	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	44,700	SK.4962/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2019	21 Mei 2019			
	21 Nias	KPHP Unit XXXIII Gunung Sitoli	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	109,804	SK.1206/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2021	29 Maret 2021			
	22 Kabanjahe	UPT Pengelolaan Hutan Wilayah XV Kabanjahe	SK.831/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	80,002	SK.5432/MENLHK/KPHL-PKPHL/DAS.3/10/2017	18 Oktober 2017	SK.4275/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2021	31 Mei 2021	
	23 Kisaran	UPT Pengelolaan Hutan Wilayah III Kisaran	SK.102/Menhut-II/2010	54,720	SK. 6423/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019	26 Juli 2019			
	24 Kabupaten Diari	UPT Pengelolaan Hutan Wilayah XIV Sidikalang	SK.102/Menhut-II/2010	87,247	SK.6226/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019	10 Juli 2019			
	25 Pematang Siantar	UPT Pengelolaan Hutan Wilayah II Pematang Siantar	SK.102/Menhut-II/2010	9,740	SK.2805/MENLHK-KPHL/DAS.3/5/2018	2 Mei 2018			
	26 Kabupaten Toba	UPT Pengelolaan Hutan Wilayah IV Balige	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	87,247	SK.6432/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2017	23 November 2017			

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
27	Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah	UPT Pengelolaan Hutan Wilayah XII Tarutung	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	72,166	SK.5948/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2019	12 November 2019			
28	Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Samosir dan Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat	UPT Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Dolok Sanggul	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	49,415	SK.5932/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018	14 September 2018			
29	Kabupaten Labuhanbatu Utara	UPT Pengelolaan Hutan Wilayah V Aek Kanopan	SK. 992/Menhut-II/2013	32,287	SK.1170/MENLHK-KPHL/PKPHL/SET.1/3/2018	16 Maret 2018	SK.6070/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/6/2019	28 Juni 2019	
30	Kabupaten Tapanuli Tengah	UPT Pengelolaan Hutan Wilayah XI Pandan	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	60,396	SK.6941/MENLHK/KPHL-PKPHL/DAS.3/12/2017	27 Desember 2017			
31	Kabupaten Tapanuli Selatan	UPT Pengelolaan Hutan Wilayah VI Sipirok	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	174,395	SK.6946/MENLHK/KPHL-PKPHL/DAS.3/12/2017	27 Desember 2017			
32	Kabupaten Mandailing Natal	UPT Pengelolaan Hutan Wilayah VIII Kotanopan	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	120,968	SK.3653/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2018	31 Mei 2018			
33	Kota Gunungsitoli	UPT Pengelolaan Hutan Wilayah XVI Gunung Sitoli	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	143,895	SK.3654/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2018	31 Mei 2018			
Jumlah				2,267,390					
Riau	34	Kampar	KPHP Unit XVIII Kampar Kiri	SK.640/Menhut-II/2011 tgl 7 November 2011	143,783	SK.7204/Menhut-II/Reg.1/2014	3 Desember 2014		
	35	Provinsi	KPHP Unit IX Minas Tahura	SK.765/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012	146,734	SK.280/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017	1 Februari 2017		
	36	Provinsi	KPHP Unit XXII Tasik Besar Serkap	SK.509/Menhut-II/2010 tgl 21 September 2010	512,280	SK.7565/Menhut-II/Reg.I-1/2014. Perubahan (Revisi) No. 5895/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020.	16 Desember 2014, 10 November 2020		
	37	Kepulauan Meranti	KPHP Unit XXIV Tebing Tinggi	SK.343/Menhut-II/2011 tgl 28 Juni 2011	69,747	SK.277/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017	1 Februari 2017		
	38	Pelalawan	KPHP Unit XX Nilo	SK.615/ MenLHK-Setjen/ 2015 tgl 14 Des 2015	168,458	SK.10481/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019	27 Desember 2019		
	39	Pelalawan	KPHP Unit XXI Sorek	SK.615/ MenLHK-Setjen/ 2015 tgl 14 Des 2015	124,109	SK.7861/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	22 Desember 2020		
	40	Bengkalis	KPHP Unit V Bengkalis	SK.615/ MenLHK-Setjen/ 2015 tgl 14 Des 2015	23,438	SK.10484/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019	27 Desember 2019		
	41	Siak	KPHP Unit VII Perawang	SK.615/ MenLHK-Setjen/ 2015 tgl 14 Des 2015	102,958	SK.3917/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2020	15 Juni 2020		
	42	Rokan Hulu	KPHP Unit XIV Rokan	SK.615/ MenLHK-Setjen/ 2015 tgl 14 Des 2015	67,118	SK.6329/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2019	18 Juli 2019		
	43	Indragiri Hulu	KPHP Unit XXX Serangge Sengkilo	SK.615/ MenLHK-Setjen/ 2015 tgl 14 Des 2015	150,718	SK.5803/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/10/2020	27 Oktober 2020		
	44	Rokan Hilir, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan	KPHP Unit I Riau	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	110,513	SK.8183/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	30 Desember 2020		
	45	Rokan Hilir, Kota Dumai, Bengkalis, Rokan Hulu	KPHP Unit II Bagan Siapiapi	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	141,080	SK.2142/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2021	16 April 2021		
	46	Kota Dumai, Rokan Hilir	KPHP Unit III Dumai	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	131,825	SK.6425/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020	27 November 2020		
	47	Bengkalis	KPHP Unit IV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	80,347	-			Belum menyusun RPHJP
	48	Siak, Bengkalis	KPHP Unit VI	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	224,663	-			Belum menyusun RPHJP
	49	Rokan Hilir, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Rokan Hilir, Rokan Hulu	KPHP Unit XII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	149,905	-			Belum menyusun RPHJP
	50	Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan	KPHP Unit XIX	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	87,370	-			Belum menyusun RPHJP
	51	Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis	KPHP Unit XV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	35,000	-			Belum menyusun RPHJP

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
	52 Kepulauan Meranti	KPHP Unit XXIII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	69,397	-				Belum menyusun RPHJP
	53 Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Tanjung Jabung Barat	KPHP Unit XXIX	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	67,827	-				Belum menyusun RPHJP
	54 Kepulauan Meranti	KPHP Unit XXV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	42,898	-				Belum menyusun RPHJP
	55 Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan	KPHP Unit XXVII Gaung	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	231,490	SK.8183/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	30 Desember 2020			
	56 Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan	KPHP Unit XXVIII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	61,182	SK.8183/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	30 Desember 2020			
	57 Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan	KPHP Unit XXXII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	96,697	-				Belum menyusun RPHJP
	58 Duri	KPHP Unit VIII	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	105,279	-				Belum menyusun RPHJP
	59 Duri	KPHP Unit X	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	64,885	-				Belum menyusun RPHJP
	60 Rokan Hilir	KPHP Unit XI	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	29,812	-				Belum menyusun RPHJP
	61 Rokan Hulu	KPHP Unit XIII	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	72,739	-				Belum menyusun RPHJP
	62 Kampar	KPHP Unit XVII Muara Mahat	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	27,330	SK.4984/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2019	24 Mei 2019			
	63 Indragiri Hilir	KPHP Unit XXVI	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	117,912	-				Belum menyusun RPHJP
	64 Kuantan Singingi	KPHL Kuantan Singingi Selatan	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	85,064	SK.6403/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016	23 November 2026			
Jumlah				3,542,558					
Sumatera Barat	65 Dharmasraya	KPHP Unit VIII Dharmasraya	SK.695/Menhut-II/2013 tgl 21 Oktober 2013	33,550	SK.6969/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2019	21 Agustus 2019			
	66 Pesisir Selatan	KPHP Unit XI Pesisir Selatan	SK.696/Menhut-II/2013 tgl 21 Oktober 2013	59,928	SK.278/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017	1 Februari 2017			
	66 Kepulauan Mentawai	KPHP Unit X	SK.724/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	123,467	SK.5224/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2019	29 Mei 2019			
	67 Kepulauan Mentawai	KPHP Unit XI	SK.724/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	134,750	SK.1990/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018	20 April 2018			
	67 Kabupaten Pasaman	UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I)	SK.832/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	231,199	SK.4760/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2018	16 Juli 2018	SK.6473/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019	29 Juli 2019	
	68 Kota Padang	UPTD KPHL Limapuluh Kota (Unit II)	SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021	102,981	SK.195/MENHUT-II/REG.I/2014	29 Januari 2014	SK.6469/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019	29 Juli 2019	
	68 Kabupaten Agam	UPTD KPHL Agam Raya (Unit III)	SK.832/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	152,688	SK.4761/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2018	16 Juli 2018	SK.6472/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019	29 Juli 2019	
	69 Kota Padang	UPTD KPHL Bukit Barisan (Unit IV)	SK.866/Menhut-II/2013	39,285	SK.7701/Menhut-II/REG.1-1/2014	22 Desember 2015	SK.6471/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.1/7/2019	29 Juli 2019	
	69 Kabupaten Sijunjung	UPTD KPHL Sijunjung (Unit V)	SK.331/Menhut-II/2010	83,191	SK.196/MENHUT-II/REG.I/2014	29 Januari 2014	SK.8466/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018	7 Desember 2018	
	70 Kota Solok	UPTD KPHL Solok (Unit VI)	SK.42/Menhut-II/2013	133,291	SK.197/MENHUT-II/REG.I/2014	29 Januari 2014	SK.6468/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019	29 Juli 2019	
	70 Batanghari	UPTD KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	SK.724/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	165,355	SK.4762/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2018	16 Juli 2018	SK.6467/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019	29 Juli 2019	
Jumlah				1,259,685					
Kepulauan Riau	71 Lingga	KPHP Unit III Lingga	SK.634/MenLHK-Setjen/ 2015 tgl 14 Des 2015	98,752	-				Belum menyusun RPHJP

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
72	Bintan	KPHP Unit IV Bintan Tanjung Pinang	SK.634/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	46,756	SK.3192/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2019	4 April 2019			
73	Karimun	KPHP Unit I Karimun	SK.452/MenLHK/Setjen/PLA.0/6/2016 tgl 17 Juni 2016	29,633	SK.5916/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2019	21 Juni 2019			
74	Natuna	KPHP Unit V Natuna	SK.844/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	61,403	SK.6185/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2019	8 Juli 2019			
75	Anambas	KPHP Unit VI Anambas	SK.731/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	22,832	-				Proses perbaikan RPHJP
76	Batam	KPHL Unit II Batam	SK.844/MenLHK/Setjen/PLA.0/11/2016	32,472	SK.9739/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2019	22 November 2019			
Jumlah				291,848					
Jambi	77 Sarolangun	KPHP Unit VII Limau	SK.714/Menhut-II/2011 tgl 19 Desember 2011	121,102	SK.198/Menhut-II/Reg.1/2014	29 Januari 2014			
	78 Merangin	KPHP Unit VI Merangin	SK.43/Menhut-II/2012 tgl 2 Februari 2012	76,137	SK.321/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018	7 Februari 2018			
	79 Kerinci	KPHP Unit I Kerinci	SK.960/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	34,250	SK.1983/MenLHK-KPHP/PKPHP/PHL.0/4/2017	10 April 2017			
	80 Tebo	KPHP Unit IX Tebo Barat	SK.632/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	142,967	SK.2419/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018	25 April 2018			
	81 Tebo	KPHP Unit X Tebo Timur	SK.632/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	103,650	SK.4748/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2018	13 Juli 2018			
	82 Sarolangun	KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	110,372	SK.1450/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018	3 April 2018			
	83 Batanghari, Tebo, Sarolangun, Musi Banyuasin	KPHP Unit XII	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	79,305	-				Belum menyusun RPHJP
	84 Muaro Jambi	KPHP Unit XIII	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	103,528	SK.8567/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018	17 Desember 2018			
	85 Tanjung Jabung Timur	KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	80,852	SK.10483/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019	27 Desember 2019			
	86 Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat	KPHP Unit XV	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	91,626	-				Belum menyusun RPHJP
	87 Tanjung Jabung Barat	KPHP Unit XVI Tanjung Jabung Barat	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	122,504	SK.10482/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019	27 Desember 2019			
	88 Bungo	KPHP Unit II Bungo	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	45,460	SK.8568/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018	17 Desember 2018			
	89 Bungo	KPHP Unit III Bungo	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	69,492	SK.10485/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019	27 Desember 2019			
	90 Merangin	KPHP Unit IV Merangin	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	50,930	SK.4764/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2020	12 Agustus 2020			
	91 Merangin	KPHP Unit V Merangin	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	53,412	SK.4779/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2020	12 Agustus 2020			
	92 Batanghari, Muaro Jambi	KPHP Unit XI	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	103,979	-				Proses perbaikan RPHJP
93	Tanjung Jabung Barat	KPHP Tanjung Barat Unit XV, XVI, dan XVII	SK. 787/Menhut-II/2009	15,965	SK.5429/MENLHK/KPHL-PKPHL/DAS.3/10/2017	18 Oktober 2017			
Jumlah				1,405,531					
Sumatera Selatan	94 Provinsi	KPHP Unit XIV Benakat	SK.827/Menhut-II/2013	271,434	SK.7369/Menhut-II/Reg.I-1/2014	9 Desember 2014			
	95 Musi Rawas	KPHP Unit VI Lakitan	SK.790/Menhut-II/2009 tgl 7 Desember 2009	76,776	SK.255/Menhut-II/Reg.1/2014	6 Februari 2014			
	96 Musi Banyuasin	KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis	SK.789/Menhut-II/2009 tgl 7 Desember 2009	265,953	SK.3646/Menhut-II/Reg.I-1/2014	7 Mei 2014			
	97 Musi Banyuwasin	KPHP Unit IV Meranti	SK.689/Menhut-II/2012 tgl 29 Nopember 2012	252,267	SK.7216/Menhut-II/Reg.I-1/2014	3 Desember 2014			
	98 Musi Rawas	KPHP Unit V Rawas	SK.688/Menhut-II/2012 tgl 29 Nopember 2012	121,585	SK.940/Menhut-II/Reg.I-1/2015	8 April 2015			
	99 Banyuasin	KPHP Unit II Lalan Sembilang	SK.621/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	62,486	SK.3531/MenLHK-KPHP/PKPHP/PHL.0/6/2017	12 Juni 2017			

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
	100	Ogan Komering Ilir	KPHP Unit XIV Suban Jeriji	SK.621/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	179,044	SK.3614/MenLHK-KPHP/PKPHP/PHL.0/6/2017	15 Juni 2017		
	101	Way Kanan, OKU Selatan, OKU Timur	KPHP Unit XIX Saka	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	32,419	SK.1205/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2021	29 Maret 2021		
	102	OKU, OKU Timur	KPHP Unit XX	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	27,076	SK.3614/MenLHK-KPHP/HPL.0/6/2017	12 Juni 2017		
	103	OKI	KPHP Unit XXI	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	44,592	SK.981/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2018	5 Maret 2018		
	104	OKI	KPHP Unit XXII	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	91,392	SK.980/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2018	5 Maret 2018		
	105	OKI	KPHP Unit XXIII	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	206,254	SK.306/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018	5 Februari 2018		
	106	OKI	KPHP Unit XXIV	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	407,604	SK.291/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018	2 Februari 2018		
	107	Muara Enim dan Lahat Provinsi Sumatera Selatan	KPHP Unit VIII	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	6,504	SK.4097/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2017	31 Juli 2017		
	108	Palembang	KPH Wilayah III Palembang-Banyuasin	SK.961/Menhut-II/2013	72,723	SK.4411/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2016	19 September 2016		
	109	Lahat	KPH Wilayah XI Kikim - Pasemah	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	40,701	SK.2933/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/4/2021	30 April 2021		
	110	Lahat	KPH Wilayah XI Kikim - Pasemah	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	40,701	SK.10754/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019	31 Desember 2019		
	111	Lahat	KPH Wilayah XI Kikim - Pasemah	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	40,701	SK.1325/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/2/2019	14 Februari 2019		
	112	Pagar Alam	KPH Wilayah X Dempo	SK.621/MenLHK-Setjen/2015	26,052	SK.6482/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016	29 November 2016		
	113	Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat	KPH Wilayah VIII Semendo	SK.621/MenLHK-Setjen/2015	69,431	SK.4097/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2017	31 Juli 2017		
	114	Ogan Komering Ulu	KPH Wilayah VI Bukit Nanti - Martapura	SK.621/MenLHK-Setjen/2015	94,847	SK.4096/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2017	31 Juli 2017		
	115	Kabupaten Oku Selatan	KPH Wilayah VII Mekakau - Saka	SK.621/MenLHK-Setjen/2015	29,706	SK.10755/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019	31 Desember 2019		
Jumlah				2,460,248					
Kep. Bangka Belitung	116	Belitung Timur	KPHP Unit XIII Gunung Duren	SK.764/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012	58,235	SK.218/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/1/2018	31 Januari 2018		
	117	Bangka Barat	KPHP Unit I Rambat Menduyung	SK.763/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012	59,622	SK.207/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/1/2017	27 Januari 2017		
	118	Bangka Tengah	KPHP Unit V Sungai Sembulan	SK.329/Menhut-II/2010	39,413	SK.194/Menhut-II/Reg.1/2014	29 Januari 2014		
	119	Bangka	KPHP Unit IV Sigambir Kotawaringin	SK.962/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	34,938	SK.1088/MenLHK-KPHP/PKPHP/PHL.0/3/2017	14 Maret 2017		
	120	Bangka Tengah dan Bangka Selatan	KPHP Unit VII Bangka Tengah	SK.797/Menhut-II/2009 tgl 7 Des 2009	51,826	SK.4983/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2019	24 Mei 2019		
	121	Bangka Barat	KPHP Unit II Jebu Bembang Antan	SK.626/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	103,539	SK.7223/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/9/2019	2 September 2019		
	122	Bangka	KPHP Unit III Bubus Panca	SK.626/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	89,310	SK.9809/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2019	27 November 2019		
	123	Bangka Selatan	KPHP Unit VIII Muntai Palas	SK.626/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	171,189	SK.2140/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2021	16 April 2021		
	124	Bangka Tengah	KPHP Unit VI Bangka Tengah	SK.846/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	27,199	SK.1238/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2020	30 Maret 2020		
	125	Tanjung Pandan	KPHP Unit IX	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	55,249	-			Belum menyusun RPHJP
	126	Tanjung Pandan	KPHP Unit XI	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	30,848	-			Belum menyusun RPHJP
	127	Belitung	KPHL Belantu Mendanau (Unit X)	SK.626/MenLHK-Setjen/2015	97,508	SK.6093/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2020	12 November 2020		
	128	Belitung Timur	KPH Belitung Timur (Unit XII)	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	47,750	SK.6395/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019	23 Juli 2019		
Jumlah				866,626					
Lampung	129	Way Kanan	KPHP Unit III Bukit Punggur	SK.439/Menhut-II/2012	45,075	SK.7100/Menhut-II/Reg.I-1/2014	24 November 2014		

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
130	Provinsi	KPHP Unit XVI Gedong Wani	SK.427/Menhut-II/2011 tgl 27 Juli 2011	30,243	SK.293/Menhut-II/Reg.I-1/2014	11 Februari 2014			
131	Provinsi	KPHP Unit IV Muara Dua	SK.236/Menhut-II/2012 tgl 10 Mei 2012	49,134	SK.294/Menhut-II/Reg.I-1/2014	11 Februari 2014			
132	Lampung Tengah	KPHP Unit VI Register 47 Way Terusan	SK.794/Menhut-II/2009 tgl 7 Desember 2009	12,500	SK.3039/Menhut-II/Reg.I-1/2014	22 April 2014			
133	Mesuji	KPHP Unit V Sungai Buaya	SK.996/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	44,249	SK.4885/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2018	23 Juli 2018			
134	Pesisir Barat	KPHP Unit I Pesisir	SK.473/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017	39,001	SK.2051/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2021	14 April 2021			
135	Lampung Selatan	KPHP Unit XIV	SK.473/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017	9,866	SK.8182/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	30 Desember 2020			
136	Lampung Barat	KPH II Liwa	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	42,074	SK.6945/MENLHK-KPHL/PKPHL/SET.1/12/2017	27 Desember 2017			
137	Lampung Tengah	KPH VII Way Waya-Tangkit Tebak	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	24,337	SK.1222/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/3/2020	30 Maret 2020			
138	Tanggamus	KPH X Pematang Neba	SK.852/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	56,020	SK.6944/MENLHK-KPHL/PKPHL/SET.1/12/2017	27 Desember 2017			
139	Kabupaten Pesawaran	KPH XI Pesawaran	SK. 438/Menhut-II/2012	11,204	SK.7370/Menhut-II/Reg.1-1/2014	9 Desember 2014			
140	Lampung Selatan	KPH Gunung Rajabasa - Way Pisang - Batu Serampok	SK.852/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	8,025	SK.738/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/2/2021	19 Februari 2021			
141	Lampung Timur	KPH XII Gunung Balak	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	24,285	SK.1224/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/3/2020	30 Maret 2020			
Jumlah				396,013					
Bengkulu	142	Muko Muko	KPHP Unit I Muko Muko	SK.330/Menhut-II/2010 tgl 25 Mei 2010	78,274	SK.3038/Menhut-II/Reg.I-1/2014	22 April 2014		
	143	Bengkulu Utara	KPHP Unit III Bengkulu Utara	SK.995/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	52,351	SK.1229/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2018	23 Maret 2018		
	144	Bengkulu	KPHL Bukit Daun	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	96,095	SK.196/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2018	29 Januari 2018		
	145	Seluma	KPHL Seluma	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	82,506	SK.6480/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016	29 November 2016		
	143	Bengkulu Selatan	KPHL Bengkulu Selatan	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	48,083	SK.2807/MENLHK-KPHL/DAS.3/5/2018	2 Mei 2018		
	144	Kaur	KPHL Kaur	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	85,892	SK.3650/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2018	31 Mei 2018		
	145	Raja Lebong	KPHL Bukit Balai Rejang	SK.994/Menhut-II/2013	17,388	SK.6481/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016	29 November 2016		
Jumlah				460,589					
D.I. Yogyakarta	146	Provinsi	KPHP Yogyakarta	SK.721/Menhut-II/2011 tgl 20 Desember 2011	15,725	SK.4051/Menhut-II/Reg.2-1/2014	28 Mei 2014		
Jumlah				15,725					
Bali	147	Jembrana	KPH Bali Barat	SK.6151/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018	38,537	SK.6151/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018	21 September 2018		
Jumlah				38,537					
NTB	148		KPHP Unit XX Madapangga Rompu	SK.631/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	45,663	SK.276/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017	1 Februari 2017		
	149	Sumbawa	KPHP Unit IX Batulante	SK.342/Menhut-II/2011 tgl 28 Juni 2011	32,776	SK.4052/Menhut-II/Reg.2-1/2014	28 Mei 2014		
	149	Provinsi	KPHP Unit XXIII Maria	SK.752/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012	27,632	SK.634/Menhut-II/Reg.2-1/2015	12 Maret 2015		
	150	Provinsi	KPHP Unit XVIII Tambora Utara	SK.970/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	26,920	SK.740/Menhut-II/Reg.2-1/2015	31 Maret 2015		
	150	Sumbawa Barat	KPHP Unit V Sejorong	SK.963/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	40,988	SK.6102/Menhut-II/Reg.2-1/2014	15 Oktober 2014		
	151	Sumbawa Barat, Sumbawa	KPHP Unit X Orong Telu	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	55,226	SK.10479/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019	27 Desember 2019		
	151	Sumbawa	KPHP Unit XI Brang Beh	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	64,134	SK.10480/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019	27 Desember 2019		
	152	Sumbawa	KPHP Unit XIII Plampang	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	33,610	SK.6325/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2019	18 Juli 2019		

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
152	Dompu, Sumbawa	KPHP Unit XV Ampang Riwo	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	42,630	SK.312/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/1/2021	20 Januari 2021			
153	Lombok Barat	KPHP Unit II Pelangan	SK.471/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017	18,022	-				Proses Perbaikan RPHJP
153	Bima	KPHP Unit XVII	SK.471/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017	32,245	-				Belum menyusun RPHJP
154	Bima	KPHP Unit XXI Waworada	SK.471/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017	20,900	SK.4762/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2020	12 Agustus 2020			
154	Mataram	BKPH Rinjani Barat	SK. 785/Menhut-II/2009	40,983	SK.5044/Menhut-II/Reg.2-1/2014	10 Juli 2014			
155	Lombok Tengah	BKPH Pelangan Tastura	SK. 971/Menhut-II/2013	16,153	SK.1018/Menhut-II/Reg.1-2/2015	17 April 2015			
155	Lombok Timur	BKPH Rinjani Timur	SK.664/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017	37,589	SK.5299/Menhut-II/Reg.2-1/2014	6 Agustus 2014	SK.6466/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019	29 Juli 2019	
156	Sumbawa Barat	BKPH Sejongrong Mataiyang Brangrea	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	32,340	SK.5747/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/6/2019	19 Juni 2019			
156	Sumbawa Barat	BKPH Brangrea Puncak Ngengas Unit VII	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	44,461	SK.6479/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016	29 November 2016			
157	Sumbawa Barat	BKPH Brangrea Puncak Ngengas Unit VIII	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	40,645	SK.6942/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2017	27 Desember 2017			
157	Sumbawa	BKPH Ropang	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	74,733	SK.4763/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2018	16 Juli 2018			
158	Sumbawa	BKPH Ampang Plampang	SK. 751/Menhut-II/2012	38,681	SK.630/Menhut-II/Reg.2-1/2015	10 Maret 2015	SK.8464/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018	7 Desember 2018	
158	Dompu	BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	25,422	SK.6677/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2016	16 Desember 2016			
159	Bima	BKPH Maria Donggomasa	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	43,399	SK.5931/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018	14 September 2018			
Jumlah				835,152					
NTT	160	Nagekeo	KPHP Unit V Nagekeo	SK.633/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	32,791	-			
	161	Ende	KPHP Unit VI Ende	SK.633/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	57,740	SK.10478/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019	27 Desember 2019		
	162	Timor Tengah Selatan	KPHP Unit XX Timor Tengah Selatan	SK.633/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	69,461	-			Proses Perbaikan RPHJP
	163	Timor Tengah Utara	KPHP Unit XXI Timor Tengah Utara	SK.633/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	105,632	-			
	164	Rote Ndao	KPHP Unit XVI Rote Ndao	SK.333/Menhut-II/2010 tgl 25 Mei 2010	40,730	SK.700/Menhut-II/Reg.2-1/2015	20 Maret 2015		
	165	Kupang	KPHP Unit XVII Kupang	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	113,398	SK.4440/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2020	21 Juli 2020		
	166	Malaka	KPHP Unit XIX Mutis Timau	SK.664/MenLHK/Setjen/PLA.0/11/2017	9,442	-			Proses Perbaikan RPHJP
	167	Sumba Barat	KPHP Unit XII	SK.84/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019 tgl 21 Januari 2019	7,544	-			Belum menyusun RPHJP
	168	Sumba Tengah	KPHP Unit XIII	SK.84/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019 tgl 21 Januari 2019	26,168	-			Belum menyusun RPHJP
	169	Mataram	BKPH Rinjani Barat	SK. 785/Menhut-II/2009	40,983	SK.5044/Menhut-II/Reg.2-1/2014	10 Juli 2014		
	170	Lombok Tengah	BKPH Pelangan Tastura	SK. 971/Menhut-II/2013	16,153	SK.1018/Menhut-II/Reg.1-2/2015	17 April 2015		
	171	Lombok Timur	BKPH Rinjani Timur	SK.664/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017	37,589	SK.5299/Menhut-II/Reg.2-1/2014	6 Agustus 2014	SK.6466/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019	29 Juli 2019
	172	Sumbawa Barat	BKPH Sejongrong Mataiyang Brangrea	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	32,340	SK.5747/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/6/2019	19 Juni 2019		
	173	Sumbawa Barat	BKPH Brangrea Puncak Ngengas Unit VII	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	44,461	SK.6479/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016	29 November 2016		
	174	Sumbawa Barat	BKPH Brangrea Puncak Ngengas Unit VIII	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	40,645	SK.6942/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2017	27 Desember 2017		
	175	Sumbawa	BKPH Ropang	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	74,733	SK.4763/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2018	16 Juli 2018		

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
	176 Sumbawa	BKPH Ampang Plampang	SK. 751/Menhut-II/2012	38,681	SK.630/Menhut-II/Reg.2-1/2015	10 Maret 2015	SK.8464/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018	7 Desember 2018	
	177 Dompu	BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	25,422	SK.6677/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2016	16 Desember 2016			
	178 Bima	BKPH Maria Donggomasa	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	43,399	SK.5931/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018	14 September 2018			
Jumlah				857,312					
Kalimantan Barat	179 Sintang	KPHP Unit X Sintang Utara	SK.791/Menhut-II/2009 tgl 7 Desember 2009	56,893	SK.10477/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019	27 Desember 2019			
	180 Kendawangan	KPHP Unit XXXII Ketapang Selatan	SK.680/Menhut-II/2012 tgl 23 November 2012	178,851	-				Proses Perbaikan RPHJP
	181 Melawi	KPHP Unit XXIII Menukung	SK.620/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	189,599	SK.8195/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	30 Desember 2020			
	182 Melawi	KPHP Unit XXIV Sokan	SK.620/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	179,461	-				Belum menyusun RPHJP
	183 Ketapang	KPHP Unit XXV Kayong	SK.620/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	318,717	SK.6427/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020	27 November 2020			
	184 Sambas	KPHP Unit I Sambas	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	127,794	SK.6249/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020	20 November 2020			
	185 Mempawah	KPHP Unit VIII Mempawah	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	94,544	SK.6989/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2019	22 Agustus 2019			
	186 Sintang, Melawi	KPHP Unit XV Sintang Timur	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	207,079	SK.5930/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2019	25 Juni 2019			
	187 Ketapang	KPHP Unit XXX Ketapang Selatan	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	70,458	SK.8191/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	30 Desember 2020			
	188 Ketapang	KPHP Unit XXXI Ketapang Selatan	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	261,701	-				Belum menyusun RPHJP
	189 Kubu Raya	KPHP Unit XXXIII Kubu Raya	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	318,804	SK.6677/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2019	8 Agustus 2019			
	190 Bengkayang	KPHP Unit II Bengkayang	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tgl 13 Februari 2019	145,558	SK.6411/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020	25 November 2020			
	191 Sanggau	KPHP Unit III Sanggau Barat	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tgl 13 Februari 2019	123,612	SK.6333/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020	24 November 2020			
	192 Sanggau	KPHP Unit IV Sanggau Timur	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tgl 13 Februari 2019	266,183	SK.7858/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	22 Desember 2020			
	193 Sanggau	KPHP Unit V Sanggau Barat	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tgl 13 Februari 2019	111,392	SK.6333/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020	24 November 2020			
	194 Landak	KPHP Unit VI Landak	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tgl 13 Februari 2019	55,343	-				Belum menyusun RPHJP
	195 Landak	KPHP Unit VII Landak	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tgl 13 Februari 2019	104,987	SK.6426/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020	27 November 2020			
	196 Sintang	KPHP Unit IX Sintang Utara	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tgl 13 Februari 2019	135,282	SK.6410/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020	25 November 2020			
	197 Sanggau	KPHP Unit XI Sanggau Timur	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tgl 13 Februari 2019	68,505	-				Belum menyusun RPHJP
	198 Sintang	KPHP Unit XIV Sintang Timur	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tgl 13 Februari 2019	107,644	SK.8193/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	30 Desember 2020			
	199 Sintang	KPHP Unit XVII Sintang Timur	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tgl 13 Februari 2019	323,684	SK.8194/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	30 Desember 2020			
	200 Kapuas Hulu	KPHP Unit XXI Kapuas Hulu Selatan	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tgl 13 Februari 2019	438,927	SK.8196/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	30 Desember 2020			
	201 Melawi	KPHP Unit XXII Melawi	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tgl 13 Februari 2019	277,427	SK.8195/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	30 Desember 2020			
	202 Ketapang	KPHP Unit XXVI Ketapang Utara	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tgl 13 Februari 2019	258,733	SK.3819/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2020	15 Juni 2020			
	203 Ketapang	KPHP Unit XXVII Ketapang Utara	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tgl 13 Februari 2019	326,132	-				Belum menyusun RPHJP
	204 Ketapang	KPHP Unit XXVIII Ketapang Utara	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tgl 13 Februari 2019	96,919	-				Belum menyusun RPHJP

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
	205	Ketapang	KPHP Unit XXIX Ketapang Selatan	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tgl 13 Februari 2019	180,331	-			Belum menyusun RPHJP
	206	Sintang	KPHP Unit XXXIV Sintang Utara	SK.144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tgl 13 Februari 2019	83,478	-			Belum menyusun RPHJP
	207	Sekadau	KPH Wilayah Sekadau	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	132,425	SK.10759/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019		31 Desember 2019	
	208	Melawi	KPH Wilayah Melawi	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	56,043	SK.10758/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019		31 Desember 2019	
	209	Kapuas Hulu	KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara Unit XVIII	SK.380/Menhut-II/2011	56,020	SK.5508/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/6/2019		14 Juni 2019	
	210	Kapuas Hulu	KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara Unit XIX	SK.380/Menhut-II/2011	312,405	SK.482/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/2/2021		3 Februari 2021	
	211	Kapuas Hulu	KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	474,145	SK.481/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/2/2021		3 Februari 2021	
Jumlah				6,139,076					
Kalimantan Selatan	212	Tanah Bumbu	KPHP Unit VI Tanah Bumbu	SK.624/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	262,919	SK.52/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/1/2017		9 Januari 2017	
	213	Banjarnegara	KPHP Unit VII Banjarnegara	SK.793/Menhut-II/2009 tgl 7 Desember 2012	139,957	SK.15/Menhut-II/Reg.III/2014		21 Oktober 2014	
	214	Kotabaru	KPHP Unit III Pulau Laut dan Sebuku	SK.226/Menhut-II/2012 tgl 4 Mei 2012	112,258	SK.22/Menhut-II/Reg.III/2014		31 Desember 2014	
	215	Tanah Laut	KPHP Unit VII Tanah Laut	SK.442/Menhut-II/2012 tgl 9 Agustus 2012	92,641	SK.21/Menhut-II/Reg.III/2014		29 Desember 2014	
	216	Tabalong	KPHP Unit V Tabalong	SK.997/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2012	117,357	SK.10/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016		23 Desember 2016	
	217	Kotabaru	KPHP Unit II Cantung	SK.469/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017	209,297	SK.52/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/1/2017		9 Januari 2017	
	218	Tabalong	KPHP Unit X Tabalong Kiwa	SK.469/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sep 2017	117,914	-			Proses Perbaikan RPHJP
	219	Kotabaru	KPH Sengayam	SK.469/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	163,077	SK.6095/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2020		12 November 2020	
	220	Balangan	KPH Balangan	SK.836/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	163,077	SK.198/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2018		29 Januari 2018	
	221	Hulu Sungai Selatan	KPH Hulu Sungai	SK. 750/Menhut-II/2012	129,517	SK.3617/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/6/2017		16 Juni 2017 / 12 November 2020	SK.6094/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2020
Jumlah				1,508,014					
Kalimantan Tengah	222	Kota Waringin Barat	KPHP Unit XXII dan XXVI Kota Waringin Barat	SK.749/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012	316,135	SK.5/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/ 12/2016, Revisi No. SK.5940/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/9/2018		23 Desember 2016, 12 September 2018	
	223	Lamandau	KPHP Unit XXIII Lamandau	SK.717/Menhut-II/2011 tgl 19 Desember 2011	226,289	SK.8/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/ 12/2016		23 Desember 2016	
	224	Seruyan	KPHP Unit XXI Seruyan	SK.716/Menhut-II/2012 tgl 19 Desember 2012	373,900	SK.6/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/ 12/2016		23 Desember 2016	
	225	Murung Raya	KPHP Unit II Murung Raya	SK.964/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	908,255	SK.9/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/ 12/2016		23 Desember 2016	
	226	Gunung Mas	KPHP Unit XVI Gunung Mas	SK.965/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	294,935	SK.7/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/ 12/2016		23 Desember 2016	
	227	Kota Palangkaraya	KPHP Unit III Kahayan Tengah	SK.629/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	59,185	SK.5841/MENLHK-KPHL/PKPHP/HPL.0/9/2018		13 September 2018	
	228	Barito Utara	KPHP Unit V Barito Hulu	SK.629/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	334,069	SK.2421/MENLHK-KPHL/PKPHP/HPL.0/4/2018		25 April 2018	
	229	Barito Timur	KPHP Unit XIV Barito Hilir	SK.629/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	48,400	SK.9631/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2019		19 November 2019	
	230	Kotawaringin Timur	KPHP Unit XXIX Kotawaringin Timur	SK.629/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	200,518	-			
	231	Pulang Pisau	KPHP Unit XXXI Kahayan Hilir	SK.629/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	378,819	SK.8655/MENLHK-KPHL/PKPHP/HPL.0/12/2018		17 Desember 2018	
	232	Barito Hilir	KPHP Unit VII Barito Hilir	SK.853/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	158,785	SK.5294/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/5/2019		31 Mei 2019	

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
233	Kapuas	KPHP Unit X Kapuas Hulu	SK.853/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	244,231	SK.5883/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020	5 November 2020			
234	Kapuas	KPHP Unit XI Kapuas Tengah	SK.853/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	274,875	SK.8656/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018	17 Desember 2018			
235	Katingan	KPHP Unit XVII Katingan Hulu	SK.853/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	681,864	SK.1883/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018	17 April 2018			
236	Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, Kapuas, Gunung Mas	KPHP Unit XVIII Kahayan Tengah	SK.853/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	140,418	SK.1383/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2019	19 Februari 2019			
237	Kotawaringin Timur	KPHP Unit XIX Mentaya Hulu-Seruyan Tengah	SK.853/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	366,726	SK.8215/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2018	29 November 2018			
238	Lamandau, Sukamara	KPHP Unit XXIV	SK.853/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	92,242	-				Belum menyusun RPHJP
239	Sukamara	KPHP Unit XXV Sukamara	SK.853/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	157,199	SK.8735/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018	21 Desember 2018			
240	Kotawaringin Timur	KPHP Unit XXVII Mentaya Tengah Seruyan Hilir	SK.853/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	302,601	SK.9005/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/10/2019	23 Oktober 2019			
241	Kotawaringin Timur	KPHP Unit XXVIII Mentaya Tengah Seruyan Hilir	SK.853/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	144,535	SK.1449/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018	3 April 2018			
242	Katingan, Kotawaringin Timur	KPHP Unit XXX Katingan Hilir	SK.853/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	217,832	SK.1033/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/1/2019	30 Januari 2019			
243	Murung Raya	KPHP Unit I Murung Raya	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	1,063,147	SK.5915/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2019	21 Juni 2019			
244		KPHP Unit VI	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	180,311	SK.2463/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2021	24 April 2021			
245		KPHP Unit VIII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	107,713	-				Belum menyusun RPHJP
246	Kapuas	KPHP Unit XII Kapuas Hulu	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	184,028	-				Proses Perbaikan RPHJP
247		KPHP Unit XIII Kahayan Tengah	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	182,947	SK.4761/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2020	12 Agustus 2020			
248		KPHP Unit XV Kahayan Hulu	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	203,828	SK.4439/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2020	21 Juli 2020			
249		KPHP Unit XX	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	189,920	-				Belum menyusun RPHJP
250	Kuala Kapuas	KPHL Kapuas - Kahayan Unit IV	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	105,302	SK.10757/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019	31 Desember 2019			
251	Barito Selatan	KPHL Gerbang Barito	SK. 974/Menhut-II/2013	154,667	SK.5179/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/8/2018	3 Agustus 2018			
252	Kuala Kapuas	KPHL Kapuas - Kahayan Unit XXXII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	185,915	SK.10756/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019	31 Desember 2019			
253	Kuala Kapuas	KPHL Kapuas - Kahayan Unit XXXIII	SK. 247/Menhut-II/2011	105,372	SK.3616/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/6/2017	15 Juni 2017			
Jumlah				8,584,963					
Kalimantan Timur	256 Berau	KPHP Unit XII Berau Barat	SK.649/Menhut-II/2010 tgl 22 November 2010	775,539	SK.19/Menhut-II/Reg.III/2014	21 Oktober 2014			
	257 Provinsi	KPHP Unit XXXI Meratus	SK.964/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	387,488	SK.20/Menhut-II/Reg.III/2014	29 Desember 2014			
	258 Paser	KPHP Unit XXXIV Kendilo	SK.964/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	139,235	SK.279/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017	1 Februari 2017			
	259 Kutai Kartanegara	KPHP Unit XXVI DAS Belayan	SK.623/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	979,933	SK.290/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018	2 Februari 2018			
	260 Kutai Barat	KPHP Unit XXVII Santan	SK.623/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	263,467	SK.284/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017	1 Februari 2017			
	261 Kutai Kartanegara	KPHP Unit XXIX Delta Mahakam	SK.623/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	109,314	SK.281/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017	1 Februari 2017			
	262 Provinsi	KPHP Unit XXXII Bongan	SK.623/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	333,166	SK.283/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017	1 Februari 2017			
	263 Paser	KPHP Unit XXXIII Telakai	SK.623/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	255,245	SK.282/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017	1 Februari 2017			

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
		264	KPHP Unit XIV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	322,439 -				Belum menyusun RPHJP
	Berau	265	KPHP Unit XV Berau Tengah	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	963,807	SK.311/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/1/2021	20 Januari 2021		
		266	KPHP Unit XVI	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	362,229 -				Belum menyusun RPHJP
	Kutai Timur	267	KPHP Unit XVII Manubar	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	193,180	SK.8181/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	30 Desember 2020		
	Kutai Timur	268	KPHP Unit XVIII Bengalon	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	263,363	SK.8187/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	30 Desember 2020		
		269	KPHP Unit XIX Kelinjau	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	707,501	SK.8180/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	30 Desember 2020		
		270	KPHP Unit XXIII Batu Ayau	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	213,264	SK.7862/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	22 Desember 2020		
	Mahakam Hulu	271	KPHP Unit XXIV Damai	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	559,710	SK.3818/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2020	15 Juni 2020		
		272	KPHP Unit XXV Mook Manoor Bulatn	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	110,153	SK.7859/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	22 Desember 2020		
		273	KPHP Unit XXVIII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	270,557 -				Belum menyusun RPHJP
	Balikpapan	274	KPHP Bongan	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	333,166	SK.6940/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2017	27 Desember 2017		
	Kutai Barat	275	KPHL Batu Rook	SK.835/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	658,129	SK.3541/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2021	11 Mei 2021		
Jumlah				8,200,885					
Kalimantan Utara	Bulungan	276	KPHP Unit V Kayan	SK.223/Menhut-II/2011 tgl 4 Mei 2012	487,842	SK.7232/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/10/2018	12 Oktober 2018		
	Malinau provinsi	277	KPHP Unit X Malinau	SK.224/Menhut-II/2012 tgl 4 Mei 2012	715,512	SK.2374/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2017	25 April 2017		
	Tana Tidung	278	KPHP Unit VII Tana Tidung	SK.623/ MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	120,789 -				Proses Perbaikan RPHJP
		279	KPHP Unit II	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	357,466 -				Belum menyusun RPHJP
	Nunukan	280	KPHP Unit III Lumbis	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	178,204	SK.8434/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018	7 Desember 2018		
	Nunukan	281	KPHP Unit IV Nunukan	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	400,454	SK.1380/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2019	19 Februari 2019		
		282	KPHP Unit V Tana Lia	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	42,817 -				Proses Perbaikan RPHJP
		283	KPHP Unit VIII Delta Kayan	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	197,730 -				Proses Perbaikan RPHJP
		284	KPHP Unit XI	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	606,599 -				Belum menyusun RPHJP
	Bulungan	285	KPHP Unit XIII Keburau	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	211,140	SK.8880/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/10/2019	18 Oktober 2019		
		286	KPHP Unit XX	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	560,400 -				Belum menyusun RPHJP
		287	KPHP Unit XXI	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	448,602 -				Belum menyusun RPHJP
	Tarakan	288	KPH Tarakan	SK. 783/Menhut-II/2009	4,623	SK.18/MENHUT-II/REG.III/2014	21 Oktober 2014		
Jumlah				4,332,178					
Gorontalo	Boalemo	289	KPHP Unit V Boalemo	SK.402/Menhut-II/2011 tgl 21 Juli 2011	96,926	SK.108/Menhut-II/Reg.4-1/2014	17 Januari 2014		
	Gorontalo	290	KPHP Unit VI Gorontalo	SK.976/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	15,867	SK.7315/Menhut-II/Reg.4-1/2014	5 Desember 2014		
	Gorontalo Utara	291	KPHP Unit IV Gorontalo Utara	SK.766/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012	105,808	SK.6521/Menhut-II/Reg.4-1/2014	24 Oktober 2014		
	Bone Bolango	292	KPHP Unit VII Bone Bolango	SK.639/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	35,784	SK.6102/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2016	4 November 2016		

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	D A S A R H U K U M	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
		293	KPHP Unit I	SK.476/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	52,326	-			Proses Perbaikan RPHJP
	Pohuwato	294	KPH Wil. I dan II Gorontalo Barat	SK.848/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	90,644	SK.1244/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/3/2018	26 Maret 2018		
	Pohuwato	295	KPH Wil. III Pahuwato	SK. 334/Menhut-II/2010	116,275	SK.6523/Menhut-II/Reg.4-1/2014	24 Oktober 2014		
Jumlah				513,630					
Sulawesi Utara	296	Provinsi	KPHP Unit IV Poigar	SK.788/Menhut-II/2009	41,598	SK.265/Menhut-II/Reg.4-2/2014	7 Februari 2014		
	297	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara	KPHP Unit I	SK.729/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	143,923	SK.1239/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2020	30 Maret 2020		
	298	Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Timur	KPHP Unit II	SK.729/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	138,402	SK.1920/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2019	19 Maret 2019		
	299	Minahasa, Tomohon, Minahasa Tenggara, dan Minahasa Selatan	KPHP Unit V	SK.386/MenLHK/Setjen/PLA.0/2017 Tgl 15 Agustus 2017	57,287	SK.4174/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2018	25 Juni 2018		
	300	Kepulauan Sangihe	Unit III Kep. Sangihe, Kep. Talaud, dan Kep. Siau Tagulandang Biaro (SITARO)	SK.729/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	26,313	SK.10749/MENGLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019	31 Desember 2019		
	301	Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung	Unit VI Minahasa Utara, Bitung	SK.625/Menlhk-Setjen/2015	27,314	SK.6676/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2016	16 Desember 2016		
Jumlah				434,837					
Sulawesi Tengah	302	Provinsi	KPHP Unit IV Dampelas Tinombo	SK.792/Menhut-II/2009 tgl 7 Desember 2009	100,912	SK.694/Menhut-II/Reg.4-2/2013	27 Desember 2013		
	303	Provinsi	KPHP Unit VI dan IX Dolago Tanggunung	SK.755/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012	144,350	SK.3935/Menhut-II/Reg.4-1/2014	16 Mei 2014		
	304	Buol	KPHP Unit I Pogogul	SK.756/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012	199,533	SK.5580/Menhut-II/Reg.4-1/2014	8 September 2014		
	305	Banggai	KPHP Unit XX Balantak	SK.754/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012	117,403	SK.5579/Menhut-II/Reg.4-1/2014	8 September 2014		
	306	Provinsi	KPHP Unit XIX Toili Baturube	SK.967/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	276,636	SK.6522/Menhut-II/Reg.4-1/2014	24 Oktober 2014		
	307	Tojo Una-Una	KPHP Unit XVII Sivia Patuju	SK.968/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	112,492	SK.7316/Menhut-II/Reg.4-1/2014	5 Desember 2014		
	308	Poso	KPHP Unit XI Sintuwu Maroso	SK.639/Menhut-II/2011 tgl 7 November 2011	137,460	SK.3934/Menhut-II/Reg.4-1/2014	16 Mei 2014		
	309	Donggala	KPHP Unit II Gunung Dako	SK.618/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	162,785	SK.6880/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2017	21 Desember 2017		
	310	Donggala	KPHP Unit VII Banawa Lalundu	SK.618/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	109,923	SK.741/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017	28 Februari 2017		
	311	Morowali	KPHP Unit XIV Tepe Asa Maroso	SK.618/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	190,830	SK.2420/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018	25 April 2018		
	312	Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	KPHP Unit XXI Pulau Peling	SK.618/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	117,079	SK.7152/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2019	30 Agustus 2019		
	313	Donggala, Parigi Moutong	KPHP Unit V	SK.849/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	111,273	SK.740/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017	28 Februari 2017		
	314	Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	KPHP Unit XVI Sivia Patuju	SK.476/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	211,056	SK.10372/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019	26 Desember 2019		
	315		KPHP Unit XII Sintuwu Maroso	SK.735/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	92,179	-			Proses Perbaikan RPHJP
	316		KPHP Unit XV Tepe Asa Aroa	SK.735/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	156,582	SK.648/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2021	9 Februari 2021		
	317		KPHP Unit XVIII Balantak	SK.735/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	179,581	SK.8184/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2020	30 Desember 2020		
	318	Donggala	KPH Dampelas	SK.849/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	133,451	SK.4098/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2017	31 Juli 2017		
	319	Parigi Moutong	KPH Dolago Tanggunung	SK.755/Menhut-II/2012	60,738	SK.6225/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019	10 Juli 2019		

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
	320 Sigi	KPH Kulawi	SK.849/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	220,920	SK.197/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2018	29 Januari 2018			
	321 Poso	KPH Sintuwu Maroso	SK.476/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	90,136	SK.158/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2019	14 Januari 2019			
	322 Morowali Utara	KPH Tepo Asa Aroa	SK.476/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	170,235	SK.1494/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/4/2018	9 April 2018			
Jumlah				3,095,554					
Sulawesi Tenggara	323 Buton	KPHP Unit III Lakompa	SK.795/Menhut-II/2009 tgl 7 Desember 2009	30,600	SK. 764/Menhut-II/Reg.4-1/2015	31 Maret 2015			
	324 Provinsi	KPHP Unit XXIV Gula Raya	SK.61/Menhut-II/2011 tgl 28 Februari 2011	134,419	SK.3694/Menhut-II/Reg.4-1/2014, Revisi SK.6774/MENLHK-KPHP/HPL.0/12/2017	9 Mei 2014, 14 Desember 2017			
	325 Bombana	KPHP Unit X Tina Orima	SK.426/Menhut-II/2011 tgl 27 Juli 2011	116,126	SK.2684/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2016, Revisi SK.6780/MENLHK-KPHP/HPL.0/12/2017	9 Juni 2016, 14 Desember 2017			
	326 Kota Bau Bau	KPHP Unit V Wakonti	SK.635/Menlhk-Setjen/2015 tgl 14 Desember 2015	12,179	-				Proses Perbaikan RPHJP
	327 Muna	KPHP Unit VI Muna	SK.635/Menlhk-Setjen/2015 tgl 14 Desember 2015	73,726	SK.760/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018	14 Februari 2018			
	328 Kolaka/Koltim	KPHP Unit XI Mekongga Selatan	SK.635/Menlhk-Setjen/2015 tgl 14 Desember 2015	46,580	SK.435/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017	8 Februari 2017			
	329 Kolaka/Koltim	KPHP Unit XII Ladongi	SK.635/Menlhk-Setjen/2015 tgl 14 Desember 2015	47,088	SK.436/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2017	8 Februari 2017			
	330 Konawe Utara	KPHP Unit XIX Bina Mawahana Sejuk	SK.635/Menlhk-Setjen/2015 tgl 14 Desember 2015	113,580	SK.2376/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2017	25 April 2017			
	331 Muna, Buton Utara	KPHP Unit VIII Gantara	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	18,588	SK.9262/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/10/2019	31 Oktober 2019			
	332	KPHP Unit I Kapontori	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.O/1/2019 tgl 21 Januari 2019	13,793	-				Proses Perbaikan RPHJP
	333 Buton	KPHP Unit II Lasalimu	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.O/1/2019 tgl 21 Januari 2019	48,282	SK.8788/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/10/2019	14 Oktober 2019			
	334	KPHP Unit IX Pulau Kabaena	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.O/1/2019 tgl 21 Januari 2019	46,315	-				Proses Perbaikan RPHJP
	335	KPHP Unit XV Alaaha	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.O/1/2019 tgl 21 Januari 2019	93,115	-				Proses Perbaikan RPHJP
	336	KPHP Unit XVII Patampanua Utara	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.O/1/2019 tgl 21 Januari 2019	105,549	-				Proses Perbaikan RPHJP
	337	KPHP Unit XXIII Wawonii	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.O/1/2019 tgl 21 Januari 2019	36,562	-				Proses Perbaikan RPHJP
	338 Buton Tengah	KPH Unit IV Katondoki	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	15,681	SK.6092/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2020	12 November 2020			
	339 Buton Utara	KPH Unit VII Peropa'ea	SK.975/Menhut-II/2013	23,273	SK.7581/Menhut-II/Reg.4-1/2014	17 Desember 2014			
	340 Kolaka	KPH Unit XIII Mekongga Utara	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	125,751	SK.157/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2019	14 Januari 2019			
	341 Kolaka Timur	KPH Unit XIV Ueesi	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	145,224	SK.4764/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2018	16 Juli 2018			
	342 Kolaka Utara	KPH Unit XVI Patampanua Selatan	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	149,301	SK.1306/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/2/2019	14 Februari 2019			
	343 Konawe Utara	KPH Unit XX Laiwoi Tengah	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	177,816	SK.1324/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/2/2019	14 Februari 2019			
	344 Konawe	KPH Unit XXI Laiwoi Tenggara	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	64,836	SK.156/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2019	14 Januari 2019			
	345 Konawe	KPH Unit XXII Laiwoi	SK.762/Menhut-II/2012	142,776	SK.6091/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2020	12 November 2020			
	346 Wakatobi	KPH Unit XXV Wakatobi	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	9,978	SK.4695/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/8/2020	7 Agustus 2020			
Jumlah				1,791,138					
Sulawesi Selatan	347 Maros	KPHP Unit I Bulusaraung	SK.665/MenLHK/Setjen/PLA.0/11/2017 tgl 27 November 2017	51,406	SK.3783/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2019	11 April 2019			
	348 Cenrana	KPHP Unit XIII Cenrana	SK.665/MenLHK/Setjen/PLA.0/11/2017 tgl 27 November 2017	133,506	SK.2675/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2019	28 Maret 2019			

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	D A S A R H U K U M	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
349	Jeneberang	KPHP Unit XIV Jeneberang I	SK.665/MenLHK/Setjen/PLA.0/11/2017 tgl 27 November 2017	76,962	SK.3784/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2019	11 April 2019			
350	Barro	KPH Ajatappareng	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019	69,214	SK.8617/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018	7 Desember 2018			
351	Sidenreng Rappang	KPH Bila	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019	73,207	SK.8616/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018	7 Desember 2018			
352	Pinrang	KPH Sawitto	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019	71,970	SK.8618/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018	7 Desember 2018			
353	Luwu Utara	KPH Latimojong	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019	73,156	SK.8611/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018	7 Desember 2018			
354	Enrekang	KPH Mata Allo	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019	74,786	SK.8614/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018	7 Desember 2018			
355	Tana Toraja	KPH Saddang I	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019	103,951	SK.8613/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018	7 Desember 2018			
356	Toraja Utara	KPH Saddang II	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019	50,826	SK.8612/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018	7 Desember 2018			
357	Luwu Utara	KPH Rongkong	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019	131,142	SK.8610/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018	7 Desember 2018			
358	Luwu Timur	KPH Larona Malili	SK.80/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019	127,874	SK.8608/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018	7 Desember 2018			
359	Kepulauan Selayar	KPH Walanae	SK.616/Menlhk-Setjen/2015	38,685	SK.8607/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018	7 Desember 2018			
360	Kepulauan Selayar	KPH Selayar	SK.371/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2020	18,573	SK.8605/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018	7 Desember 2018			
Jumlah				1,095,258					
Sulawesi Barat	361 Mamasa	KPHP Unit VII Mamasa Barat	SK.341/Menhut-II/2011	53,555	SK.5581/Menhut-II/Reg.4-1/2014	8 September 2014			
	362 Provinsi	KPHP Unit V Budong Budong	SK.998/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	128,096	SK.817/Menhut-II/Reg.4-1/2015	1 April 2015			
	363 Karosa	KPHP Unit IV Karossa	SK.636/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	63,110	SK.305/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018	5 Februari 2018			
	364 Karama	KPHP Unit VI Karama	SK.636/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	156,917	SK.3/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/ 2016	23 Desember 2016			
	365 Pasangkayu	KPH Pasangkayu	SK.730/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12 /2017	23,729	SK.10753/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019	31 Desember 2019			
	366 Pasangkayu	KPH Lariang	SK. 60/Menhut-II/2011	57,916	SK.7317/Menhut-II/Reg.4-1/2014	5 Desember 2014			
	367 Pasangkayu	KPH Sarudu	SK.730/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12 /2017	71,611	SK.3575/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/4/2019	8 April 2019			
	368 Mamasa	KPH Mamasa Tengah	SK. 340/Menhut-II/2011	37,962	SK.7584/Menhut-II/Reg.4-1/2014	17 Desember 2014			
	369 Mamasa	KPH Mamasa Timur	SK.840/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2 016	51,086	SK.4809/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2019	16 Mei 2019			
	370 Majene	KPH Malunda	SK. 753/Menhut-II/2012	52,071	SK.1017/Menhut-II/Reg.4- 1/2015	17 April 2015			
	371 Polewali Mandar	KPH Mapii	SK. 651/Menhut-II/2010	77,196	SK.6404/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016	22 Juli 2016			
	372 Mamuju	KPH Bonehau Kalumpang	SK.80/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019	42,321	SK.6227/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019	10 Juli 2019			
Jumlah				815,570					
Maluku	373 Buru	KPHP unit II Wae Apu	SK.770/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012	232,432	SK.8273/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018	21 Desember 2018			
	374 Maluku Tengah	KPHP Unit VII Wae Sapalewa	SK.336/Menhut-II/2010 tgl 25 mei 2010	67,057	SK.6881/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2017	21 Desember 2017			
	375 Maluku Tengah	KPHP Unit III Wae Tina	SK.977/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	204,384	SK.1077/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/1/2019	31 Januari 2019			
	376 Seram Bagian Timur	KPHP Unit X Wae Bubi	SK.978/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	66,464	SK.3193/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2019	4 April 2019			
	377	KPHP Unit I Wae Mala-Wae Mikona	SK.622/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	144,539	-				Proses Perbaikan RPHJP
	378 Maluku Tenggara Barat	KPHP Unit XVIII Bungal	SK.622/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	132,339	SK.6564/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2019	30 Juli 2019			

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	D A S A R H U K U M	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
379		KPHP Unit XXI P. Molkar - P. Trangan	SK.622/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	70,159	-				Proses Perbaikan RPHJP
380		KPHP Unit XXII (Revisi KPHL)	SK.622/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	132,116	-				Belum menyusun RPHJP
381	Seram Bagian Timur	KPHP Unit XII Wae Masiwang	SK.842/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	193,041	-				Proses Perbaikan RPHJP
382		KPHP Unit IV	SK.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tgl 21 Januari 2019	140,952	-				Belum menyusun RPHJP
383		KPHP Unit VI Wae Mala	SK.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tgl 21 Januari 2019	127,944	-				Proses Perbaikan RPHJP
384		KPHP Unit VIII	SK.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tgl 21 Januari 2019	94,957	-				Belum menyusun RPHJP
385		KPHP Unit XI	SK.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tgl 21 Januari 2019	136,401	-				Belum menyusun RPHJP
386		KPHP Unit XVII	SK.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tgl 21 Januari 2019	70,874	-				Belum menyusun RPHJP
387		KPHP Unit XIX Babar Moa	SK.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tgl 21 Januari 2019	45,765	-				Belum menyusun RPHJP
388		KPHP Unit XX	SK.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tgl 21 Januari 2019	64,272	-				Belum menyusun RPHJP
389	Seram Bagian Barat	KPH Seram Bagian Barat	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	92,022	SK.10001/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019	6 Desember 2019			
390	Maluku Tengah	KPH Maluku Tengah	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	79,987	SK.1225/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/3/2020	30 Maret 2020			
391	Ambon	KPH Ambon	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	10,288	SK.9999/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019	6 Desember 2019			
392	Tual	KPH Tual	SK.842/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	10,067	SK.10000/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019	6 Desember 2019			
393	Maluku Tenggara	KPH Maluku Tenggara	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	11,836	SK.1226/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/3/2020	30 Maret 2020			
Jumlah 24				2,127,896					
Maluku Utara	394 Provinsi	KPHP Unit X Gunung Sinopa	SK.337/Menhut-II/2010 tgl 25 Mei 2010	44,577	SK.7578/Menhut-II/Reg.4-1/2014	17 Desember 2014			
	395 Halmahera Selatan	KPHP Unit XIII Bacan	SK.969/Menhut-II/2013 tgl 27 Desember 2013	140,808	SK.7580/Menhut-II/Reg.4-1/2014	17 Desember 2014			
	396 Halmahera Timur	KPHP Unit IV Halmahera Timur	SK.619/Menlhk-Setjen/2015 tgl 14 Desember 2015	199,327	Belum menyusun RPHJP				
	397 Kota Tidore Kepulauan	KPHP Unit IX Oba	SK.619/Menlhk-Setjen/2015 tgl 14 Desember 2015	17,998	SK.5485/MENLHK-KPHP/HPL.0/10/2017	18 Oktober 2017			
	398 Kepulauan Sula	KPHP Unit XVI Kepulauan Sula	SK.619/Menlhk-Setjen/2015 tgl 14 Desember 2015	168,726	Belum menyusun RPHJP				
	399 Halmahera Selatan, Kota Tidore	KPHP Unit XII	SK.838/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	170,442	SK.5486/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/10/2017	18 Oktober 2017			
	400	KPHP Unit V	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	78,287	Belum menyusun RPHJP				
	401 Halmahera Timur	KPHP Unit VIII Talawi	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	93,115	SK.4780/MENLHK-KPHP/HPL.0/8/2020	14 Agustus 2020			
	402 Halmahera Tengah, Halmahera Timur	KPHP Unit VII Damuli	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tgl 7 Sept 2017	37,199	SK.4763/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2020	12 Agustus 2020			
	403	KPHP Unit XIV	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	190,756	Belum menyusun RPHJP				

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	DASAR HUKUM	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
404	Kepulauan Sula	KPHP Unit XV Wai Todontaha	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tgl 29 Des 2017	97,118	SK.4762/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2020	12 Agustus 2020			
405	Pulau Morotai	KPH Pulau Morotai	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	149,714	SK.159/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2019	14 Januari 2019			
406	Halmahera Utara	KPH Halmahera Utara	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	190,645	SK.10750/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019	31 Desember 2019			
407	Halmahera Barat	KPH Halmahera Barat	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	205,794	SK.8721/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018	20 Desember 2018			
408	Halmahera Tengah	KPH Halmahera Tengah	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	76,265	SK.4274/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2021	31 Mei 2021			
409	Ternate	KPH Ternate-Tidore	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	19,622	SK. 6400/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019	25 Juli 2019			
Jumlah 25				1,880,393					
Papua	410	Keerom	KPHP Unit XXIX Keerom	SK.828/Menhut-II/2013 tgl 19 November 2013	173,456	SK.6520/Menhut-II/Reg.4-1/2014	24 Oktober 2014		
	411	Waropen	KPHP Unit XVII Waropen	SK.760/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012	186,962	SK.5881/Menhut-II/Reg.4-1/2014	23 September 2014		
	412	Provinsi	KPHP Unit XXI Sarmi	SK.829/Menhut-II/2013 tgl 19 November 2013	255,814	SK.5880/Menhut-II/Reg.4-1/2014	23 September 2014		
	413	Kepulauan Yapen	KPHP Unit XIX Yapen	SK.786/Menhut-II/2009 tgl 7 Desember 2009	105,867	SK.4631/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/9/2017	5 September 2017		
	414	Sarmi	KPHP Unit XXII Sarmi	SK.622/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	185,260	-			Belum menyusun RPHJP
	415	Kota Jayapura	KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura	SK.622/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	47,726	SK.5293/MENLHK-KPHP/HPL.0/5/2019	31 Mei 2019		
	416	Nduga	KPHP Unit XLIII Nduga	SK.622/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	257,531	SK.6314/MENLHK-KPHP/HPL.0/9/2018	28 September 2018		
	417	Boven Digul	KPHP Unit LI Boven Digul	SK.622/MenLHK-Setjen/2015 tgl 14 Des 2015	666,097	-			Belum menyusun RPHJP
	418	Nabire, Dogiyai	KPHP Unit III	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	194,846	-			Belum menyusun RPHJP
	419	Jayapura, Sarmi	KPHP Unit XXIII Sarmi	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	122,820	SK.6338/MENLHK-KPHP/HPL.0/11/2020	24 November 2020		
	420	Keerom, Jayapura, Sarmi	KPHP Unit XXV	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	354,901	-			Belum menyusun RPHJP
	421	Asmat, Mappi	KPHP Unit XLVII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	461,382	-			Belum menyusun RPHJP
	422	Bovendigoel, Mappi, Asmat	KPHP Unit XLVIII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	573,543	-			Belum menyusun RPHJP
	423	Asmat, Mappi, Merauke	KPHP Unit XLIX	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	539,996	-			Belum menyusun RPHJP
	424	Bovendigoel, Mappi, Merauke	KPHP Unit LIII Bovendigoel	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016 tgl 9 Nov 2016	649,375	-			Belum menyusun RPHJP
	425		KPHP Unit IV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019 tgl 21 Januari 2019	317,625	-			Belum menyusun RPHJP
	426		KPHP Unit IX	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019 tgl 21 Januari 2019	266,595	-			Belum menyusun RPHJP
	427		KPHP Unit L	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019 tgl 21 Januari 2019	309,709	-			Belum menyusun RPHJP
	428		KPHP Unit LII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019 tgl 21 Januari 2019	500,489	-			Belum menyusun RPHJP
	429		KPHP Unit LIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019 tgl 21 Januari 2019	249,580	-			Belum menyusun RPHJP

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	D A S A R H U K U M	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
		430	KPHP Unit LV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019 tgl 21 Januari 2019	937,154 -				Belum menyusun RPHJP
		431	KPHP Unit XIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019 tgl 21 Januari 2019	631,259 -				Belum menyusun RPHJP
		432	KPHP Unit XIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019 tgl 21 Januari 2019	199,047 -				Belum menyusun RPHJP
		433	KPHP Unit XLVI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019 tgl 21 Januari 2019	449,718 -				Belum menyusun RPHJP
		434	KPHP Unit XV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019 tgl 21 Januari 2019	473,908 -				Belum menyusun RPHJP
		435	KPHP Unit XVI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019 tgl 21 Januari 2019	314,739 -				Belum menyusun RPHJP
		436	KPHP Unit XXIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019 tgl 21 Januari 2019	236,940 -				Belum menyusun RPHJP
		437	KPHP Unit XXVII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019 tgl 21 Januari 2019	359,094 -				Belum menyusun RPHJP
		438	KPHP Unit XXX	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019 tgl 21 Januari 2019	150,238 -				Belum menyusun RPHJP
		439	KPHP Unit XXXII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019 tgl 21 Januari 2019	268,278 -				Belum menyusun RPHJP
		440	KPHP Unit XXXIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2 019 tgl 21 Januari 2019	242,459 -				Belum menyusun RPHJP
		441	KPHP Unit XXXI	SK.28/MenLHK/Setjen/OTL.1/1/20 20 tanggal 10 Januari 2020	312,293 -				Belum menyusun RPHJP
	442 Mimika, Dogiyai dan Deiya	Unit VI Mimika	SK.622/MenLhk-Setjen/2015	274,515	SK.6304/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019	16 Juli 2019			
	443 Biak Numfor	Unit XX Biak Numfor	SK. 648/Menhut-II/2010	176,018	SK.6544/Menhut-II/Reg.4-1/2014	28 Oktober 2014			
Jumlah 26				11,445,234					
Papua Barat	444 Sorong	KPHP Unit II Sorong	SK.701/Menhut-II/2010 tgl 20 Desember 2010	200,982	SK.7582/Menhut-II/Reg.4-1/2014	17 Desember 2014			
	445 Sorong Selatan	KPHP Unit V Sorong Selatan	SK.771/Menhut-II/2012 tgl 26 Desember 2012	50,837	SK.7318/Menhut-II/Reg.4-1/2014	5 Desember 2014			
	446 Tambora	KPHP Unit IV Tambora	SK. 630/MenLHK-Setjen/2015 Tgl 14 Des 2015	155,254 -					Proses Perbaikan RPHJP
	447 Bintuni	KPHP Unit XV Bintuni	SK. 630/MenLHK-Setjen/2015 Tgl 14 Des 2015	370,319	SK.2353/MENLHK-KPHP/HPL.0/4/2021	22 April 2021			
	448 Fakfak	KPHP Unit XVI Fakfak	SK. 630/MenLHK-Setjen/2015 Tgl 14 Des 2015	213,741	SK.27/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/1/2021	7 Januari 2021			
	449	KPHP Unit VII	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019	130,809 -					Belum menyusun RPHJP
	450	KPHP Unit VIII	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019	122,666 -					Belum menyusun RPHJP
	451	KPHP Unit IX	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019	242,559 -					Belum menyusun RPHJP

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA KPHP	D A S A R H U K U M	LUAS (HA)	SK Pengesahan RPHJP	Tanggal Pengesahan RPHJP	SK Pengesahan RPHJP Revisi	Tanggal Pengesahan RPHJP Revisi	KETERANGAN
452		KPHP Unit X	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019	337,794 -					Belum menyusun RPHJP
453		KPHP Unit XI	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019	302,888 -					Belum menyusun RPHJP
454		KPHP Unit XIV	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019	288,745 -					Belum menyusun RPHJP
455		KPHP Unit XVII	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019	159,489 -					Belum menyusun RPHJP
456		KPHP Unit XVIII	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019	230,695 -					Belum menyusun RPHJP
457		KPHP Unit XIX	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019	235,427 -					Belum menyusun RPHJP
458		KPHP Unit XX	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019	399,415 -					Belum menyusun RPHJP
459		KPHP Unit XI	SK. 86/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2019 Tgl 21 Jan 2019	390,140 -					Belum menyusun RPHJP
460	Raja Ampat and Sorong	Unit I Raja Ampat	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	209,188	SK.1221/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/3/2020	30 Maret 2020			
461	Sorong	Unit II Sorong	SK. 995/Menhut-II/2013	12,775	SK.470/Menhut-II/Reg.4-1/2015	26 Februari 2015			
462	Manokwari	Unit XII Manokwari	SK.850/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	256,207	SK.10752/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2019	31 Desember 2019			
Jumlah				4,309,930					
JUMLAH TOTAL				73,480,059					

TABEL 2.1
PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) KEGIATAN HUTAN ALAM TAHUN 2017 - 2021

No.	Provinsi	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		UM	Luas (HA)	UM	Luas (HA)	UM	Luas (HA)	UM	Luas (HA)	UM	Luas (HA)
1	Nangroe Aceh Darussalam	2	125,204.00	2	125,204.00	2	125,204	2	125,204.00	2	125,204.00
2	Sumatera Utara	6	302,993.00	6	302,993.00	5	255,993	5	246,003.00	5	246,003.00
3	Sumatera Barat	4	183,705.00	4	183,705.00	4	183,705	4	184,145.00	3	155,305.00
4	Riau	3	183,076.66	2	135,389.66	2	133,589	2	133,589.00	2	133,589.00
5	Jambi	2	56,045.00	2	56,045.00	2	56,045	2	56,045.00	2	56,045.00
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	2	64,988.00	2	64,988.00	2	64,988	2	64,988.00	2	64,988.00
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	1	28,644.00	1	28,644.00	1	28,644	1	28,644.00	1	28,644.00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	55	3,257,906.83	54	3,202,901.83	53	3,100,123	55	3,224,465.38	56	3,249,309.38
21	Kalimantan Barat	23	1,058,930.00	23	1,058,930.00	24	1,087,660	24	1,090,450.00	25	1,123,693.00
22	Kalimantan Selatan	4	209,001.00	4	209,001.00	4	192,746	4	192,746.00	4	192,746.00
23	Kalimantan Tengah	57	4,074,299.70	55	4,009,394.70	55	3,966,620	54	3,911,363.85	55	3,952,911.85
24	Kalimantan Utara	26	1,876,328.04	26	1,874,828.04	27	2,162,188	26	2,129,226.00	26	2,136,196.00
25	Sulawesi Utara	1	26,800.00	1	26,800.00	1	26,800	1	26,800.00	1	26,800.00
26	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	8	391,405.00	7	336,425.00	7	336,425	7	336,425.00	8	415,981.00
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	1	30,525.00	1	30,525.00	1	30,525	1	30,525.00	1	30,525.00
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	13	721,595.00	13	717,670.00	13	717,670	13	716,709.00	13	715,613.00
32	Maluku Utara	13	670,041.00	13	670,041.00	14	716,106	15	782,006.00	15	777,941.55
33	Papua	17	2,458,265.00	17	2,503,524.00	17	2,503,524	18	2,518,453.00	19	2,518,453.00
34	Papua Barat	21	3,089,605.00	21	2,978,978.00	21	2,978,978	20	2,978,978.00	21	2,849,438.00
JUMLAH		259	18,809,357.23	254	18,515,987.23	255	18,667,531.91	256	18,776,765.23	261	18,799,385.78

TABEL 2.2
PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) KEGIATAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI TAHUN 2017 - 2021

No	Provinsi	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		UM	Luas (Ha)	UM	Luas (Ha)	UM	Luas (Ha)	UM	Luas (Ha)	UM	Luas (Ha)
1	Nangroe Aceh Darussalam	6	232,401.00	6	232,401.00	6	224,109	6	224,571.00	6	224,571.00
2	Sumatera Utara	8	365,610.00	8	365,610.00	8	523,307	7	349,517.52	7	349,517.52
3	Sumatera Barat	4	51,464.90	4	65,432.90	4	65,433	4	65,432.90	4	65,432.90
4	Riau	52	1,589,347.55	51	1,567,816.46	48	1,401,598	47	1,531,914.05	47	1,531,914.05
5	Jambi	19	699,862.00	18	686,662.42	18	686,662	18	665,572.42	18	665,911.64
6	Sumatera Selatan	19	1,330,405.08	19	1,324,653.02	19	1,315,586	19	1,302,708.03	20	1,323,202.28
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	4	115,834.00	3	108,909.00	3	108,909	3	108,909.00	3	108,909.00
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	-
10	Kep. Bangka Belitung	9	275,952.00	9	266,457.00	9	266,437	9	265,290.29	9	265,290.29
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	3	68,590.00	3	68,590.00	4	75,810	4	75,810.00	4	75,810.00
19	Nusa Tenggara Timur	2	54,175.00	2	54,175.00	2	54,175	2	54,175.00	2	54,175.00
20	Kalimantan Timur dan Utara	49	1,945,990.62	49	1,935,001.62	50	1,865,124.62	52	1,878,096.80	52	1,878,096.80
21	Kalimantan Barat	44	1,916,296.22	45	1,899,664.22	47	1,903,429	47	1,903,661.37	49	1,959,211.37
22	Kalimantan Selatan	17	552,521.87	17	603,832.00	17	552,793	17	547,358.00	17	529,977.00
23	Kalimantan Tengah	29	777,926.43	32	851,215.43	33	851,802	34	841,862.01	35	845,674.01
24	Sulawesi Utara	1	7,500.00	1	7,500.00	1	7,500	1	7,500.00	1	7,500.00
25	Gorontalo	2	74,146.78	2	74,146.78	2	74,146.78	2	74,147.78	2	74,147.78
26	Sulawesi Tengah	2	73,320.00	2	73,320.00	2	73,320	2	73,320.00	2	73,320.00
27	Sulawesi Selatan	2	21,430.00	2	21,430.00	2	21,430	2	21,430.00	2	21,430.00
28	Sulawesi Barat	3	47,610.00	3	47,610.00	3	47,610	1	10,600.00	1	10,600.00
29	Sulawesi Tenggara	3	54,280.00	3	54,280.00	3	54,280	3	54,280.00	3	54,280.00
30	Maluku	2	66,205.00	2	66,205.00	1	33,245	1	33,245.00	1	33,245.00
31	Maluku Utara	5	65,908.00	5	65,908.00	5	65,908	5	65,908.00	5	65,908.00
32	Papua	7	691,845	8	898,645	8	898,645	8	898,645.00	8	898,645.00
33	Papua Barat	1	99,980.00	1	99,980.00	1	87,225	1	87,224.95	1	87,224.95
JUMLAH		293	11,178,601.45	295	11,439,444.85	296	11,258,485.11	295	11,141,179.12	299	11,203,993.59

TABEL 2.3
INVESTASI PBPH KEGIATAN HUTAN ALAM TAHUN 2017 - 2021

No	Provinsi	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	46,822,520	-	46,822,520	-	46,822,520	-	46,822,520	-	46,822,520
2	Sumatera Utara	-	317,318,851	-	317,318,851	-	317,318,851	-	317,318,851	129,000,000,000	317,318,851
3	Sumatera Barat	311,027,200,000	121,877,487	-	121,877,487	311,027,200,000	121,877,487	311,027,200,000.00	121,877,487	-	121,877,487
4	Riau	-	70,317,179	-	31,801,400	-	31,801,400	-	31,801,400	-	31,801,400
5	Jambi	-	58,476,690	-	58,476,690	-	58,476,690	-	58,476,690	-	58,476,690
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	43,926,900	-	43,926,900	-	43,926,900	-	43,926,900	-	43,926,900
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kaltim	9,682,042,393,500	2,263,062,848	9,682,042,393,500	2,191,402,196	9,682,042,393,500	2,146,821,196	9,682,042,393,500	2,191,402,196	364,623,969,693	2,191,402,196
21	Kalbar	-	1,350,805,508	-	684,731,912	-	684,731,912	-	684,731,912	185,730,085,000	684,731,912
22	Kalsel	-	684,731,912	-	127,006,062	-	127,006,062	-	127,006,062	-	127,006,062
23	Kalteng	653,610,334,302	127,006,062	653,610,334,302	2,169,294,604	653,610,334,302	2,169,294,604	653,610,334,302	2,169,294,603	438,425,664,445	2,169,294,603
24	Kaltara	-	2,215,965,899	-	1,350,805,508	-	1,350,805,508	-	1,350,805,508	384,603,811,286	1,350,805,508
25	Sulawesi Utara	-	9,005,500	-	9,005,500	-	9,005,500	-	9,005,500	-	9,005,500
26	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	186,781,984	-	168,920,584	-	168,920,584	-	168,920,584	-	168,920,584
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	35,640,000	-	35,640,000	-	35,640,000	-	35,640,000	-	35,640,000
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	210,380,710,800	142,185,500	210,380,710,800	142,185,500	210,380,710,800	142,185,500	210,380,710,800	142,185,500	2,000,000,000	142,185,500
32	Maluku Utara	-	442,097,181	-	442,097,181	-	442,097,181	-	442,097,181	38,924,053,000	442,097,181
33	Papua	42,720,727,854	845,709,307	42,720,727,854	746,547,307	42,720,727,854	746,547,307	42,720,727,854	746,547,307	236,262,717,000	746,547,307
34	Papua Barat	4,038,889,660,280	1,153,113,899	4,038,889,660,280	1,153,113,899	4,038,889,660,280	1,153,113,899	4,038,889,660,280	1,153,113,899	405,426,783,000	1,153,113,899
JUMLAH		14,938,671,026,736	10,114,845,227	14,627,643,826,736	9,840,974,101	14,938,671,026,736	9,796,393,101	14,938,671,026,736	9,840,974,100	2,184,997,083,424	9,840,974,100

TABEL 2.4
INVESTASI PBPH KEGIATAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI TAHUN 2017 - 2021

No	Provinsi	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD
1	Nangroe Aceh Darussalam	106,925,342,025.00	-	106,925,342,025.00	-	106,925,342,025.00	-	106,925,342,025.00	-	-	-
2	Sumatera Utara	1,883,394,144,618.00	-	1,883,394,144,618.00	-	1,883,394,144,618.00	-	1,883,394,144,618.00	-	175,632,194,587.00	-
3	Sumatera Barat	273,884,369,652.00	-	228,884,369,652.00	-	273,884,369,652.00	-	273,884,369,652.00	-	1,903,079,501,787.00	-
4	Riau	10,596,861,179,324.90	-	10,596,861,179,324.90	-	10,596,837,529,726.90	-	10,552,569,017,754.00	-	1,023,163,172,561.00	-
5	Jambi	4,898,399,349,142.00	-	4,898,399,349,142.00	-	1,337,560,230,510.00	-	1,337,560,230,510.00	-	10,690,416,657,410.90	-
6	Sumatera Selatan	6,407,623,164,623.89	-	6,407,623,164,623.89	-	9,782,991,723,692.89	-	9,782,991,723,692.00	-	1,392,255,617,263.00	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	9,782,991,723,692.00	-
8	Lampung	267,089,210,270.00	-	267,089,210,270.00	-	285,799,306,551.00	-	285,799,306,551.00	-	-	-
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	267,089,210,270.00	-
10	Kep. Bangka Belitung	1,921,675,376,494.00	-	1,921,675,376,494.00	-	1,665,345,773,776.00	-	1,665,345,773,776.00	-	-	-
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	1,921,675,376,494.00	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	47,639,091,000.00	-	47,639,091,000.00	-	1,845,352,394,000.00	-	1,845,352,394,000.00	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	1,845,352,394,000.00	-	1,845,352,394,000.00	-	349,220,000,000.00	-	349,220,000,000.00	-	75,766,296,070.00	-
20	Kalimantan Timur	6,337,342,480,648.68	-	6,337,342,480,648.68	-	6,018,673,578,244.68	-	6,018,673,578,243.00	-	1,845,352,394,000.00	-
21	Kalimantan Barat	5,024,903,794,584.00	-	5,024,903,794,584.00	-	5,024,903,794,584.00	-	5,024,903,794,584.00	-	7,268,089,645,632.68	-
22	Kalimantan Selatan	951,631,363,504.00	-	951,631,363,504.00	-	1,003,117,397,529.00	-	1,003,117,397,529.00	-	4,787,895,263,701.00	-
23	Kalimantan Tengah	591,118,045,591.00	-	591,118,045,591.00	-	2,210,318,420,296.00	-	2,161,362,065,372.00	-	1,001,631,363,504.00	-
24	Kalimantan Utara	1,013,267,322,051.00	-	1,013,267,322,051.00	-	135,849,565,348.00	-	135,849,565,348.00	-	554,386,690,667.00	-
25	Sulawesi Utara	51,486,034,025.00	-	51,486,034,025.00	-	-	-	-	-	1,013,267,322,051.00	-
26	Gorontalo	435,647,206,000.00	-	435,647,206,000.00	-	47,639,091,000.00	-	47,639,091,000.00	-	51,486,034,025.00	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	103,338,909,000.00	-	103,338,909,000.00	-	435,647,206,000.00	-
28	Sulawesi Selatan	196,766,000,000.00	-	196,766,000,000.00	-	-	-	-	-	7,405,000,000.00	-
29	Sulawesi Barat	103,338,909,000.00	-	103,338,909,000.00	-	196,766,000,000.00	-	-	-	196,766,000,000.00	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	435,647,206,000.00	-	435,647,206,000.00	-	103,338,909,000.00	-
31	Maluku	349,220,000,000.00	-	349,220,000,000.00	-	34,875,211,617.00	-	-	-	25,000,000,000.00	-
32	Maluku Utara	302,110,893,112.00	-	302,110,893,112.00	-	267,235,681,495.00	-	267,235,681,495.00	-	-	-
33	Papua	755,097,000,000.00	-	755,097,000,000.00	-	755,097,000,000.00	-	755,097,000,000.00	-	302,110,893,112.00	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	942,164,900,000.00	-
JUMLAH		44,360,772,669,665.50	-	44,315,772,669,665.50	-	44,360,772,669,665.50	-	44,035,906,591,149.00	-	45,766,611,371,827.60	-

TABEL. 2.5
PENANAMAN PBPH KEGIATAN HUTAN ALAM TAHUN 2017-2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	87.50	83.79	10.00	116.50	465.00
3	Sumatera Barat	47.02	15.92	208.00	133.25	261.08
4	Riau	-	151.60	1,482.39	2,172.28	2,558.81
5	Jambi	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
11	Banten	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	3,673.07	1,382.86	1,143.97	1,495.73	3,719.78
21	Kalimantan Barat	71.00	418.82	4.90	65.00	6,165.29
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	131.00	33.00
23	Kalimantan Tengah	10,957.88	16,686.48	16,471.79	10,374.11	9,541.36
24	Kalimantan Utara	841.55	15.00	864.00	596.00	1,335.25
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	993.92
32	Maluku Utara	-	-	309.00	114.00	904.60
33	Papua	8.75	2,110.40	100.00	296.90	4,471.48
34	Papua Barat	255.00	-	-	-	5,517.36
JUMLAH		15,941.77	20,864.87	20,594.05	15,494.77	35,966.93

TABEL. 2.6
PENANAMAN PBPH KEGIATAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI TAHUN 2017-2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	10,052.68	82.60	7,571.90	11.00	18,726.00
3	Sumatera Barat	61.09	18.00	230.00	10.00	468.00
4	Riau	76,594.21	50,546.89	123,317.62	129,510.00	93,947.00
5	Jambi	12,132.00	26,566.01	42,207.43	2,180.00	31,813.00
6	Sumatera Selatan	57,273.34	103,331.28	87,088.72	5,044.00	63,883.00
7	Bengkulu	-	-	-	-	0.00
8	Lampung	527.09	277.48	995.56	-	1,125.00
9	Kep.Riau	-	-	-	-	0.00
10	Kep. Bangka Belitung	2,100.49	2,039.70	2,077.12	2,391.00	5.00
11	Banten	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	270.00	898.00	246.10	-	82.00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	8,656.00	0.00
20	Kalimantan Timur	25,544.25	29,713.59	31,533.26	5,390.00	17,560.00
21	Kalimantan Barat	12,078.83	7,276.84	13,243.67	68,513.00	22,233.00
22	Kalimantan Selatan	2,922.80	2,579.06	6,373.02	5,251.00	1,512.00
23	Kalimantan Tengah	-	6,292.00	6,189.48	61,955.00	5,611.00
24	Kalimantan Utara	5,799.40	6,611.10	6,822.60	1,864.00	6,543.00
25	Sulawesi Utara	-	3,560.47	-	0.00	0.00
26	Gorontalo	1,401.00	-	1,228.26	0.00	733.00
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	77.00	-
28	Sulawesi Selatan	-	27.82	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	116.00
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	948.07	1,142.00	1,291.00
34	Papua Barat	-	922.56	-	-	-
35	Perum Perhutani	-	-	-	52,444.00	54,540.00
JUMLAH		206,757.18	240,743.40	330,072.81	344,438.00	320,188.00

TABEL. 2.7
PRODUKSI KAYU BULAT PBPH PADA HUTAN ALAM TAHUN 2017 - 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		m3	m3	m3	m3	m3
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	35,600.64	46,942.61	29,420.57	73,003.39	101,053.00
3	Sumatera Barat	97,948.90	118,667.55	104,442.00	81,795.50	75,002.00
4	Riau	520,901.00	586,508.08	535,745.88	530,874.56	565,726.00
5	Jambi	7,456.27	2,277.80	91.71	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	3,080.71	5,340.72	4,075.44	5,247.48	7,526.00
8	Lampung	-	-	-	-	-
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
11	Banten	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	10,679.06	-	28,734.49	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	1,211,250.56	1,341,256.27	1,062,573.43	816,964.05	941,525.00
21	Kalimantan Barat	135,404.76	194,532.99	172,093.22	84,584.12	177,413.00
22	Kalimantan Selatan	23,585.49	16,569.08	2,025,425.81	23,651.78	18,618.00
23	Kalimantan Tengah	1,949,671.46	2,313,358.59	17,622.01	1,614,075.81	1,815,361.00
24	Kalimantan Utara	632,724.21	730,012.21	736,179.24	618,048.95	612,954.00
25	Sulawesi Utara	1,874.12	2,598.41	274.37	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	7,876.24	9,383.24	8,410.73	8,488.14	3,142.00
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	959.16	3,834.73	4,087.75	235.96	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	266,311.96	314,259.40	273,046.83	165,792.34	210,947.00
32	Maluku Utara	71,756.83	67,647.02	103,834.50	95,258.53	131,947.00
33	Papua	461,502.14	475,294.66	434,995.62	450,700.29	560,182.00
34	Papua Barat	500,442.20	749,189.71	777,309.37	707,170.85	827,202.00
JUMLAH		5,939,025.71	6,977,673.07	6,318,362.97	5,275,891.75	6,048,598.00

TABEL. 2.8
PRODUKSI KAYU BULAT PADA PBPH KEGIATAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI TAHUN 2017 - 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		m3	m3	m3	m3	m3
1	Nangroe Aceh Darussalam	9,475.00		387.56	1,513.12	10,096.00
2	Sumatera Utara	1,189,321.22	1,291,648.82	1,191,713.51	1,333,220.86	1,548,026.00
3	Sumatera Barat	8,552.23	5,989.18	29,955.55	42,657.28	41,841.00
4	Riau	19,922,579.11	19,965,510.05	19,451,141.96	22,581,026.05	23,444,509.00
5	Jambi	4,253,704.15	4,957,023.57	4,960,977.77	5,862,870.22	5,210,234.00
6	Sumatera Selatan	6,660,237.35	7,699,530.59	7,635,824.69	9,697,101.14	10,180,335.00
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	5,040.00	46,293.22	87,837.85	25,981.70	85,200.00
9	Kep.Riau	-	-	-	0.00	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	499.72	256.00
11	Banten	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	3,026.20	3,846.66	4,843.57	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	2,795,765.47	3,150,331.17	3435601.93	3,484,923.24	3,320,775.00
21	Kalimantan Barat	1,080,275.67	1,160,674.86	906,894.29	706,986.05	672,799.00
22	Kalimantan Selatan	75,404.24	17,249.81	11,351.39	11,384.54	6,014.00
23	Kalimantan Tengah	1,239,736.13	1,215,459.48	1,192,082.77	973449.3	1,237,579.00
24	Kalimantan Utara	546,507.25	604,760.05	528,713.22	594789.35	628,401.00
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	1,164.85	50.65	-	1,513.00
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	8,903.88	15,962.59	6,914.41	6,851.20	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	33,013.00
31	Maluku	-	-	-	49,660.72	83.00
32	Maluku Utara	183.14	-	1,100.13	-	-
33	Papua	-	-	-	12,770.01	14,566.00
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
35	Perum Perhutani	-	809,934.00	-	853,700.82	988,708.00
JUMLAH		37,798,711.04	40,945,378.90	39,445,391.25	46,239,385.32	47,423,948.00

TABEL. 2.9
TENAGA KERJA PBPH KEGIATAN HUTAN ALAM TAHUN 2017 - 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		Orang	Orang	Orang	Orang	Orang
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	458	430	477	430	192
3	Sumatera Barat	432	432	432	410	208
4	Riau	64	458	458	329	333
5	Jambi	88	-	-	-	27
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	42	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
11	Banten	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	48	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	3,498	2,768	3,605	3,017	1,809
21	Kalimantan Barat	2,080	1,749	1,708	1,866	2,320
22	Kalimantan Selatan	158	8	177	97	105
23	Kalimantan Tengah	8,072	8,201	8,787	8,606	6,556
24	Kalimantan Utara	2,175	1,971	2,014	1,977	1,720
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	40	58	74	26	11
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	24	35	35	35	35
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	529	891	676	440	440
32	Maluku Utara	334	567	645	721	362
33	Papua	494	760	768	932	350
34	Papua Barat	1,721	1,581	1,723	1,562	866
JUMLAH		20,167	19,951	21,627	20,448	15,334

TABEL. 2.10
TENAGA PBPH KEGIATAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI TAHUN 2017 - 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		Orang	Orang	Orang	Orang	Orang
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	92
2	Sumatera Utara	2,939	2,939	2,939	2,939	3,535
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	122
4	Riau	3,383	3,814	3,814	3,697	4,010
5	Jambi	1,633	1,647	1,647	1,647	2,294
6	Sumatera Selatan	7,763	5,316	5,316	5,316	1,163
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	68	68	68	68	31
9	Kep. Riau	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	74	74	74	74	2,038
11	Banten	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	127
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	1,830	1,887	1,887	1,887	2,750
21	Kalimantan Barat	579	805	805	805	833
22	Kalimantan Selatan	279	279	279	279	353
23	Kalimantan Tengah	193	193	193	193	3,778
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	3,049
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	25
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	21
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	22
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	96	96	96	96	-
33	Papua	-	-	-	-	76
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
JUMLAH		18,837	17,118	17,118	17,001	24,319

TABEL 3.1
PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) KEGIATAN RESTORASI EKOSISTEM TAHUN 2021

No.	Provinsi	Nama Perusahaan	Unit	Luas	Investasi		Tenaga Kerja	Penanaman	Lokasi	SK IUPHHK-RE	Hasil Penilaian	Predikat	Keterangan
			(UM)	(ha)	IDR	USD	Orang	(Ha)	Kab/Kota	Nomor			
1	Riau	PT. Gemilang Cipta Nusantara	1	20,599	26,000,000,000	2,000,000	19	146	Pelalawan	Kep. Menhut No. SK.395/Menhut-II/2012	-	-	-
		PT. Gemilang Cipta Nusantara	1	20,123	1,000,000,000	74,074	16	128	Kepulauan Meranti	Kep. Menhut No. SK.825/Menhut-II/2013	-	-	-
		PT. Sinar Mutiara Nusantara	1	32,781	26,000,000,000	2,000,000	41	196	Pelalawan	Kep. Menhut No. SK.162/Menhut-II/2014 Jo. SK. MenLHK No. 567/MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2018 (Tgl. 20 Agustus 2019)*	-	-	-
		PT. Global Alam Nusantara	1	36,525	26,000,000,000	2,000,000	41	186	Pelalawan	Kep. Menhut No. SK.230Menhut-II/2014	-	-	-
		PT. The Best One Unitimber	1	40,666	26,000,000,000	2,000,000	-	146	Pelalawan	Kep. Menhut No. SK.747Menhut-II/2014; Kep. Menteri LHK No SK. 515/MenLHK/Setjen/PLA.2/8/2019	-	-	-
2	Bengkulu	PT. Sipef Biodiversity Indonesia	1	12,656	2,206,657,616	159,960	27	155.05	Mukomuko	Kep. Menhut No. SK.622Menhut-II/2013 jo. Kep. BKPM No. 10/1/IUPHHK-RE/PMDN/2017	-	-	-
3	Jambi	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia	1	46,385	2,000,000,000		113	2,314	Batanghari	Kep. Menhut No. SK.327/Menhut-II/2010	-	-	-
		PT. Alam Bukit Tiga Puluh	1	38,665	386,310,094,000		31	1.85	Tebo	Kep. Ka. BKPM a.n. Menlhk No. 7/1/IUPHHK-RE/PMDN/2015	-	-	-
4	Sumatera Selatan	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia	1	50,261	2,000,000,000		74	1,783	Musi Banyuasin	Kep. Menhut No. SK.293/Menhut-II/2007; Kep. Menteri LHK No. SK. 468/MenLHK/Setjen/PLA.0/11/2018 (06 Nov 2018)	-	-	-
		PT. Karawang Ekawana Nugraha	1	8,210	80,000,000		22	18	Ogan Komering Ilir	Kep. Menhut No. SK.142Menhut-II/2014; Kep. Menteri LHK No. SK. 281/MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2018	-	-	-
5	Kalimantan Barat	PT. Ekosistem Khatulistiwa Lestari	1	14,080	2,000,000,000		24	5	Kubu Raya	Kep. Menhut No. SK.560/Menhut-II/2011	-	-	-

No.	Provinsi	Nama Perusahaan	Unit	Luas	Investasi		Tenaga Kerja	Penanaman	Lokasi	SK IUPHHK-RE	Hasil Penilaian	Predikat	Keterangan
			(UM)	(ha)	IDR	USD	Orang	(Ha)	Kab/Kota	Nomor			
6	Kalimantan Tengah	PT. Rimba Raya Conservation	1	36,954	1,433,250,000		79	-	Seruyan	Kep. Menhut No. SK.735/Menhut-II/2013 jo. Kep.Men LHK. No. SK. 23/MenLHK/Sekjen/PLA.2/1/2018	-	-	-
		PT. Rimba Makmur Utama	1	108,009	11,000,000,000		74	809.69	Katingan	Kep. Menhut No. SK.734/Menhut-II/2013	-	-	-
		PT. Alam Sukses Lestari	1	19,520	1,000,000,000		30	103	Barito Timur	Keputusan Kepala BKPM Nomor 13/I/IUPHHK-RE/PMDN/2016	-	-	-
		PT. Rimba Makmur Utama	1	49,620	11,000,000,000		17	-	Kotawaringin Timur	Kep. MenLHK No. SK.23/1/IUPHHK-RE/PMDN/2016	-	-	-
7	Kalimantan Timur	PT. Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (Eks PT.Mugitriman Intercontinental)	1	86,594	1,000,000,000		44	-	Kutai Timur	Kep. Menhut No. SK.464/Menhut-II/2010 Jo. SK.164/MENLHK/SETJEN/PL A.2/3/2020 Tanggal 24 Maret 2020	-	-	-
TOTAL			16	621,646.87	525,030,001,616	8,234,034	652	5,991.59					

TABEL 3.2
PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN (PBPB) KEGIATAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Tenaga Kerja (Orang)	Investasi		SK / Tanggal
						IDR	USD	
1	PT. Global Alam Lestari	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	22,280.00	60	23,298,000,000		SK. Menhut No. SK.494/Menhut-II/2013 Tanggal 12 Juli 2013
2	PT. Hutan Amanah Lestari	Kalimantan Tengah	Barito Selatan dan Barito Timur	25,800.00	41	110,000,000,000		SK. Menhut No. SK.475/Menhut-II/2013 Tanggal 3 Juli 2013
3	Yayasan Alam Bukit Betung	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	30.00				SK. Gubernur Kep. Babel No. 188.44/958/Dishut/2016 Tanggal 19 Oktober 2016
4	PT. Island Connections International	Kepulauan Riau	Karimun	19.64	165	60,000,000,000		SK. BPMPT No. 1778/BPMPT/SIUK.R-04/2016 Tanggal 30 Juni 2016
5	PT. Inhutani I Unit Labanan	Kalimantan Timur	Berau	446.00				SK. 5383/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 Tanggal 19 Oktober 2016
6	PT. Kepri Funtasy Resort	Kepulauan Riau	Karimun	1,388.81	25	341,106,000,000		SK. Gubernur Kepri No. 2170/Kpts-18/V/2018 Tanggal 28 Mei 2018
7	PT. Global Multindo Sejati	Kepulauan Riau	Kota Batam	303.13	25	81,912,000,000		SK. Gubernur No. 2171/Kpts-18/V/2018 tanggal 28 Mei 2018
8	PT. Megah Puri Lestari	Kepulauan Riau	Kota Batam	33.38	25	88,862,500,000		SK. Gubernur No. 2172/Kpts-18/V/2018 Tanggal 28 Mei 2018
9	PT. Mustika Combol Indah	Kepulauan Riau	Karimun	1,714.77	75	723,756,000,000		SK. Gubernur No. 2173/Kpts-18/V/2018 28 Mei 2018
10	PT. Nusantara Oriental Permai	NTB	Sumbawa Barat	40.63				SK. DPMPTSP No. 503/01-I/03/IUPJLWA/DPMPTSP/2019 14 Januari 2019
11	PT. Tarimbang Jaya Raya	NTT	Sumba Timur	25.00				Kep. Gub. NTT No. 522.16/51/DPMPTSP/2018 Tanggal 12 November 2018
12	PT. Aguila	NTT	Sumba Timur	220.00				Kep. Gub. NTT No. 522.16/21/DPMPTSP/2019 Tanggal 31 Mei 2019
13	PT. Jayaputra Adhitama	NTB	Sumbawa	228.00				Kep. Gub. NTB No. 503/01-II/03/IUPJLWA/DPMPTSP/2021 Tanggal 23 Februari 2021
14	PT. Labuanbajo Flores Ecoturisme	NTT		2,405.00				SK. Kepala DPMPTSP Provinsi NTT Nomor DPMPTSP 522.16/11/PTSP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
15	PT. Agrilindo Estate	Kepulauan Riau		175.39				SK Gubernur Kep. Riau Nomor 073/1B.11/DPMPTSP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
16	PT. Villa Pantai Mutiara	Kepulauan Riau		191.78				SK Gubernur Kep. Riau Nomor 074/1B.11/DPMPTSP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
17	PT. Golden Beach Resort	Kepulauan Riau		365.31				SK Gubernur Kep. Riau Nomor 075/1B.11/DPMPTSP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
18	PT. Barelang Elektrindo Era Cemerlang	Kepulauan Riau		7.02				SK Gubernur Kep. Riau Nomor 079/1B.11/DPMPTSP/II/2021 tanggal 25 Februari 2021
19	PT. Pantai Cermin Indah Lestari	Kepulauan Riau		95.16				SK Gubernur Kep. Riau Nomor 167/1B.11/DPMPTSP/V/2021 tanggal 31 Mei 2021
20	PT. Riau Ekowisata Funtasy	Kepulauan Riau		16.99				SK Gubernur Kep. Riau Nomor 168/1B.11/DPMPTSP/V/2021 tanggal 31 Mei 2021
21	PT. Batama Budidaya Indonesia	Kepulauan Riau		6.30				SK Gubernur Kep. Riau Nomor 169/1B.11/DPMPTSP/V/2021 tanggal 31 Mei 2021
JUMLAH				55,792.31	416	1,428,934,500,000	-	

TABEL. 3.3.
PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN (PBPH) KEGIATAN PEMANFAATAN SYLVOPASTURA TAHUN 2021

No	Nama Perusahaan	Provinsi	Kabupaten	Luas	Tenaga Kerja	Investasi	SK / Tanggal
				(Ha)	(Orang)	(IDR)	
1	PT. Sumatera Dairy Farm	Sumatera Utara	Tanah Karo	73	236	232,498,250,000.00	SK.605/Menhut-II/2011 21 Oktober 2011
2	PT. Penyelamat Alam Nusantara	Lampung	Lampung Selatan	543	40	1,500,000,000.00	SK.834/Menhut-II/2014 26 September 2014
JUMLAH				616	276	233,998,250,000	

TABEL. 3.4
PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN (PBPH) KEGIATAN PEMANFAATAN HHBK TAHUN 2021

No.	Nama Perusahaan	SK IUPHHBK		Jenis HHBK	Luas (Ha)	Provinsi/Kabupaten	Masa Berlaku
		SK	TGL				
1	PT. National Sago Prima	IUPHHBK-HT SK.380/Menhut-II/2009 Jo SK.77/Menhut-II/2013	25-06-2009 04-02-2013	Sagu	21,418.00	Riau/Bengkalis	25 Tahun
2	PT. Agrindo Indonesia Jaya	IUPHHBK-HA SK Bupati Nomor 63 Tahun 2009 Tgl 20-10-2009, jo. SK Nomor : 522.5/90/BUP/IX/2013	13-09-2013	Sagu	39,920.00	Papua/Mamberamo Raya	8 Tahun
3	PT. Austrindo Nusantara Jaya (ANJ) Agri Papua	IUPHHBK-HA SK Bupati Sorong Selatan No. 86 Tahun 2010	12 Mei 2010	Sagu	40,000.00	Papua Barat/Sorong Selatan	25 Tahun
4	PT. Nusantara Sago Prima	IUPHHBK-HA SK Bupati No.45 Tahun 2011	25-03-2011	Sagu	10,660.00	Papua/Jayapura	20 Tahun
5	PT. Tunas Pangan Saguindo	IUPHHBK-HA SK Bupati No.5/2011	24-01-2011	Sagu	54,000.00	Papua Barat/Telu Bintuni	25 Tahun
6	PT. Tugu Palma Sejati	IUPHHBK-HA SK Bupati No.6/2011	24-9-2011	Sagu	55,000.00	Papua Barat/Teluk Bintuni	25 Tahun
7	KUD. Tunas Sari	IUPHHBK-HT SK. Bupati Konawe Nomor 475 Tahun 2011	05-08-2011	Getah Pinus	30.00	Sulawesi Tenggara/Konawe	10 Tahun
8	Perum PERHUTANI	IUPHHBK-HA SK Bupati Sorong Selatan No.522.223/B55/XII Tahun 2012	14-12-2012	Sagu	16,055.00	Papua Barat/Sorong Selatan	25 Tahun
9	PT. Sinar Beru-Beru	IUPHHBK-HA SK. Bupati Nomor : 522.22/KPTS- 182/XII/2012	18-12-2012	Rotan	-	Sulawesi Barat/Mamasa	10 Tahun
10	KUD. Tunas Sari	IUPHHBK-HT SK. Bupati Muna Nomor 427 Tahun 2013	22-07-2013	Getah Pinus	30.00	Sulawesi Tenggara/Muna	10 Tahun
11	PT. First Flower	IUPHHBK-HA SK. Bupati Kep. Meranti Nomor 132 Tahun 2013	01-08-2013	Nipah	8,000.00	Riau/Kep. Meranti	10 Tahun
12	PD. Pembangunan Tanoh Gayo	IUPHHBK-HA SK Gubernur No. 522.614/BP2T/1046/IUPHHBK/V/2014	23-05-2014	Getah Pinus	4,740.00	Nanggroe Aceh Darussalam/Aceh Tengah	25 Tahun
13	PT. Adimitra Pinus Utama	IUPHHBK-HT SK. Gubernur Nomor : 1/L.15/PTSP/2018	09-07-2018	Getah Pinus	3,566.06	Sulawesi Selatan/Gowa	20 Tahun
14	Koperasi Pinus Jaya Sejahtera	IUPHHBK-HT SK. Gubernur Nomor : 36/DPMESDM- TRANS/SK/IUPHHBK/V/2018	21-05-2018	Getah Pinus	361.55	Gorontalo/Gorontalo	20 Tahun
15	CV. Gunung Berlian	IUPHHBK-HA SK. Gubernur Nomor : 256 Tahun 2019	43756	Daun Kayu Putih	5,942.00	Buru/Maluku	35 Tahun
TOTAL LUAS					259,722.61		

TABEL 3.5
PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) BERDASARKAN KELOMPOK JENIS HHBK AHUN 2021

No	Nama Provinsi	Bambu Hutan	Biji Kopi	Biji-bijian	Buah dan Umbi-umbian	Daun dan Akar-akaran	Getah Kayu Hutan	Kulit Kayu	Lain-lain	Resin	Rotan Lainnya	Rotan Lambang	Rotan Manau	Rotan Segi	Rotan Semambu	Rotan Tohiti
1	Bali	-	163	77	749	633	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
2	Bangka Belitung	-	-	-	324	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Banten	22	2	95	7	651	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bengkulu	-	-	-	-	-	208	-	-	20	-	-	-	-	-	-
5	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	4,599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Gorontalo	-	-	-	-	-	220	-	-	-	70	-	-	-	-	-
7	Jambi	-	-	-	2,622	-	8,346	-	-	-	71	-	32	16	20	-
8	Jawa Barat	538	392	2,704	218	12,063	18,526	-	1,744	51	52	-	-	-	-	-
9	Jawa Tengah	217	1,244	42,889	5,618	7,470	36,998	-	11,440	224	94	-	-	-	-	-
10	Jawa Timur	710	3,110	56,006	5,985	31,997	27,957	20	68,405	105	-	-	-	-	-	-
11	Kalimantan Barat	-	-	-	525	-	1,836	-	-	-	-	-	-	10	-	-
12	Kalimantan Selatan	-	-	293	1,764	-	2,364	99	2	277	-	-	-	-	-	-
13	Kalimantan Tengah	-	-	-	19,746	3	30	-	1	16	-	-	-	650	-	-
14	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	1,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Lampung	14	-	-	1,438	-	3,614	-	115,610	-	-	-	-	-	-	-
17	Maluku	-	-	-	-	7,500	-	-	-	737	-	-	-	-	-	-
18	Maluku Utara	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	738	-	9,038	-	-	58	-	-	278	64	2,828	-
20	Nusa Tenggara Barat	499	14	1,329	103	23	-	-	13	-	712	-	-	-	-	-
21	Papua	-	-	-	-	-	-	1,254	-	1,003	-	-	-	-	-	-
22	Papua Barat	-	-	-	1	-	-	35	4,529	20	-	-	-	-	-	-
23	Riau	-	-	2	115	-	792	-	2,206	8	-	-	-	-	-	-
24	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	253	-	-	-	65,712	15	-	-	-	-
25	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	4,420	-	-	1	1,443	574	-	-	-	300
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	71	1,412	134	-	1,272	11,373	894	-	-	-	-
27	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	234	-	-	-	1,585	462	-	-	-	179
28	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	1,637	-	-	-	9	-	3,429	16	181	-
29	Sumatera Selatan	-	41	33	206	800	877	-	15	-	-	-	-	-	-	-
30	Sumatera Utara	-	-	1	32,715	-	13,811	-	0	-	6	-	57	26	164	-
Grand Total		2,001	4,966	103,429	72,874	65,825	134,402	1,543	203,971	3,792	81,126	1,946	3,796	781	3,193	582

TABEL 4.1
JUMLAH PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPBH) SKALA USAHA BESAR TAHUN 2017 S.D 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
1	Aceh	1	1	1	1	1
2	Sumatera Utara	38	39	40	40	37
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	26	26	27	31	32
5	Jambi	30	32	32	33	34
6	Sumatera Selatan	16	16	17	18	18
7	Bengkulu	2	2	2	3	3
8	Lampung	5	6	9	11	10
9	Kep.Riau	1	1	1	1	1
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
11	Banten	5	5	5	5	4
12	DKI Jakarta	1	1	1	1	-
13	Jawa Barat	20	20	20	20	19
14	DI Yogyakarta	-	1	1	1	1
15	Jawa Tengah	95	99	111	115	122
16	Jawa Timur	123	129	145	157	152
17	Bali	1	1	1	1	1
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	44	44	45	45	46
21	Kalimantan Barat	15	15	16	17	13
22	Kalimantan Selatan	30	31	31	31	20
23	Kalimantan Tengah	20	20	22	23	23
24	Kalimantan Utara	7	7	7	7	7
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	1	2
27	Sulawesi Tengah	1	1	1	1	1
28	Sulawesi Selatan	6	6	6	6	6
29	Sulawesi Barat	1	1	1	2	2
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	4	4	4	4	4
32	Maluku Utara	2	2	2	2	2
33	Papua	12	13	13	15	14
34	Papua Barat	12	13	13	15	16
JUMLAH		518	536	574	607	591

TABEL 4.2.
TOTAL KAPASITAS IZIN PRODUKSI PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBP HH) TAHUN 2017 S.D. 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		M3/ Tahun	M3/ Tahun	M3/ Tahun	M3/ Tahun	M3/ Tahun
1	Aceh	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
2	Sumatera Utara	2,253,502.00	2,667,402.00	2,692,402.00	2,729,402.00	2,609,402.00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	23,495,593.00	23,495,593.00	23,505,593.00	23,599,593.00	23,624,593.00
5	Jambi	8,907,120.00	8,960,870.00	8,960,870.00	9,096,070.00	9,114,070.00
6	Sumatera Selatan	11,653,000.00	11,653,000.00	11,781,840.00	11,856,840.00	11,856,840.00
7	Bengkulu	82,000.00	82,000.00	82,000.00	112,000.00	112,000.00
8	Lampung	217,500.00	457,500.00	587,500.00	672,500.00	575,000.00
9	Kep.Riau	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
11	Banten	638,210.00	638,210.00	638,210.00	638,210.00	553,210.00
12	DKI Jakarta	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	-
13	Jawa Barat	814,200.00	814,200.00	814,200.00	814,200.00	878,200.00
14	DI Yogyakarta	-	73,200.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00
15	Jawa Tengah	5,953,363.00	6,314,363.00	7,150,963.00	7,385,201.00	8,008,151.00
16	Jawa Timur	6,445,448.00	6,705,648.00	8,077,673.00	8,972,173.00	9,303,393.00
17	Bali	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	45,367.60
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	10,780,404.00	10,780,404.00	10,967,464.00	11,037,464.00	11,097,464.00
21	Kalimantan Barat	1,960,603.00	1,960,603.00	2,119,603.00	2,161,603.00	1,966,503.00
22	Kalimantan Selatan	4,253,695.00	4,306,919.00	4,306,919.00	4,306,919.00	3,651,369.00
23	Kalimantan Tengah	2,306,116.00	2,306,116.00	2,646,416.00	2,679,416.00	2,679,416.00
24	Kalimantan Utara	1,824,972.45	1,824,972.45	1,824,972.45	1,824,972.45	1,824,972.45
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	524,680.00	1,471,480.00
27	Sulawesi Tengah	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
28	Sulawesi Selatan	672,960.00	672,960.00	642,960.00	642,960.00	642,960.00
29	Sulawesi Barat	7,200.00	7,200.00	7,200.00	32,200.00	32,200.00
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	494,700.00	494,700.00	494,700.00	494,700.00	494,700.00
32	Maluku Utara	511,200.00	511,200.00	511,200.00	511,200.00	906,872.00
33	Papua	3,411,632.00	3,519,632.00	3,519,632.00	3,651,632.00	3,634,632.00
34	Papua Barat	1,460,536.00	1,490,536.00	1,515,536.00	1,550,536.00	1,562,536.00
JUMLAH		88,387,354.45	89,980,628.45	93,164,453.45	95,611,071.45	96,893,531.05

TABEL 4.3
INVESTASI PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPBH) TAHUN 2017 S.D. 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		IDR	IDR	IDR	IDR	IDR
1	Aceh	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
2	Sumatera Utara	1,708,498,643,318	1,995,306,673,474	1,997,484,276,845	2,002,164,276,845	1,821,564,276,845
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	19,248,981,394,395	19,248,981,394,395	19,254,236,394,395	19,297,212,220,673	19,237,712,220,673
5	Jambi	2,746,674,822,421	2,800,174,822,421	2,800,174,822,421	2,920,674,820,102	2,933,574,820,102
6	Sumatera Selatan	6,202,335,013,016	6,202,335,013,016	6,886,508,103,551	6,911,508,103,551	6,911,508,103,551
7	Bengkulu	105,000,000,000	105,000,000,000	105,000,000,000	402,440,000,000	402,440,000,000
8	Lampung	384,000,000,000	747,635,000,000	778,232,875,000	794,782,875,000	653,782,875,000
9	Kep. Riau	212,002,700,000	212,002,700,000	212,002,700,000	212,002,700,000	212,002,700,000
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
11	Banten	248,947,827,148	248,947,827,148	248,947,827,148	248,947,827,148	232,715,112,059
12	DKI Jakarta	92,091,600,000	92,091,600,000	92,091,600,000	92,091,600,000	-
13	Jawa Barat	521,463,686,277	521,463,686,277	521,463,686,277	521,463,686,277	514,616,605,277
14	DI Yogyakarta	-	9,691,450,000	9,691,450,000	9,691,450,000	9,691,450,000
15	Jawa Tengah	3,815,114,864,908	3,902,043,739,908	4,232,054,053,008	4,267,554,053,008	5,612,489,960,484
16	Jawa Timur	4,123,815,197,163	4,408,012,662,096	5,290,023,205,379	5,830,265,551,359	5,777,818,675,768
17	Bali	7,509,500,000	7,509,500,000	7,509,500,000	7,509,500,000	106,061,427,000
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	12,368,708,945,600	12,368,708,945,600	12,538,708,945,600	12,616,587,609,600	12,620,662,609,600
21	Kalimantan Barat	1,049,411,215,538	1,049,411,215,538	1,346,211,215,538	1,529,901,215,538	1,518,592,193,652
22	Kalimantan Selatan	1,960,198,855,695	2,038,860,855,695	2,038,860,855,695	2,038,860,855,695	1,689,764,468,715
23	Kalimantan Tengah	1,961,093,781,811	1,961,093,781,811	2,607,846,305,811	2,653,333,768,011	2,653,333,768,011
24	Kalimantan Utara	966,567,576,501	966,567,576,501	966,567,576,501	966,567,576,501	966,567,576,501
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	1,255,000,000,000	1,678,000,000,000
27	Sulawesi Tengah	6,736,025,379	6,736,025,379	6,736,025,379	6,736,025,379	6,736,025,379
28	Sulawesi Selatan	407,082,683,521	407,082,683,521	407,032,683,521	407,032,683,521	407,032,683,521
29	Sulawesi Barat	7,964,175,000	7,964,175,000	7,964,175,000	19,964,175,000	19,964,175,000
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	238,553,093,360	673,265,447,000	673,265,447,000	673,265,447,000	673,265,447,000
32	Maluku Utara	673,265,447,000	238,553,093,360	238,553,093,360	238,553,093,360	1,767,039,159,837
33	Papua	2,140,748,122,713	2,140,748,122,713	2,140,748,122,713	2,250,937,372,713	2,351,937,372,713
34	Papua Barat	954,893,845,019	969,893,845,019	974,710,575,942	1,009,394,027,342	1,011,394,027,342
JUMLAH		62,161,659,015,784	63,340,081,835,873	66,392,625,516,085	69,194,442,513,624	71,800,267,734,031

TABEL 4.4
TENAGA KERJA PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPBH) TAHUN 2017 S.D. 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		Orang	Orang	Orang	Orang	Orang
1	Aceh	50	50	50	50	50
2	Sumatera Utara	13,514	13,832	13,692	13,739	12,165
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	26,834	26,834	26,941	27,640	28,012
5	Jambi	19,617	19,937	20,418	20,547	20,587
6	Sumatera Selatan	6,866	6,866	7,277	7,677	7,677
7	Bengkulu	821	821	821	1,011	1,011
8	Lampung	4,011	4,172	4,555	4,820	2,793
9	Kep.Riau	1,578	1,578	1,578	1,578	1,578
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
11	Banten	8,760	8,760	8,760	8,760	6,124
12	DKI Jakarta	696	696	696	696	-
13	Jawa Barat	9,589	9,589	9,589	9,589	9,574
14	DI Yogyakarta	-	469	469	469	469
15	Jawa Tengah	58,584	59,764	63,426	63,991	67,084
16	Jawa Timur	71,294	73,084	82,451	86,869	86,642
17	Bali	200	200	200	200	182
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	28,808	28,808	29,339	29,483	29,719
21	Kalimantan Barat	16,163	16,163	16,524	16,574	14,602
22	Kalimantan Selatan	26,808	26,916	26,916	26,916	15,855
23	Kalimantan Tengah	9,129	9,129	9,939	10,118	10,118
24	Kalimantan Utara	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	170	746
27	Sulawesi Tengah	221	221	221	221	221
28	Sulawesi Selatan	5,569	5,569	5,569	5,569	5,569
29	Sulawesi Barat	11	11	11	231	231
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	3,504	3,504	5,889	5,889	5,889
32	Maluku Utara	5,889	5,889	3,504	3,504	5,725
33	Papua	7,299	7,299	7,299	7,424	7,459
34	Papua Barat	4,220	4,280	4,342	4,606	4,631
JUMLAH		334,608	339,014	355,049	362,914	349,286

TABEL 4.5.
PERKEMBANGAN PASOKAN KAYU BULAT UNTUK BAHAN BAKU INDUSTRI PER SUMBER BAHAN BAKU TAHUN 2017 S.D. 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		m3	m3	m3	m3	m3
1	IUPHHK-HA	4,739,399.43	4,895,796.66	4,926,593.87	4,437,574.56	4,365,772.70
2	IUPHHK-HT (Kayu Tanaman)	37,512,959.66	40,079,339.02	39,822,461.36	45,189,784.37	46,715,882.08
3	IUPHHK-HT (Pemanfaatan Kayu Penyiapan Lahan Penanaman)	430,669.89	610,564.84	468,957.45	203,255.00	305,988.81
4	IPK	404,057.05	533,285.64	503,385.49	213,890.64	299,298.51
5	Perum Perhutani	144,931.09	183,135.04	270,114.26	175,190.14	250,774.73
6	Hutan Rakyat - Tanaman Budidaya	5,283,903.50	6,012,594.82	7,563,649.27	5,509,065.86	6,611,956.32
7	Hutan Rakyat - Kayu Tumbuh Alami	55,841.47	60,282.31	189,041.03	85,731.98	153,576.89
8	Perkebunan Rakyat / Swasta	1,214,389.21	1,328,862.09	1,538,853.20	1,262,174.55	1,829,244.61
9	Impor	1,320,725.27	808,173.62	650,329.96	448,580.78	13,435.31
10	Industri Lain	537,806.03	634,891.72	748,416.60	474,009.14	507,613.85
11	Pedagang / TPT KB	609,878.42	764,742.05	657,316.37	489,545.23	545,682.99
12	KPH / HTR / Sumber Lainnya	-	-	-	-	135,962.46
JUMLAH		52,254,561.01	55,911,667.82	57,339,118.86	58,488,802.24	61,735,189.25

TABEL 4.6
REALISASI PEMENUHAN BAHAN BAKU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPBH) SKALA USAHA BESAR TAHUN 2017 S.D 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021*
		m3	m3	m3	m3	m3
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	237.26	10,340.09	-	-
2	Sumatera Utara	1,792,380.09	2,039,351.48	2,049,951.75	2,042,727.17	1,810,893.07
3	Sumatera Barat	-	-	2,842.03	-	-
4	Riau	24,972,191.45	24,645,757.31	23,770,798.40	27,751,648.78	28,110,317.52
5	Jambi	4,077,845.64	4,032,534.98	4,003,836.66	4,412,695.14	4,412,789.88
6	Sumatera Selatan	8,948,622.75	12,372,421.16	13,488,418.91	13,473,706.92	13,398,845.42
7	Bengkulu	1,821.67	1,129.11	24,555.39	-	-
8	Lampung	28,985.80	49,614.64	266,288.77	193,473.72	222,687.98
9	Kep.Riau	-	-	3,783.73	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
11	Banten	109,525.76	113,986.60	105,872.71	35,326.49	62,707.04
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	137,079.53	173,052.52	271,399.44	161,026.20	232,838.60
14	DI Yogyakarta	-	4,345.73	11,521.79	18,721.71	20,175.17
15	Jawa Tengah	2,887,757.55	3,247,898.89	3,349,474.43	2,637,578.62	3,590,706.65
16	Jawa Timur	3,278,695.65	3,578,324.51	4,394,279.80	3,264,207.83	4,244,440.96
17	Bali	20,231.72	20,545.66	28,144.17	14,386.76	16,706.70
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	3,452.47	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	1,662,047.26	1,203,215.49	1,056,910.41	576,090.18	1,343,155.24
21	Kalimantan Barat	663,970.07	670,296.18	547,751.92	515,939.24	454,564.81
22	Kalimantan Selatan	939,209.41	1,090,300.68	1,042,192.09	1,057,731.83	1,078,291.17
23	Kalimantan Tengah	1,217,361.98	1,066,007.57	1,093,021.51	1,017,788.10	1,287,947.41
24	Kalimantan Utara	336,429.14	386,663.68	400,808.16	309,235.11	274,292.98
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	7,317.39	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	29,342.35	-	-
28	Sulawesi Selatan	296,894.09	346,783.34	302,760.37	215,168.59	195,300.97
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	21,867.07	-	-
31	Maluku	6,555.61	10,536.21	23,283.57	7,535.33	8,280.43
32	Maluku Utara	-	-	8,902.93	-	-
33	Papua	654,009.79	607,513.06	732,485.59	615,933.87	791,999.67
34	Papua Barat	222,946.04	251,151.75	287,514.95	167,880.64	178,247.58
JUMLAH		52,254,561.01	55,911,667.82	57,339,118.85	58,488,802.24	61,735,189.25

TABEL 4.7
REALISASI PENGGUNAAN BAHAN BAKU KAYU BULAT PBPHH SKALA USAHA BESAR PER JENIS PRODUKSI TAHUN 2017 S.D. 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		m3	m3	m3	m3	m3
1	Kayu Lapis dan LVL	6,450,949.15	7,110,110.22	6,947,802.09	6,139,074.67	7,038,734.44
2	Veneer	1,504,786.51	1,943,131.47	2,171,384.00	2,044,602.12	2,297,878.18
3	Kayu Gergajian	3,181,708.39	3,536,651.50	4,305,442.41	2,893,599.84	2,964,266.59
4	Serpih Kayu dan Pulp	40,650,812.91	42,243,548.68	43,049,471.95	47,992,376.27	49,403,248.67
5	Produk Lain	36,496.12	-	123,564.74	198,418.04	250,827.05
JUMLAH		51,824,753.07	54,833,441.87	56,597,665.19	59,268,070.94	61,954,954.93

TABEL 4.8.
REALISASI PENGGUNAAN BAHAN BAKU KAYU BULAT PBPHH SKALA USAHA BESAR TAHUN 2017 - 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		m3	m3	m3	m3	m3
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	10,656.16	-	-
2	Sumatera Utara	1,779,217.54	639,722.80	2,071,845.67	2,062,754.92	1,850,592.44
3	Sumatera Barat	-	1,450,315.76	2,600.11	-	-
4	Riau	25,490,467.54	24,261,634.27	23,964,671.31	27,532,167.51	28,824,411.39
5	Jambi	4,162,229.32	3,955,042.32	4,115,113.83	4,481,971.28	4,484,481.68
6	Sumatera Selatan	8,430,670.05	12,252,832.20	13,345,475.47	14,042,052.18	13,481,064.84
7	Bengkulu	500.28	7,771.31	23,581.03	-	-
8	Lampung	28,552.42	84,661.19	276,504.99	286,711.21	218,133.77
9	Kep.Riau	-	-	3,157.87	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
11	Banten	109,137.10	131,417.56	112,984.30	42,617.14	61,750.71
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	170,272.04	217,760.50	214,700.65	200,000.53	231,724.75
14	DI Yogyakarta	-	4,091.65	11,016.35	18,899.49	19,676.82
15	Jawa Tengah	2,636,388.60	3,037,619.56	3,096,955.62	2,644,191.92	3,157,950.83
16	Jawa Timur	3,078,717.89	3,461,339.51	4,069,512.22	3,376,715.67	4,097,873.33
17	Bali	24,851.54	18,847.69	24,429.36	18,781.25	16,891.13
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	3,413.49	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	1,657,738.27	1,156,104.66	1,051,444.54	666,032.72	1,288,946.58
21	Kalimantan Barat	637,482.85	505,294.35	469,673.75	445,082.75	462,336.32
22	Kalimantan Selatan	914,398.08	953,326.88	955,700.90	1,009,436.13	1,011,163.31
23	Kalimantan Tengah	1,211,563.84	1,086,929.29	1,044,680.12	1,017,860.20	1,319,065.20
24	Kalimantan Utara	301,594.70	351,064.72	379,408.06	305,460.21	267,233.19
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	7,370.54	6,014.41	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	29,614.81	-	-
28	Sulawesi Selatan	292,485.71	332,096.66	322,285.07	243,349.25	187,677.61
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	19,117.26	-	-
31	Maluku	6,448.73	10,265.54	21,302.39	10,545.44	8,234.22
32	Maluku Utara	-	-	8,011.20	-	-
33	Papua	694,227.68	634,747.30	660,812.15	672,568.10	801,927.36
34	Papua Barat	197,808.89	273,185.61	282,982.09	190,873.03	163,819.45
JUMLAH		51,824,753.07	54,833,441.87	56,597,665.19	59,268,070.94	61,954,954.93

Sumber : Dit. Bina Pengolahan dan Pemasarah Hasil Hutan, Ditjen PHL

TABEL 4.9
PRODUKSI PLYWOOD DAN LAMINATED VENEER LUMBER (LVL) DARI BPBHH SKALA USAHA BESAR TAHUN 2017 S.D 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		m3	m3	m3	m3	m3
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	27,689.29	44,335.21	37,291.99	41,623.16	50,573.29
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	77,637.44	63,826.76	54,956.65	36,929.47	40,963.54
5	Jambi	98,121.86	135,835.77	140,534.64	100,944.81	111,815.59
6	Sumatera Selatan	23,278.92	34,221.79	30,205.46	15,537.60	14,804.32
7	Bengkulu	-	-	1,697.25	-	-
8	Lampung	-	-	17,327.14	13,643.13	21,836.19
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
11	Banten	159,399.00	196,894.41	198,616.23	112,296.67	121,252.50
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	43,664.33	47,424.34	51,435.25	42,772.30	62,136.52
14	DI Yogyakarta	-	-	-	1,044.36	717.28
15	Jawa Tengah	838,669.13	969,246.99	931,167.62	785,151.96	1,117,553.42
16	Jawa Timur	825,927.61	1,043,903.03	1,181,812.62	1,008,950.67	1,468,340.23
17	Bali	4,947.65	7,789.48	4,379.57	1,816.39	3,567.72
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	1,990.78	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	387,487.91	437,710.03	371,668.25	282,682.53	266,175.75
21	Kalimantan Barat	243,818.25	230,155.16	200,890.78	180,741.52	198,600.60
22	Kalimantan Selatan	460,236.31	459,080.29	433,582.94	483,091.10	482,081.73
23	Kalimantan Tengah	112,662.37	78,550.77	44,197.51	69,183.75	85,325.01
24	Kalimantan Utara	132,147.45	143,607.66	147,696.41	115,296.54	113,999.88
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	211.51	-	-
28	Sulawesi Selatan	104,520.94	111,485.56	103,146.50	73,634.10	64,584.33
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	2,428.43	2,910.03	4,897.03	5,926.50	3,891.02
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	217,144.74	206,579.61	199,680.42	137,425.06	162,884.10
34	Papua Barat	1,415.89	-	299.10	142.88	-
JUMLAH		3,761,197.52	4,213,556.89	4,157,685.65	3,508,834.50	4,391,103.03

TABEL 4.10
PERKEMBANGAN PRODUKSI VENEER DARI PBPHH SKALA USAHA BESAR TAHUN 2017 S.D. 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		m3	m3	m3	m3	m3
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	5,599.99	-	-
2	Sumatera Utara	18,879.36	22,795.27	24,822.95	16,512.93	21,764.68
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	255.15	3,927.47	7,235.56	10,759.59	-
5	Jambi	32,495.75	49,919.79	55,374.40	32,503.45	43,391.62
6	Sumatera Selatan	33,592.54	50,427.38	69,042.90	41,104.49	28,454.79
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	16,232.18	27,969.57	32,772.14	26,317.64	28,617.80
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
11	Banten	-	2.72	3,391.29	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	27,542.51	61,454.96	42,629.20	36,486.44	47,534.48
14	DI Yogyakarta	-	-	1,166.65	-	-
15	Jawa Tengah	253,220.89	349,013.75	345,721.86	287,457.40	393,339.89
16	Jawa Timur	359,536.24	442,637.72	536,612.77	447,432.01	625,327.36
17	Bali	-	-	2,501.00	-	760.92
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	7,642.51	9,543.96	8,028.77	13,680.28	48,709.73
21	Kalimantan Barat	22,823.33	8,747.74	6,959.77	3,404.44	4,112.57
22	Kalimantan Selatan	32,175.75	23,767.65	23,583.65	18,813.47	30,652.64
23	Kalimantan Tengah	19,902.91	31,598.03	29,281.02	28,304.41	32,086.54
24	Kalimantan Utara	654.96	647.40	602.46	376.10	1,744.23
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	535.11	-	-
28	Sulawesi Selatan	68,551.14	77,795.49	78,242.93	59,465.78	51,881.08
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	3,340.17	4,815.92	7,134.91	5,310.76	4,963.56
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	65,927.96	77,214.31
34	Papua Barat	10,955.30	15,102.33	16,535.77	6,606.72	-
JUMLAH		907,800.67	1,180,167.15	1,297,775.10	1,100,463.87	1,440,556.19

TABEL 4.11
PRODUKSI KAYU GERGAJIAN DARI PBPHH SKALA USAHA BESAR TAHUN 2017 - 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		m3	m3	m3	m3	m3
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	1,310.51	-	-
2	Sumatera Utara	130,948.22	203,206.03	241,772.79	153,197.48	143,137.17
3	Sumatera Barat	-	1,734.28	1,904.79	-	-
4	Riau	56,609.96	70,360.48	95,616.00	73,238.29	76,415.85
5	Jambi	1,343.53	11,478.54	26,705.97	19,593.76	24,971.30
6	Sumatera Selatan	18,395.97	16,108.15	17,616.82	8,242.60	23,897.92
7	Bengkulu	286.98	1,611.34	12,684.41	-	-
8	Lampung	-	21,024.66	60,405.83	29,921.23	32,076.11
9	Kep. Riau	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
11	Banten	22,713.18	39,311.37	28,324.42	188.69	3,938.15
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	19,906.28	27,445.17	30,437.38	12,970.40	11,272.98
14	DI Yogyakarta	-	3,718.38	6,492.13	298.66	-
15	Jawa Tengah	526,259.58	528,703.34	550,215.44	341,521.86	415,294.57
16	Jawa Timur	798,680.78	768,582.46	890,353.26	580,327.80	650,010.26
17	Bali	9,276.62	2,316.31	7,555.27	7,951.00	6,102.09
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	73,049.71	65,318.36	83,377.85	38,406.93	45,839.42
21	Kalimantan Barat	17,701.31	10,429.71	10,284.05	10,439.51	10,525.97
22	Kalimantan Selatan	2,713.01	19,390.87	55,605.00	1,506.33	1,631.39
23	Kalimantan Tengah	28,000.99	42,260.30	92,811.12	22,164.50	17,617.39
24	Kalimantan Utara	29,121.29	26,353.54	37,837.80	21,253.03	14,972.74
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	3,702.96	1,179.19	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	19,687.57	-	-
28	Sulawesi Selatan	13,189.04	15,937.28	14,721.78	5,808.57	2,267.59
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	14,389.17	-	-
31	Maluku	-	-	5,382.08	346.76	264.18
32	Maluku Utara	-	-	5,757.57	-	-
33	Papua	109,854.37	106,267.91	126,162.90	114,308.09	134,521.63
34	Papua Barat	54,315.22	93,289.62	90,522.33	79,107.61	77,189.38
JUMLAH		1,912,366.05	2,078,551.06	2,529,113.43	1,520,793.10	1,691,946.10

TABEL 4.12
PRODUKSI SERPIH KAYU DARI PBPHH SKALA USAHA BESAR TAHUN 2017 S.D 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		m3	m3	m3	m3	m3
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	1,287,382.08	1,309,524.86	1,306,885.16	1,407,863.12	1,270,547.21
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	18,672,662.65	17,469,836.14	16,553,668.33	21,858,266.68	23,078,850.58
5	Jambi	3,176,172.46	3,052,723.43	3,105,909.16	3,412,007.12	3,700,438.54
6	Sumatera Selatan	6,547,468.98	8,714,302.58	9,528,393.63	10,488,225.50	10,419,985.03
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	62,198.62	58,890.43	53,528.24
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
11	Banten	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	290.50	290.50
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	446,805.21	45,171.00	7.82	14.77	296,919.60
21	Kalimantan Barat	25,497.68	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Tengah	804,475.28	699,947.40	640,604.70	657,597.61	958,600.77
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	44.36
34	Papua Barat	65,525.24	77,527.65	86,669.55	36,310.64	25,353.04
JUMLAH		31,025,989.58	31,369,033.06	31,284,336.97	37,919,466.37	39,804,557.87

TABEL 4.13.
PRODUKSI PULP DARI BPBHH SKALA USAHA BESAR TAHUN 2017 S.D. 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		Ton	Ton	Ton	Ton	Ton
1	Nangroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	182,291.77	169,905.63	185,160.67	205,932.91	200,191.97
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	4,121,499.69	4,001,383.38	3,840,339.22	4,422,886.66	4,631,010.31
5	Jambi	934,846.96	890,243.51	943,425.59	1,026,345.42	1,051,651.86
6	Sumatera Selatan	1,820,291.04	2,560,103.88	2,837,705.64	2,937,275.21	2,714,729.33
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-
9	Kep.Riau	-	-	-	-	-
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
11	Banten	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-
JUMLAH		7,058,929.46	7,621,636.40	7,806,631.12	8,592,440.20	8,597,583.47

TABEL 4.14
NILAI EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN PER JENIS PRODUK TAHUN 2017 - 2021

No	Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
		USD	USD	USD	USD	USD
1	Panel	2,276,453,005.27	2,562,684,805.44	2,146,431,188.97	2,169,574,232.20	3,029,922,837.88
2	Kertas	3,457,332,789.83	3,952,314,730.01	3,868,917,652.64	3,541,730,235.42	3,679,074,082.09
3	Pulp	2,374,480,847.80	2,632,555,720.69	2,778,695,819.30	2,530,485,645.99	3,060,987,287.90
4	Woodworking	1,286,882,849.11	1,288,836,941.05	1,144,156,550.45	1,076,610,200.94	1,079,224,168.71
5	Serpih Kayu (Chipwood)	91,020,258.61	46,123,280.73	57,389,329.19	50,450,382.16	98,804,714.11
6	Veneer	77,530,800.47	115,261,170.89	91,979,157.80	80,816,887.37	95,350,893.45
7	Furnitur Kayu	1,353,876,011.78	1,423,146,368.04	1,428,778,504.40	1,536,994,886.83	1,880,870,663.83
8	Bangunan Prefabrikasi	3,285,776.08	4,682,562.29	5,597,669.52	2,030,294.55	1,970,194.19
9	Kerajinan Kayu	92,418,518.87	106,012,076.32	99,493,588.87	86,611,312.01	99,388,027.60
JUMLAH		11,013,280,857.82	12,131,617,655.45	11,621,439,461.14	11,075,304,077.48	13,025,592,869.77

TABEL 4.15
NILAI EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TAHUN 2017 - 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		USD	USD	USD	USD	USD
1	Aceh	-	1,053,048,326.34	-	-	-
2	Sumatera Utara	352,661,418.57	97,511,697.61	295,666,630.26	238,274,363.03	281,762,148.88
3	Sumatera Barat	622,109.51	-	694,197.03	479,346.15	494,399.74
4	Riau	755,072,936.66	2,488,155,771.01	556,483,004.08	530,416,400.90	502,776,253.92
5	Jambi	287,534,658.09	725,466,563.07	287,490,491.97	182,800,901.89	82,190,644.13
6	Sumatera Selatan	646,896,099.18	159,285,402.50	1,403,470,075.29	1,251,969,960.97	1,211,875,089.40
7	Bengkulu	1,161,708.59	-	2,152,027.40	1,012,703.76	-
8	Lampung	7,370,128.94	50,487,094.15	9,995,674.79	16,412,871.03	24,427,821.81
9	Kep.Riau	10,620,639.38	-	8,998,662.26	62,678,671.58	64,355,166.99
10	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
11	Banten	235,528,395.00	312,611,392.73	217,409,184.58	205,375,224.39	275,218,763.74
12	DKI Jakarta	4,091,893,188.05	1,186,556,884.27	4,324,967,359.42	4,138,990,821.92	5,123,352,643.65
13	Jawa Barat	385,712,108.79	1,962,526,361.43	386,817,395.50	377,638,803.45	449,770,997.81
14	DI Yogyakarta	61,436,473.22	88,468,352.23	61,563,463.21	57,308,504.78	62,094,814.46
15	Jawa Tengah	1,549,527,521.50	935,565,829.25	1,484,410,852.96	1,418,601,105.96	1,736,146,038.21
16	Jawa Timur	1,664,642,869.61	2,341,564,764.90	1,675,112,956.73	1,760,136,476.94	2,179,111,471.03
17	Bali	64,280,930.76	22,607,890.11	88,597,563.89	68,939,061.97	73,018,427.81
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	17,791.69	286,253.54
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	251,524.00	536,681.24	694,438.00
20	Kalimantan Timur	189,843,673.13	57,195.86	185,137,781.89	142,093,093.96	179,031,682.02
21	Kalimantan Barat	145,982,546.33	45,605,726.23	101,637,882.07	92,372,219.45	148,856,883.83
22	Kalimantan Selatan	249,347,776.67	510,955,451.09	217,298,338.03	252,485,210.66	326,465,594.97
23	Kalimantan Tengah	55,314,028.29	-	57,293,139.23	51,239,178.53	64,193,453.15
24	Kalimantan Utara	64,782,025.78	-	77,001,455.45	58,933,924.91	45,864,271.99
25	Sulawesi Utara	7,128.55	-	37,250.00	-	-
26	Gorontalo	-	-	39,893.45	-	-
27	Sulawesi Tengah	10,575,796.86	578,322.59	3,065,489.65	1,293,203.12	1,058,858.98
28	Sulawesi Selatan	32,552,459.61	42,508.26	33,092,263.31	25,226,840.80	5,369,490.68
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	1,249,209.86	3,390,119.98	2,485,893.54
32	Maluku Utara	-	-	20,723.17	-	-
33	Papua	146,560,054.25	147,168,021.34	133,784,249.10	126,241,286.90	166,311,701.30
34	Papua Barat	3,354,182.48	3,354,100.48	7,700,722.55	10,439,237.52	18,379,666.19
Jumlah		11,013,280,857.82	12,131,617,655.45	11,621,439,461.14	11,075,304,007.48	13,025,592,869.77

TABEL 4.16
EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN PER NEGARA TUJUAN TAHUN 2017 - 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		USD	USD	USD	USD	USD
1	Tiongkok	2,819,587,819.89	3,058,805,591.49	2,880,052,694.69	3,189,798,556.80	3,754,155,618.15
2	Jepang	1,327,592,947.28	1,509,623,741.31	1,366,243,106.80	1,149,452,687.31	1,379,230,532.39
3	Amerika Serikat	1,130,011,404.17	1,414,861,071.98	1,358,195,709.40	1,620,080,219.42	2,343,237,257.71
4	Korea Selatan	624,790,484.72	734,585,527.51	710,872,497.23	689,750,835.93	737,113,200.54
5	India	488,452,196.31	480,614,489.04	495,337,560.62	325,711,832.64	348,000,312.70
6	Australia	361,275,566.02	371,167,167.32	315,787,758.15	350,191,470.95	370,054,191.43
7	Malaysia	343,594,904.51	383,604,715.95	376,450,350.66	291,805,037.92	377,792,056.72
8	Taiwan	318,454,609.73	325,853,752.17	305,344,833.91	325,061,222.54	297,820,363.61
9	Britania Raya	236,751,440.00	275,072,371.87	277,495,353.77	217,903,596.26	266,844,751.80
10	Arab Saudi	222,777,720.21	194,328,262.85	179,859,057.94	185,469,744.09	138,858,952.02
11	Vietnam	219,743,777.01	275,020,200.47	288,410,128.30	253,102,374.19	358,911,243.94
12	Belanda	197,783,073.84	218,676,256.72	219,835,770.34	222,564,804.28	253,789,720.64
13	Filipina	188,293,594.56	217,554,463.02	201,552,350.33	217,100,787.20	246,970,253.97
14	Bangladesh	165,408,528.31	172,187,370.89	173,962,453.56	107,836,175.48	129,225,725.66
15	Thailand	162,231,249.59	168,193,610.52	163,790,863.54	134,482,635.85	167,112,462.56
16	Jerman	161,692,977.47	173,245,255.37	155,296,939.56	139,228,091.43	155,223,637.50
17	Uni Emirat Arab	142,761,472.86	170,655,386.36	199,902,169.93	130,296,990.54	161,221,973.99
18	Turki	124,465,413.78	91,292,407.08	131,686,284.25	38,632,083.69	71,330,049.33
19	Lain-lain	1,777,611,677.56	1,896,276,013.53	1,821,363,578.14	1,486,834,930.96	1,468,700,565.12
JUMLAH		11,013,280,857.82	12,131,617,655.45	11,621,439,461.14	11,075,304,077.48	13,025,592,869.77

TABEL 5.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEKTOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TAHUN 2017 SD 2021

No	Provinsi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		IDR	IDR	IDR	IDR	IDR
1	Provisi Sumber Daya Hutan	917,669,361,849.00	1,141,414,248,868.00	1,078,480,330,631.00	1,009,577,399,789.00	1,152,352,627,723.00
2	Dana Reboisasi	1,712,914,087,182.49	1,982,019,865,564.00	1,653,956,184,846.00	1,404,552,992,362.00	1,686,012,779,370.00
3	Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPHH)	41,285,180,843.00	101,732,195,506.00	154,722,628,899.00	63,121,473,400.00	87,021,613,574.00
4	Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH)	130,705,529,408.00	18,094,410,710.00	29,956,737,275.00	8,701,978,286.00	52,234,351,179.00
5	Ganti Rugi Tegakan	19,791,592,836.00	86,130,090.00	1,855,561,828.00	9,580,204.00	-
6	Silvopastural	-	-	-	-	1,375,000.00
7	Silvofishery	-	-	-	174,815,500.00	163,942,500.00
8	Transaksi kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon kawasan hutan	-	-	-	-	83,695,541,715.00
9	IUPJL	-	-	-	-	2,887,150.00
Jumlah		2,822,365,752,118.49	3,243,346,850,738.00	2,918,971,443,479.00	2,486,138,239,541.00	3,061,485,118,211.00



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari

STATISTIK DITJEN PHL

Tahun 2021



@DitjenPHL



Ditjen Pengelolaan
Hutan Lestari



phl.menlhk.go.id

**Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari** Gedung
Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 5
Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270